infid International NGO Forum on Indonesian Development

SIKAP GENERASI MILENIAL DAN GENERASI Z TERHADAP TOLERANSI, KEBINEKAAN, DAN KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA

INFID 2021

Judul
Sikap Generasi Milenial dan Generasi Z Terhadap Toleransi, Kebinekaan, dan Kebebasan Beragama di Indonesia

Penyusun
Dr. Alfindra Primaldhi Dahlan
Sahat Khrisfianus Panggabean, M.Psi
Dr. Paksi C.K. Walandouw

Penyunting
Alamsyah M Dja'far

Penyelia aksara
Aldilla Septerina

Penyelaras akhir
Abdul Waidl
Sanita Rini

Sampul dan Tata Letak
PT Startx Digital Indonesia

Ukuran 210mm X 297mm
Jumlah Halaman 70 Halaman + Cover

Januari 2022

ISBN

Penerbit

INFID
Jl. Jatipadang Raya Kav 3 Nomor 105 Jakarta Selatan
www.infid.org

DAFTAR ISI

DAFTAR GRAFIK IV

KATA PENGANTAR VII

BAB 1 PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1
1.2. Tujuan 3
1.3. Pertanyaan Penelitian 4

BAB 2 KERANGKA KONSEPTUAL, METODE PENELITIAN DAN PROFIL RESPONDEN 7

2.1. Kerangka Konseptual 7
2.1.1. Toleransi 7
2.1.2. Toleransi Beragama 8
2.1.3. Menghargai Kebinekaan 8
2.1.4. Kebebasan Beragama 9
2.2. Metode Penelitian 10
2.3. Ruang Lingkup dan Waktu Penelitian 11
2.4. Profil Responden 12

BAB 3 TEMUAN SURVEI 23

3.1. Eksklusivitas dalam Beragama 23
3.2. Sikap terhadap Inklusivitas 24
3.3. Pandangan dan Sikap terhadap Kepemimpinan oleh Kelompok Agama Minoritas 25
3.4. Sikap terhadap Pernikahan Beda Agama 28
3.5. Sikap terhadap Pembangunan Tempat Ibadah Kelompok Minoritas 29
3.6. Sikap terhadap Penerapan Pendidikan Eksklusif dan Inklusif 30
3.7. Sikap terhadap Pengelompokan Tempat Tinggal Berdasarkan Agama 32
3.8. Pengalaman Toleransi dan Intoleransi di Lingkungan Tempat Tinggal 33

3.9. Pengalaman Terkait Kebebasan Beragama 34
3.10. Sikap terhadap Nasionalisme 37
3.11. Toleransi Budaya Pengalaman Toleransi dan Intoleransi di Lingkungan Tempat Tinggal 41
3.12. Sikap terhadap Pernikahan Antar-Suku 44
3.13. Sikap terhadap Pemimpin Perempuan 44
3.14. Ketaatan Beragama dan Nilai yang Dianggap Penting 49
3.15. Pandangan Tentang Mengapa Orang Melakukan Terorisme 51
3.16. Afiliasi Kelompok 52
3.17. Kecenderungan Toleransi 53
3.18. Kesimpulan Temuan 57

BAB 4 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 64

4.1. Kesimpulan 64
4.2. Rekomendasi 65
4.2.1. Rekomendasi untuk Pemerintah Pusat 65
4.2.2. Rekomendasi untuk Pemerintah Daerah 67
4.2.3. Rekomendasi untuk Organisasi Masyarakat Sipil 67
4.2.4. Rekomendasi Untuk Pemuka Agama 67

DAFTAR PUSTAKA 69

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Kategori Responden berdasarkan Provinsi 13
Grafik 2 Kategori Responden berdasarkan Kabupaten/Kota 14
Grafik 3 Kategori Responden berdasarkan Jenis Kelamin 14
Grafik 4 Kategori Responden berdasarkan Usia 15
Grafik 5 Kategori Responden berdasarkan Usia 15
Grafik 6 Kategori Responden berdasarkan Status Pernikahan 16
Grafik 7 Kategori Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan 16
Grafik 8 Kategori Responden berdasarkan Agama 17
Grafik 9 Kategori Responden berdasarkan Pemasukan Rumah Tangga 18
Grafik 10 Kategori Responden Generasi Z berdasarkan Pekerjaan 19
Grafik 11 Kategori Responden Generasi Milenial berdasarkan Pekerjaan 20
Grafik 12 Pernikahan Beda Agama dalam Keluarga Responden 21
Grafik 13 Pernikahan Beda Suku/Etnis atau Beda Negara dalam Keluarga Responden 21
Grafik 14 Kesetujuan dengan Pernyataan Eksklusif Agama 23
Grafik 15 Kesetujuan dengan Pernyataan Inklusif Agama 24
Grafik 16 Kesetujuan dengan Pernyataan Inklusif Agama 25
Grafik 17 Pandangan dan Sikap terhadap Kepemimpinan oleh Kelompok Agama Minoritas 26
Grafik 18 Pandangan dan Sikap Responden terhadap Kepemimpinan Kelompok Agama Minoritas 27
Grafik 19 Pandangan dan Sikap Responden terhadap Kepemimpinan oleh Kelompok Agama Minoritas berdasarkan Jabatan 28
Grafik 20 Sikap terhadap Pernikahan Beda Agama 29
Grafik 21 Sikap terhadap Pembangunan Tempat Ibadah Kelompok Minoritas 30
Grafik 22 Sikap terhadap Penerapan Pendidikan Eksklusif 30
Grafik 23 Sikap terhadap Penerapan Pendidikan Inklusif 31
Grafik 24 Sikap terhadap Tempat Tinggal Berdasarkan Agama 32

Grafik 25 Informasi Responden tentang Tempat Tinggal/Perumahan berdasarkan Agama di Daerah Mereka 32
Grafik 26 Informasi Penerapan Pendidikan Agama Inklusif di Daerah Responden 33
Grafik 27 Informasi Penerapan Pendidikan Agama Ekslusif di Daerah Responden 34
Grafik 28 Praktik Pembatasan dan Pelarangan Hak KBB 35
Grafik 29 Pengalaman terkait Pemaksaan oleh Pemerintah Daerah 36
Grafik 30 Praktik Penangkapan dan Tindakan Tindakan Berlebihan oleh Pemerintah Daerah 36
Grafik 31 Praktik Pelarangan atau Pembatasan Pendirian Organisasi Masyarakat dan Partai Politik serta Partisipasi Politik atas Dasar Agama 37
Grafik 32 Kesetujuan terhadap Nasionalisme 39
Grafik 33 Kesetujuan untuk Tinggal di Negara masing-masing, Menolak Budaya Asing, dan Peran Politik Kelompok Mayoritas 40
Grafik 34 Kesetujuan terhadap Usaha Menggantikan Pancasila 40
Grafik 35 Kesetujuan terhadap Keragaman Budaya 42
Grafik 36 Kesetujuan terhadap Kepemimpinan Seseorang dari Suku/ Adat Minoritas 43
Grafik 37 Pandangan terhadap Jabatan Pemimpin yang Layak bagi Seseorang dari Suku/Adat Minoritas 43
Grafik 38 Kesetujuan terhadap Pernikahan Antarsuku 44
Grafik 39 Kesetujuan terhadap Pemimpin Perempuan berdasarkan Kategori Usia 45
Grafik 40 Kesetujuan Responden Laki-laki dan Perempuan terhadap Pemimpin Perempuan 45
Grafik 41 Pandangan Responden tentang Jabatan Pemimpin Perempuan 46
Grafik 42 Pandangan terkait Kelayakan Perempuan Bertarung Politik dan Mencalonkan Diri 47
Grafik 43 Pandangan terkait Posisi Tertinggi di Kemerintahan yang Layak dijabat Perempuan 47
Grafik 44 Pandangan terkait Posisi Tertinggi di Kementerian/Lembaga yang Layak dijabat Perempuan 48
Grafik 45 Pandangan terkait Posisi Tertinggi di sektor Pendidikan yang Layak dijabat Perempuan 49

Grafik 46 Pandangan terkait Tingkat Ketaatan Beragama 50
Grafik 47 Pandangan tentang Nilai yang dianggap Penting 51
Grafik 48 Pandangan terkait Alasan Orang Melakukan Aksi Terorisme 52
Grafik 49 Pandangan terkait dengan Kelompok yang dinilai Memperjuangkan Kepentingan Umat Islam 53
Grafik 50 Sikap terkait Toleransi Antarumat Beragama 55
Grafik 51 Sikap terkait Aliran Sesat dan Pendirian Rumah Ibadah 57

KATA PENGANTAR

Indonesia dikenal sebagai negara-bangsa yang majemuk dan berbeda-beda. Kita memiliki demikian banyak suku, agama, ras, budaya, bahasa, dan latar belakang. Pemahaman, komitmen, sikap dan perilaku yang toleran terhadap keragaman merupakan kunci penting untuk menguatkan persatuan dan kesatuan, serta mencegah perpecahan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia. Demikian penting, sehingga toleransi harus ditanamkan sejak dini supaya bisa menerima perbedaan dan kemajemukan yang ada.

Semua pihak, dari unsur masyarakat sipil, sektor privat, dan negara, harus terlibat aktif dalam proses warga negara agar menjadi paham dan bertindak toleran. Kita semua harus mengupayakan tumbuh dan menguatnya ruang-ruang publik yang dihargai, baik yang terkait dengan hak sipil-politik maupun hak ekonomi-sosial-budaya. Negara mengeluarkan regulasi yang kuat, memastikan jaminan hak-hak asasi manusia, dan memfasilitasi ruang-ruang kebebasan beragama dan lain sebagainya. Sektor privat menjadi pendukung dan pelaksana kebebasan tersebut. Dan masyarakat sipil memastikan semua warga negara bergandeng tangan, dan mencegah kelompok-kelompok intoleran muncul dan menguat.

Sektor masyarakat sipil yang harus menjadi perhatian adalah orang muda. Mereka adalah generasi yang akan menyebar di sebagian besar lokasi pengambilan kebijakan, lembaga-lembaga pendidikan, mengisi sebagian besar bursa kerja, dan menjadi tokoh-tokoh agama dan kemasyarakatan. Masa depan bangsa dan negara ada di sebagian besar orang muda. Oleh karena itu, kita semua harus mendorong dan memastikan mereka menjadi generasi yang toleran. Jangan sampai diambil oleh paham dan gerakan ekstrimisme berkekerasan.

Pada tahun 2016 dan 2020, INFID dan Jaringan Gusdurian sudah melakukan survei yang menyasar generasi muda. Pada 2016, hasil survei menunjukkan penolakan kuat terhadap tindakan kekerasan bermotif agama. Meski begitu terdapat pula kecenderungan intoleransi terhadap

kelompok keyakinan minoritas-non *mainstream* yang dianggap sesat (INFID, 2016). Pada survei 2019 di kalangan Generasi Z dan Milenial, hasilnya menunjukkan pergeseran positif terkait sikap dan pandangan generasi muda terhadap intoleransi dan ekstremisme berbasis agama. Sebanyak 93% responden menunjukkan sikap toleran, 97% menunjukkan dukungan terhadap nasionalisme, dan 97% mengaku bangga menjadi warga negara Indonesia (INFID, 2020).

Setelah 2 tahun survei, INFID ingin memperoleh data termutakhir terkait sikap warga tentang toleransi, kebhinekaan dan kebebasan beragama, pada kelompok berusia 18-24 tahun (Generasi Z) dan 25-40 tahun (Generasi Milenial). Oleh karena itu, di akhir tahun 2021 INFID bekerjasama dengan Lembaga Demografi Universitas Indonesia (LD UI) menyelenggarakan survei kembali.

Survei ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode pengumpulan data berupa survei dengan kuesioner terhadap warga negara Indonesia di 18 provinsi, yang mencakup 36 Kabupaten/Kota dengan total 1200 responden. Pemilihan provinsi merujuk pada 10 provinsi dengan peristiwa pelanggaran Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (KBB) terbanyak di tahun 2020 berdasarkan Laporan Setara Institute "Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan Di Indonesia Tahun 2020 (April, 2021)". Selain itu, 10 provinsi penelitian juga merupakan wilayah yang banyak mengalami konflik dan sebagai provinsi dengan kelompok Muslim sebagai minoritas. Pelaksanaan survei berlangsung pada bulan Juli-Oktober 2021. Proses survei ini telah melalui tahap panjang dan turut melibatkan berbagai pihak di dalamnya, mulai dari perwakilan akademisi, perwakilan CSO, dan juga kementerian/lembaga.

Secara umum survei ini menemukan bahwa sebagian besar responden dari Generasi Z dan Milenial memiliki sikap positif atau mendukung inklusivitas: 1) Mayoritas responden merasa bisa berhubungan baik dengan warga yang berbeda agama dalam lingkungan pendidikan maupun pekerjaan (*Millennial 96%, Gen Z 97%*), 2) Mereka merasa nyaman untuk berhubungan dan berteman dengan orang yang berbeda agama (*Millennial 78%, Gen Z 82%*), 3) Kebanyakan responden tidak setuju pemberlakuan pemisahan tempat tinggal berdasarkan kelompok agama (*Millennial 82%, Gen Z 84%*), dan 4) Mayoritas responden (89%) melaporkan

tidak ada perumahan yang melakukan pemisahan berdasarkan agama penghuninya di daerah mereka. Namun demikian, ketika dibatasi dalam ranah beragama yang lebih khusus, ditemukan masih banyak responden yang bersifat eksklusif dalam beragama dan berinteraksi dengan orang-orang yang berpaham keagamaan yang lain. Oleh karena itu, kita tetap perlu mewaspadai dan juga menyiapkan serta menguatkan ruang-ruang untuk mendorong semakin banyak generasi Milenial dan generasi Z bersikap inklusif dan dapat berperan aktif mewujudkan inklusivitas dalam masyarakat.

Diharapkan hasil survei dapat mendorong kebijakan dan program pemerintah untuk memperkuat toleransi orang muda, mendorong inspirasi berbagai organisasi kemasyarakatan dan keagamaan untuk lebih aktif mencegah tindakan destruktif dan intoleran dari pihak-pihak dalam masyarakat, menguatkan lembaga-lembaga pendidikan untuk mencegah penyebaran dan rekruitmen kelompok-kelompok ekstrim, dan mendorong sektor privat turut serta dalam upaya penguatan masyarakat sipil yang damai dan berdaya.

INFID menyampaikan apresiasi kepada tim peneliti dari Lembaga Demografi Universitas Indonesia (LD UI), Alfindra Primaldhi Dahlan, Sahat Khrisfianus Panggabean, dan Paksi C.K. Walandouw. Ucapan terima kasih juga kepada seluruh pihak yang telah bersedia terlibat dalam survei ini.

Selamat membaca.

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

"Tantangan atau krisis akbar yang menggedor pintu umat manusia adalah ketakutan dan intoleransi." (Satyarthi & Yousafzai, 2014). Begitu Kailash Satyarthi menyatakan. Pernyataan pemenang Hadiah Nobel Perdamaian 2014 ini menjadi peringatan penting untuk dunia, juga untuk Indonesia. Ketakutan membuat orang tetap fokus pada masa lalu dan khawatir tentang masa depan, sehingga mereka tidak bisa bergerak maju.

Intoleransi membutakan dan menghasilkan kebencian, bahkan perang. Perang antarkelompok berbeda, agama atau suku misalnya, bukan disebabkan karena fakta bahwa ada lebih dari satu kelompok, tetapi karena semangat intoleransi yang penyebarannya bisa jadi seperti gerhana total akal manusia. Ketakutan dan intoleransi menyulitkan orang mendapatkan pemahaman memadai.

Secara sederhana, toleransi adalah kemampuan manusia untuk menerima perbedaan di antara manusia. Perbedaan itu mencakup perbedaan jenis kelamin, agama, warna kulit, ras, etnis, dan lain-lain. Pada gagasan toleransi, tercakup ide menghargai orang lain yang berbeda. Toleransi penting bagi seseorang untuk menghormati orang lain yang berbeda norma budaya dan demi masyarakat yang damai. Secara khusus, toleransi adalah cara berpikir, perasaan, tingkah laku, dan kinerja yang memberi masyarakat harmoni dalam individualitas para anggotanya, menghormati orang-orang yang berbeda. Toleransi juga mencakup kebijaksanaan untuk membedakan nilai-nilai kemanusiaan dan keberanian untuk bertindak atas dasar nilai-nilai itu (Peterson, 2003).

Di sisi lain, intoleransi dalam masyarakat mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia, agresi atau konflik (UNESCO, 1995). Intoleransi hasil dari ketidaksadaran dan ketakutan; ketakutan akan hal yang tidak dikenal, terhadap budaya lain, bangsa, agama, dan sebagainya. Intoleransi juga terkait erat dengan rasa harga diri dan kesenangan berlebihan, pribadi, nasional, maupun agama. Usaha mendorong nilai-nilai toleransi dan mencegah intoleransi menjadi agenda bangsa Indonesia yang penting

sekaligus mendesak. Tanpa pengelolaan yang tepat, bangsa yang dianugerahi kekayaan sumber daya alam berupa ragam suku, agama, ras, dan anggota golongan yang dimiliki penduduknya, justru dapat menjadi bahan baku konflik yang menimbulkan perpecahan dan kerugian banyak pihak.

Sikap dan perilaku toleransi terhadap keberagaman masyarakat merupakan kunci meningkatkan persatuan dan kesatuan, serta mencegah perpecahan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Usaha-usaha menjalankan dan mengembangnya hanya bisa terwujud jika ditopang oleh nilai dan praktik toleransi yang ditunjukkan setiap individu warga Indonesia terhadap keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan antargolongan.

Saat ini, kehidupan yang toleran atas keberagaman dan kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia masih jauh dari yang diharapkan. Pada 2020, kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) di Indonesia masih tinggi. Laporan SETARA Institute tentang Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (KBB) di Indonesia di era pandemi ini menyebut sebanyak 180 peristiwa dengan 422 tindakan pelanggaran KBB terjadi sepanjang 2020. Aktor pelanggaran terbanyak berasal dari negara (238 tindakan), disusul aktor non-negara (184 tindakan) dengan Jawa Barat sebagai provinsi terbanyak terjadinya peristiwa pelanggaran (39 peristiwa) (Setara Institute, 2021).

Dalam sepuluh tahun terakhir, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mencatat jumlah kasus pelanggaran rata-rata melewati angka 100 setiap tahunnya. YLBHI mencatat 38 kasus terjadi selama lima bulan terakhir. YLBHI menilai pemerintah perlu memberikan perhatian serius terkait hal tersebut (VOA Indonesia, 2020).

Survei-survei persepsi oleh sejumlah lembaga seperti INFID, PPIM, CSIS, dan Alvara dengan responden umum maupun khusus seperti generasi muda menunjukkan pula modal dan tantangan dalam mengembangkan toleransi di Indonesia (CSIS, 2017; Wahid Foundation, 2018; Ali dkk., 2019). Penelitian INFID yang menyasar generasi muda pada 2016 menunjukkan penolakan kuat terhadap tindakan kekerasan bermotif agama. Meski begitu terdapat pula kecenderungan intoleransi terhadap kelompok keyakinanminoritas-non *mainstream* yang dianggap sesat (INFID, 2016).

Temuan ini sejalan dengan hasil Survei Sikap Keberagamaan Siswa dan Mahasiswa Muslim di Indonesia yang dilakukan PPIM pada 2017. Survei menunjukkan adanya penguatan paham radikalisme dan intoleransi di kalangan siswa (Gen Z). Meskipun dari sisi sikap toleran dan moderat, namun sebagian besar mereka memiliki opini intoleran/sangat intoleran dan radikal/ sangat radikal (PPIM UIN Jakarta, 2018).

Dibanding hasil survei 2016, survei INFID dan Jaringan GUSDURian 2020 di kalangan Generasi Z dan Milenial menunjukkan pergeseran positif terkait sikap dan pandangan generasi muda terhadap intoleransi dan ekstremisme berbasis agama. Sebanyak 93% responden menunjukkan sikap toleransi, 97% menunjukkan dukungan terhadap nasionalisme, dan 97% mengaku bangga menjadi warga negara Indonesia (INFID, 2020).

Sejauh ini, belum tersedia data termutakhir terkait sikap warga tentang toleransi, kebinekaan dan kebebasan beragama, pada kelompok berusia 18-24 tahun (Generasi Z) dan 25-40 tahun (Generasi Milenial). Survei ini dimaksudkan sebagai upaya mendapatkan data terbaru dan dapat dipercaya terkait sikap dan pandangan warga Indonesia yang masuk dalam kelompok Generasi Z dan Generasi Milenial terhadap toleransi, kebinekaan dan kebebasan beragama. Di masa depan, generasi ini akan menentukan corak dan wajah kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia.

Hasil survei ini memiliki nilai penting setidaknya karena tiga hal. *Pertama*, tersedianya hasil survei berskala nasional tentang tren toleransi dan kebebasan beragama di kalangan Generasi Z dan Milenial. *Kedua*, tersedia basis data bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan penguatan toleransi dan kebebasan beragama di kalangan Generasi Z dan Milenial. *Ketiga*, basis data bagi organisasi masyarakat dalam memperkuat program-program toleransi penguatan toleransi dan kebebasan beragama di kalangan Generasi Z dan Milenial.

1.2. Tujuan

1. Mendapatkan data termutakhir mengenai sikap warga tentang toleransi, kebinekaan dan kebebasan beragama di Indonesia.
2. Mendapatkan analisis dan pendalaman mengenai sikap warga tentangtoleransi, kebinekaan dan kebebasan beragama di Indonesia.

3. Mendapatkan rekomendasi kebijakan dan program kepada pemerintah dan masyarakat sipil untuk memperkuat toleransi warga terhadap kebinekaan dan kebebasan beragama di Indonesia.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apa sikap warga negara Indonesia yang berusia 18-24 tahun (Generasi Z) dan 25-40 tahun (Generasi Milenial) terhadap toleransi, kebinekaan dan kebebasan beragama di Indonesia?
2. Apa yang dapat dipahami dari sikap warga negara Indonesia berusia 18-24 tahun (Generasi Z) dan 25-40 tahun (Generasi Milenial) terhadap toleransi, kebinekaan, dan kebebasan beragama di Indonesia dalam kaitannya dengan kehidupan bersama di Indonesia?
3. Rekomendasi kebijakan dan program apa yang dapat diajukan kepada pemerintah dan masyarakat sipil untuk memperkuat toleransi warga terhadap kebinekaan dan kebebasan beragama di Indonesia?

BAB 2
KERANGKA KONSEPTUAL, METODE PENELITIAN DAN PROFIL RESPONDEN

2.1. Kerangka Konseptual

2.1.1 Toleransi

Toleransi sangat penting membentuk kesatuan dan harmoni, mempertemukan keberagaman dalam tatanan sosial, serta menjadi perlindungan penting dari penyebaran ekstremisme yang korosif (Peterson 2003). Toleransi terhadap keragaman salah satu elemen dasar yang diperlukan untuk membangun republik seperti Indonesia.

Dalam penelitian ini, toleransi didefinisikan sebagai meleluasakan, mengizinkan, atau menerima suatu tindakan, ide, objek, atau orang yang tidak disukai atau tidak disetujui oleh seseorang. Ini mencakup pengertian toleransi sebagai seperangkat praktik sosial atau politik, dan toleransi sebagai seperangkat sikap (Murphy, 1997). Dalam arti sikap, toleransi didefinisikan sebagai sikap yang adil, objektif, dan permisif pada diri seseorang terhadap pendapat, keyakinan, praktik, asal usul ras atau etnis, dan lain-lain, yang berbeda dari miliknya sendiri. Secara inheren konsep toleransi ini mengandung juga gagasan tentang alteritas, keadaan keberbedaan (Van Doom, 2014), dan bagaimana menanggapi "yang lain", termasuk menanggapi "yang tidak baik" dan yang "semestinya diatasi atau ditangani".

Toleransi mengasumsikan konflik terhadap sesuatu yang penting dan tidak dapat diselesaikan melalui negosiasi normal, serta tanpa menggunakan perang atau kekerasan. Pertanyaan yang hendak dijawab dengan toleransi adalah "apa cara terbaik untuk hidup bersama, sebagai hal yang benar untuk dipikirkan dan dijalankan sehingga masyarakat dapat berjalan baik menuju keselamatan?" Dari pengalaman banyak negara, toleransi merupakan cara yang telah dipraktikkan dan berdampak baik bagi berjalan baiknya masyarakat menuju kedamaian dan keselamatan.

2.1.2. Toleransi Beragama

Salah satu jenis toleransi adalah toleransi beragama. Dalam penelitian ini, toleransi beragama didefinisikan sebagai kesabaran dan izin yang diberikan oleh penganut agama dominan untuk ada agama lain, meskipun yang terakhir dipandang dengan ketidaksetujuan sebagai inferior, keliru, atau berbahaya (Zagorin, 2003). Dilihat dari sejarah, ihwal toleransi ini sebagian besar terkait dengan insiden dan tulisan yang melibatkan status minoritas dan perbedaan pandangan terkait dengan agama negara yang dominan (Vahland, 2017) dan sangat terkait aspek sosiologis dan politik.

Toleransi beragama mengacu pada kemampuan orang untuk menghargai nilai-nilai spiritual, keyakinan dan praktik yang berbeda dari agamanya sendiri. Singkatnya, toleransi beragama adalah kesediaan orang yang membiarkan orang lain berpikir atau mengamalkan agama dan kepercayaan mereka yang lain dari agama dan kepercayaannya sendiri.

Toleransi beragama merupakan keharusan moral, karena intoleransi sangat buruk bagi karakter manusia. Agama adalah masalah iman dan kepercayaan, bukan bukti. Jika seseorang tidak menghormati kepercayaan orang lain, itu merugikan orang dan masyarakat karena kurangnya rasa hormat dan sikap merendahkan orang lain sebagai manusia. Ketika keyakinan agama dipasangkan dengan intoleransi beragama dan orang-orang yang mau bertindak berdasarkan intoleransi itu, keyakinan agama bisa berubah menjadi kekerasan, kematian, dan kehancuran.

Intoleransi beragama di sini didefinisikan sebagai ketidakmauan meleluasakan atau membiarkan keyakinan atau praktik agama orang lain. Dalam intoleransi beragama, terkandung juga pengertian pemaksaan cara beragama kepada orang lain, dan itu bertentangan dengan kebebasan beragama.

2.1.3. Menghargai Kebinekaan

Kebinekaan atau keanekaragaman atau sering disebut dengan multikultural di sini digunakan untuk menjelaskan pandangan seseorang tentang ragam kehidupan di dunia, ataupun kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap adanya keragaman, dan

berbagai macam budaya. Menghargai kebinekaan berarti menghargai keberagaman yang ada di masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, kebinekaan berarti mengarah kepada banyaknya perbedaan yang ada dalam kehidupan masing-masing warga sebagai individu maupun kelompok. Kebinekaan di sini lebih tertuju pada nilai nasional, yaitu beraneka ragamnya unsur yang ada di masyarakat Indonesia, mencakup suku bangsa, ras, agama, budaya, bahasa, dan lain-lain. Itu semua tercakup dalam negara Indonesia yang membentuk persatuan dan kesatuan serta menghubungkan keanekaragaman itu. Menghargai kebinekaan Indonesia berarti menghargai keberagaman yang ada di masyarakat Indonesia.

2.1.4. Kebebasan Beragama

Kebebasan beragama merupakan hak dasar yang dimiliki setiap individu. Ini adalah hak yang sama dari semua orang dan semua komunitas agama untuk menjalankan agama secara bebas. Dalam pengertian luas, kebebasan beragama termasuk hak untuk percaya atau tidak percaya pada kebenaran agama meskipun di beberapa negara, seperti Indonesia, hak ini sering kali dipahami dalam batas kebebasan seseorang untuk menjalankan agama yang dianutnya. Dengan hak ini, orang yang percaya pada agama tertentu memiliki hak untuk mengatur hidupnya sesuai dengan kebenaran agamanya tanpa paksaan yang tidak semestinya dari manusia mana pun, terutama pemerintah, dan untuk mengatur atau menjalankannya bersama dengan komunitas lain.

Kebebasan beragama juga mencakup hak institusional, dalam arti kebebasan untuk membangun komunitas dan institusi sesuai dengan agama yang dianut. Karena itu, kebebasan beragama mencakup hak-hak rumah ibadah untuk eksis (masjid, gereja, kuil, dan rumah ibadah lain). Lebih jauh lagi, hak atas rumah ibadah ini tidak hanya dimaksudkan untuk eksis, melainkan juga untuk berkembang.

Kebebasan beragama mencakup hak individu dan komunitas untuk menciptakan dan menjalankan institusi keagamaan seperti rumah bagi orang miskin, orang lanjut usia, dan orang yang sekarat, juga fasilitas klinik medis dan rumah sakit, fasilitas pendidikan seperti sekolah dasar dan rumah ibadah ini tidak hanya dimaksudkan untuk eksis,

melainkan juga untuk berkembang.

Kebebasan beragama mencakup hak individu dan komunitas untuk menciptakan dan menjalankan institusi keagamaan seperti rumah bagi orang miskin, orang lanjut usia, dan orang yang sekarat, juga fasilitas klinik medis dan rumah sakit, fasilitas pendidikan seperti sekolah dasar dan menengah, juga perguruan tinggi dan universitas. Lebih jauh lagi, hak ini mencakup juga hak untuk memberi layanan untuk imigran, dapur umum, lembaga adopsi dan pengasuhan anak, pusat rehabilitasi narkoba, dan sebagainya.

Hak menjalankan bisnis berbasis agama dan hak individu, lembaga, maupun masyarakat beragama untuk mengungkap kebenaran agama termasuk dalam hak kebebasan beragama Ini. berarti bisnis nirlaba harus tunduk pada peraturan pemerintah dan nilai-nilai hak asasi manusia dan dasar dalam mengatasi konflik terkait hak pelanggan dan pemilik bisnis berbasis agama. Sementara itu, hak mengungkap kebenaran agama mengandaikan bahwa setiap individu berhak mengungkap kebenaran agama dan membawa kebenaran tersebut ke dalam kehidupan politik melalui klaim tertentu seperti keadilan, perdamaian, kesetaraan, kebebasan, pencarian keadilan, dan kesepakatan sesama warga negara atas dasar kesetaraan bagi semua orang dalam masyarakat.

Kebebasan beragama hak yang luas, tapi juga terbatas. Beberapa batasan tersebut antara lain kebebasan beragama tidak memberikan keleluasaan atau izin dan perlindungan apa pun terhadap perilaku dan pelaku kekerasan atau pemaksaan atas nama agama. Agama apa pun juga tidak dapat mencari monopoli melalui hukum. Dalam hal ini, hukum negara terus ada dan tetap berlaku. Dengan kata lain, hak kebebasan beragama tidak melampaui HAM, tidak dapat digunakan untuk melanggar hak asasi manusia.

2.2. Metode Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif yang bertujuan membuat deskripsi yang akurat, faktual, dan sistematis pada fakta tertentu. Penggunaan pendekatan kuantitatif dalam penelitian ini mencakup pengumpulan data dengan menggunakan instrumen pengukuran atau alat ukur yang kemudian dianalisis secara kuantitatif menggunakan analisis statistik.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan pembagian kuesioner kepada warga negara Indonesia. Sampling dilakukan dengan pendekatan sampling sistematis terhadap responden berusia antara 18 - 40 tahun. Metode sampling yang digunakan masuk ke dalam kategori sampling tidak acak (*non random sampling*) dan tidak bertujuan untuk mendapatkan gambaran representatif dari populasi masyarakat Indonesia. Metode survei digunakan untuk mendapatkan data tentang karakteristik dari sikap dan kecenderungan perilaku toleransi warga, serta sikap mereka terhadap kebinekaan dan kebebasan beragama warga negara Indonesia. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan kuesioner.

2.3. Ruang Lingkup dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di 18 provinsi mencakup 36 kota dengan total 1.200 responden. Pemilihan provinsi merujuk pada 10 provinsi utama berdasarkan laporan Setara Institute tentang Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2020 (April, 2021), wilayah yang pernah mengalami konflik, dan provinsi dengan kelompok Muslim sebagai minoritas.

Delapan belas provinsi terpilih mewakili 218 juta penduduk Indonesia atau 81% dari populasi berdasarkan sensus penduduk 2020 (BPS, 2020). Responden penelitian ini adalah masyarakat berusia 18-40 tahun. Dalam melakukan analisis, responden dibagi dalam kategori Generasi Z (berusia 18 – 24 tahun) dan Generasi Milenial (25 – 40 tahun). Total responden sebanyak 1.200 responden yang dibagi menjadi dua kluster: 429 responden (36%) berasal Generasi Z dan 771 (64%) berasal dari Generasi Milenial.

Pada dua kelompok kategori responden, perbandingan jenis kelamin mendekati 50:50, dan mayoritas beragama Islam. Pada kelompok Generasi Z, kebanyakan belum menikah, dengan tingkat Pendidikan SMA. Sementara kelompok Generasi Milenial, kebanyakan sudah menikah dengan tingkat Pendidikan Tinggi

Penelitian dilakukan Juli-Oktober 2021. Dalam rentang waktu itu dilakukan kegiatan persiapan, perumusan kerangka teoretis, metode, pembuatan instrumen penelitian, pengambilan data dan penulisan laporan.

2.4. Profil Responden

Responden dalam penelitian ini masyarakat berusia 18-40 tahun dari 18 provinsi. Jumlah terbanyak berasal dari Provinsi Jawa Barat (10%). Dilihat dari tingkat kabupaten/kota, kebanyakan responden berasal kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta, Kota Ambon, Manado, dan Palu.

Dalam melakukan analisis, responden dikelompokkan dalam dua kategori: Generasi Z (berusia 18-24 tahun) dan Generasi Milenial (25-40 tahun). Dari 1.200 responden, 429 responden (36%) merupakan kategori Generasi Z dan 771 responden (64%) termasuk Generasi Milenial. Responden Generasi Z rata-rata berusia 21 tahun, sedang Generasi Milenial rata-rata 33 tahun.

Pada dua kelompok kategori responden, perbandingan jenis kelamin hampir seimbang. Di kalangan responden Generasi Milenial, laki-laki sebanyak 51% dan perempuan 49%. Sementara itu, pada responden Generasi Z laki-laki sebanyak 48% dan perempuan 52%. Berdasarkan agama, mayoritas responden pada dua kategori beragama Islam (Generasi Milenial 84%, Generasi Z 80%). Kebanyakan responden dalam Generasi Z belum menikah (89%) dengan tingkat Pendidikan SMA (71%). Pada kelompok Milenial, kebanyakan sudah menikah (70%) dengan tingkat Pendidikan Tinggi (51%).

Grafik 1 Kategori responden berdasarkan provinsi

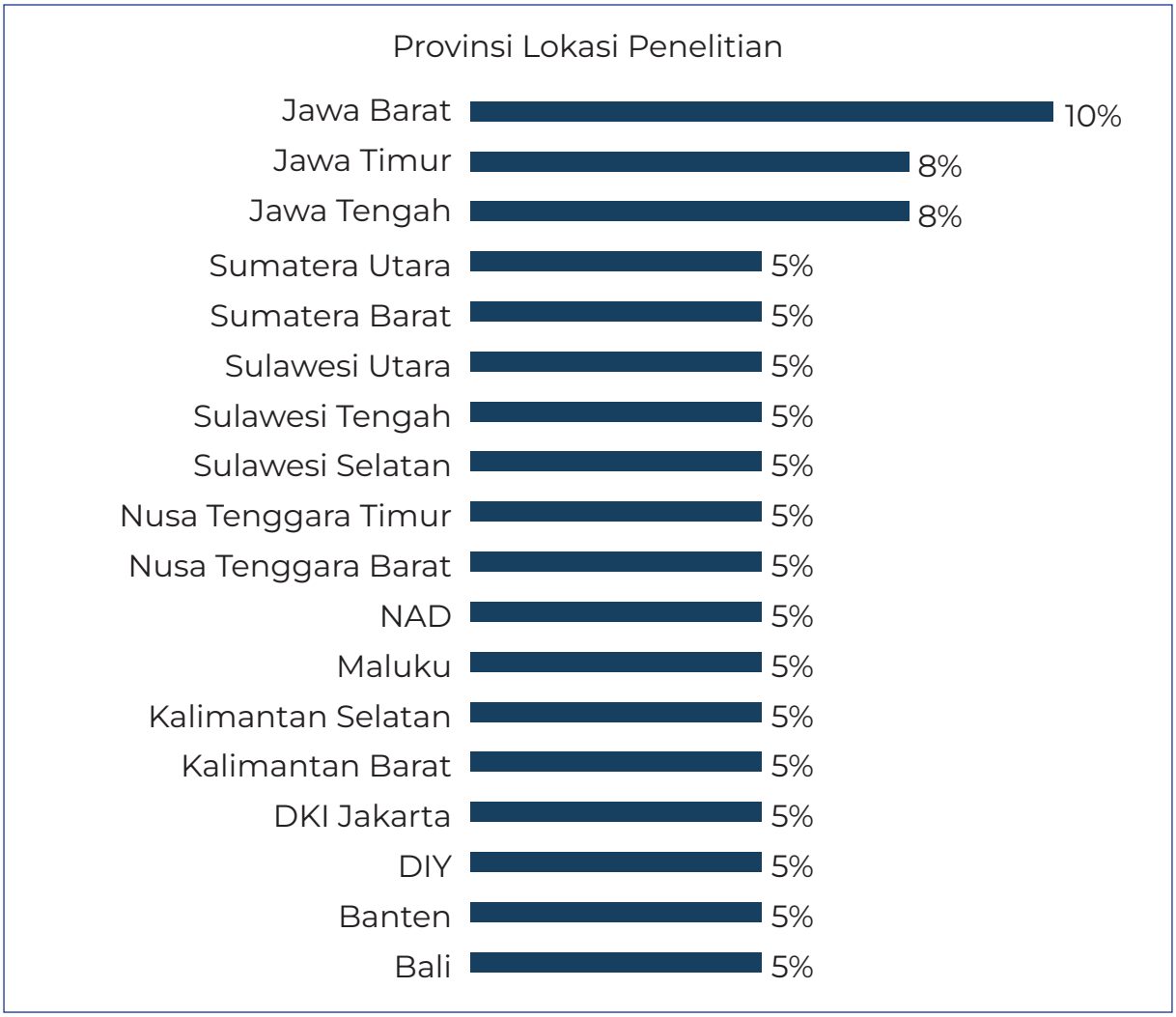

Grafik 2 Kategori responden berdasarkan kabupaten/kota

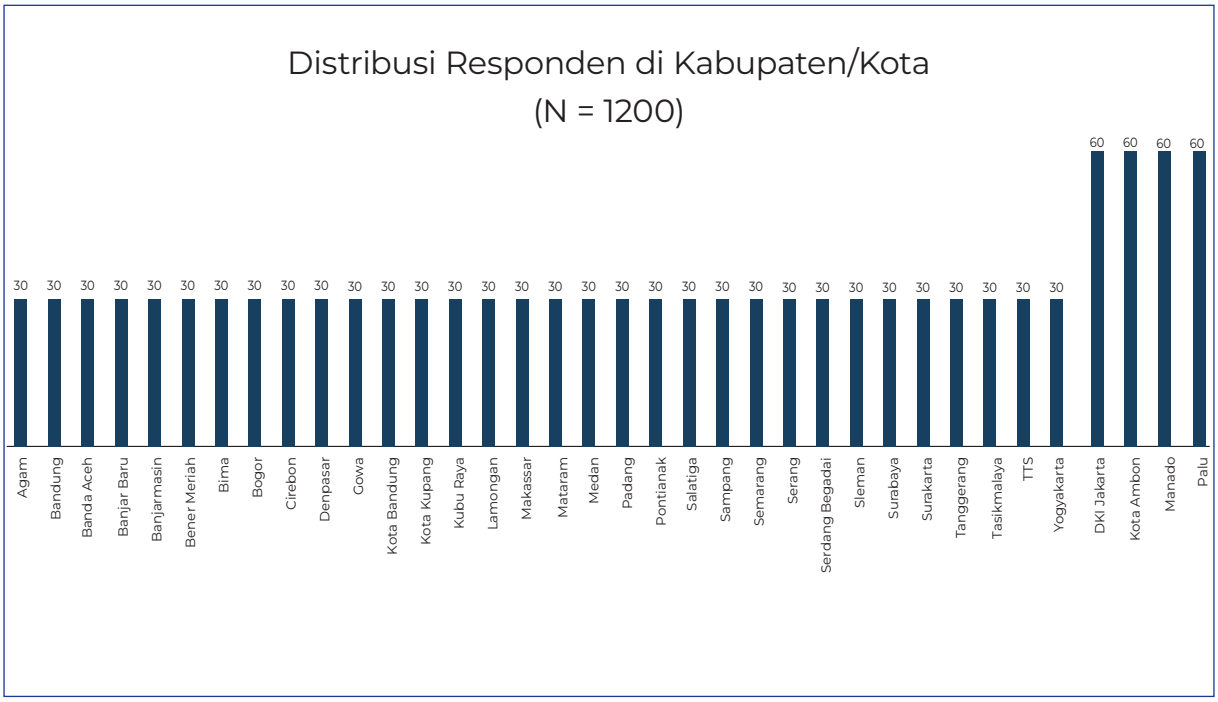

Grafik 3 Kategori responden berdasarkan jenis kelamin

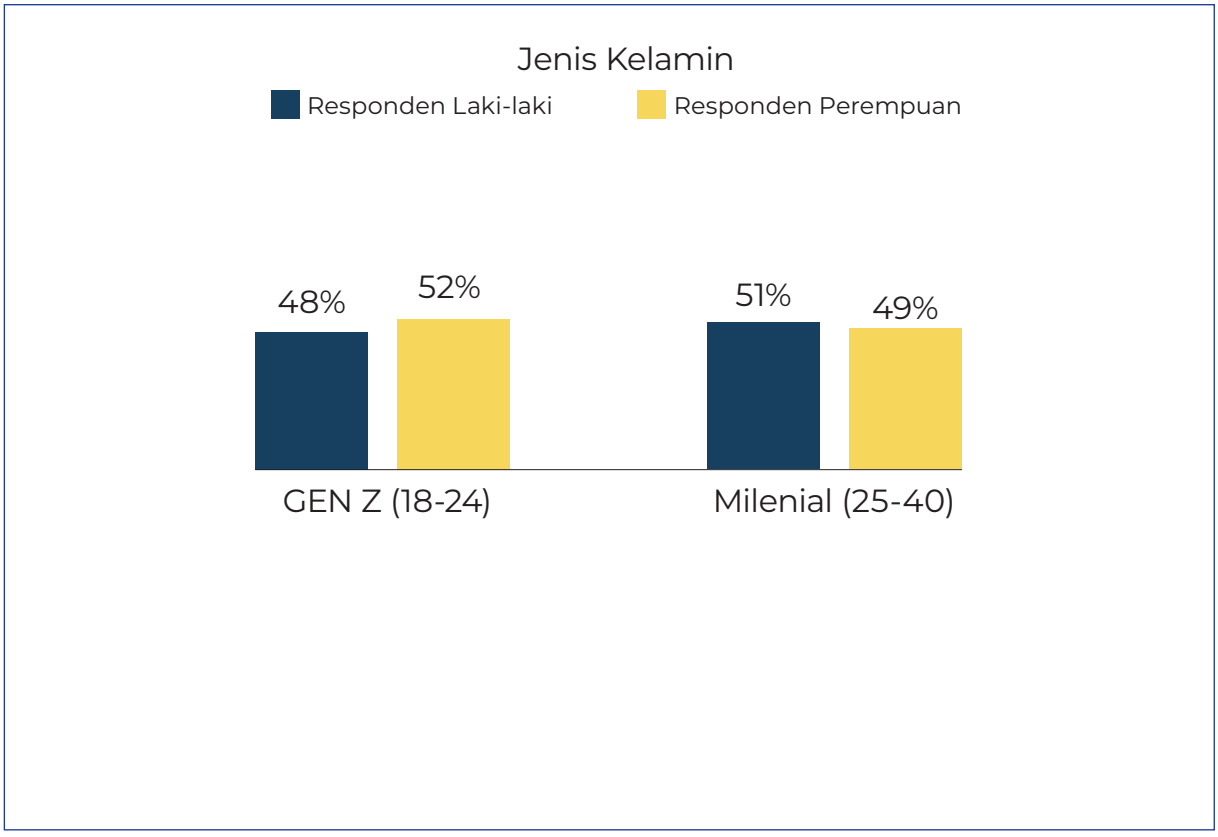

Grafik 4 Kategori responden berdasarkan usia

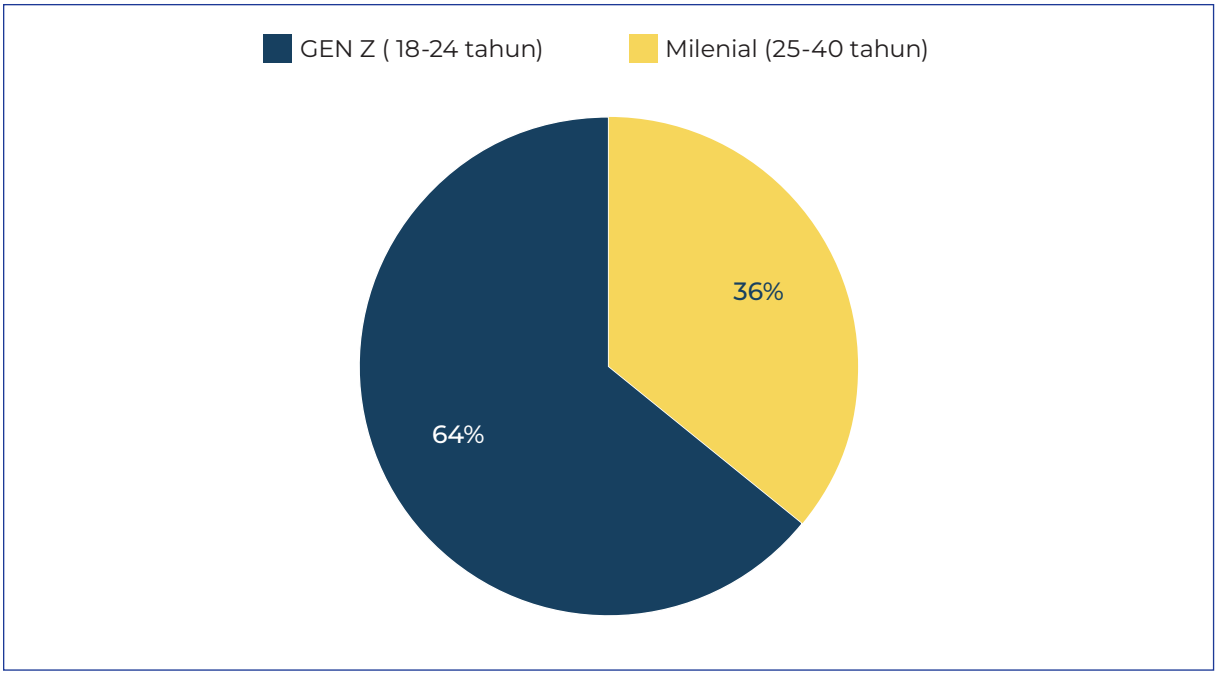

Grafik 5 Kategori responden berdasarkan usia

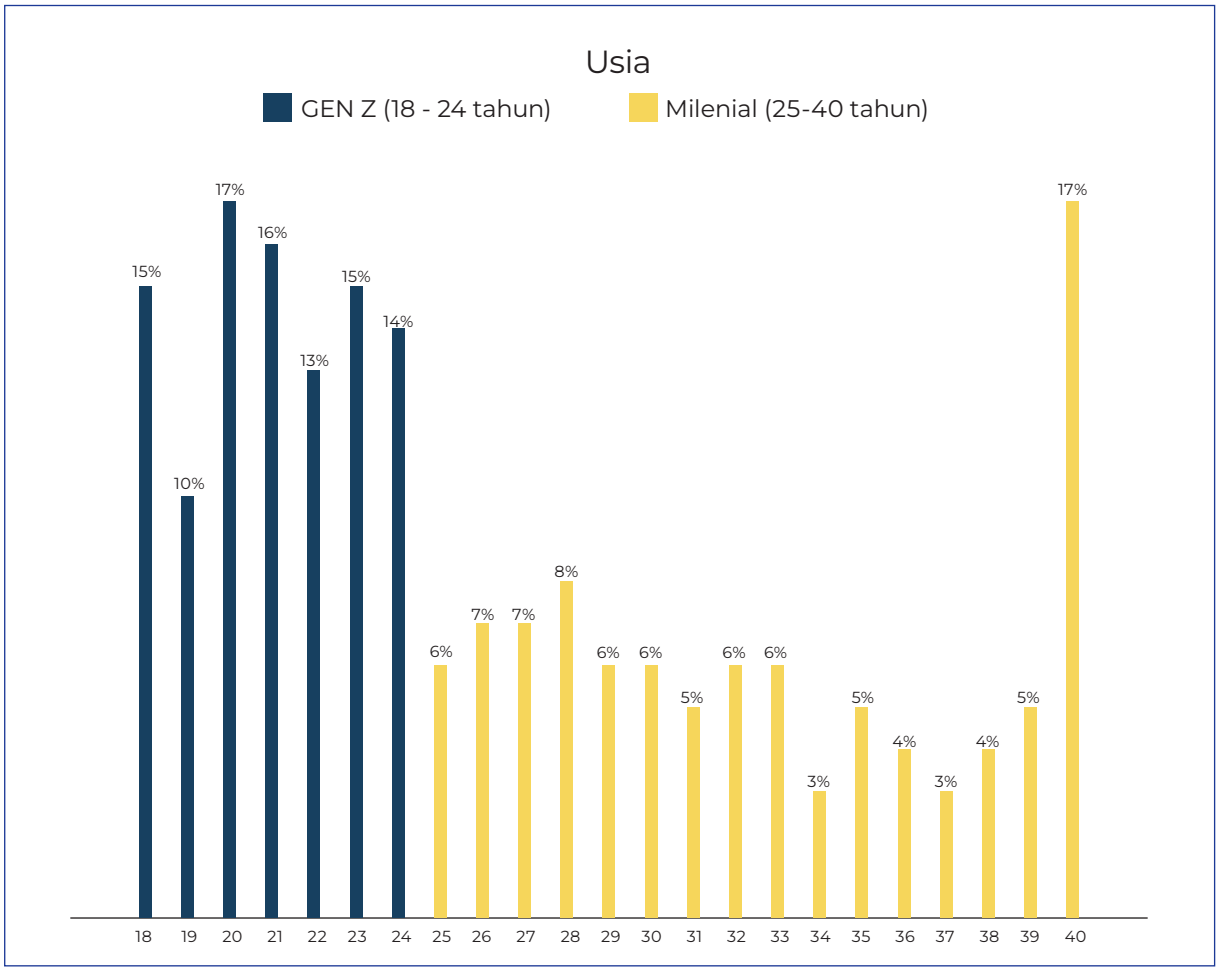

Grafik 6 Kategori responden berdasarkan status pernikahan

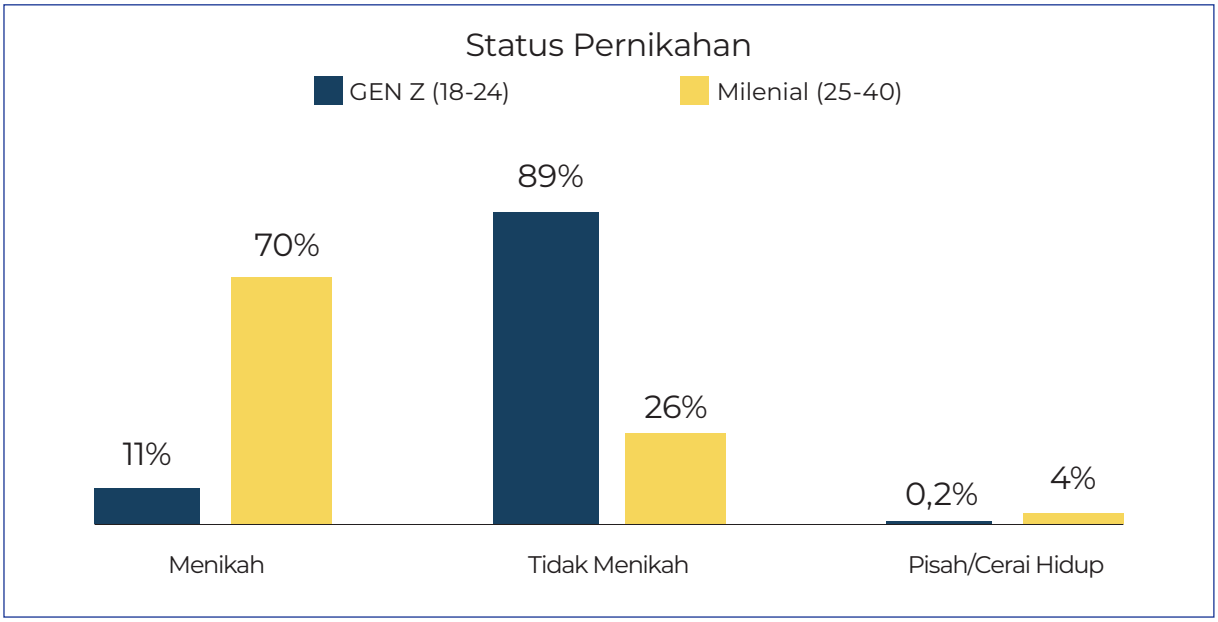

Grafik 7 Kategori responden berdasarkan tingkat pendidikan

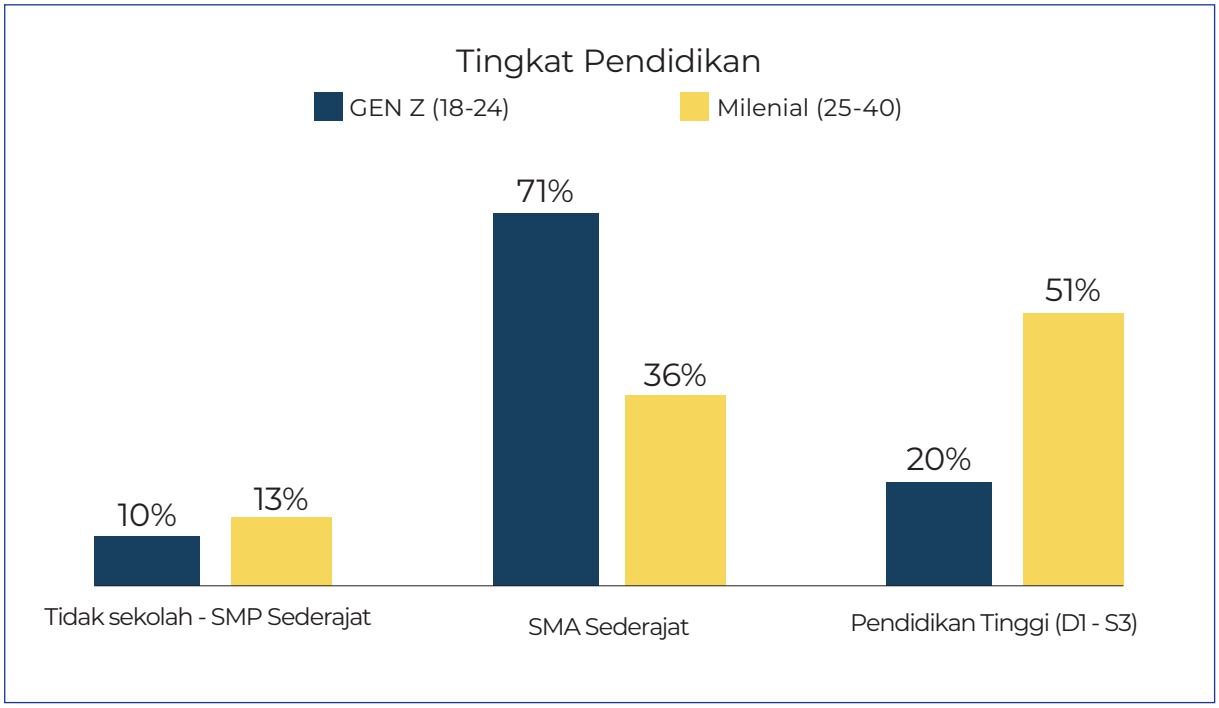

Grafik 8 Kategori responden berdasarkan agama

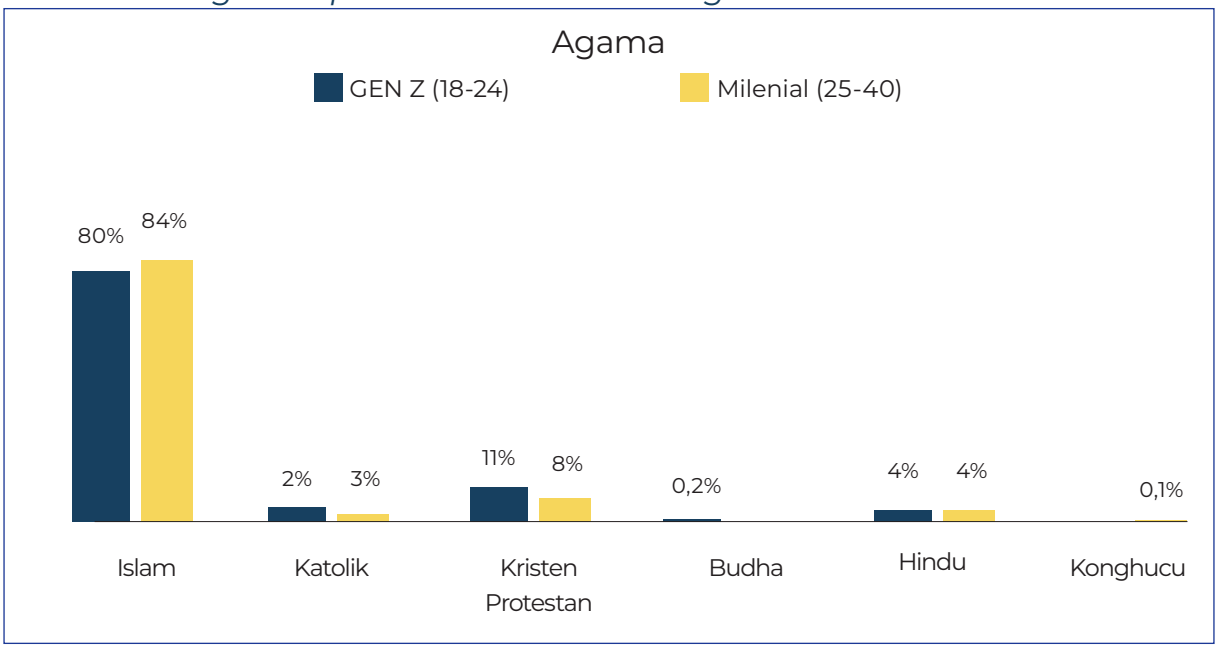

Tabel 1 Komposisi responden berdasarkan agama dan kategori usia

		GENERASI		Total
		Generasi Z (18-24 tahun)	Milenial (25-40 tahun)	
Agama	Islam	344	649	993
	Katolik	19	24	43
	Protestan	47	63	110
	Budha	1	0	1
	Hindu	18	34	52
	Konghucu	0	1	1
Total		429	771	1200

Grafik 9 Kategori responden berdasarkan pemasukan rumah tangga

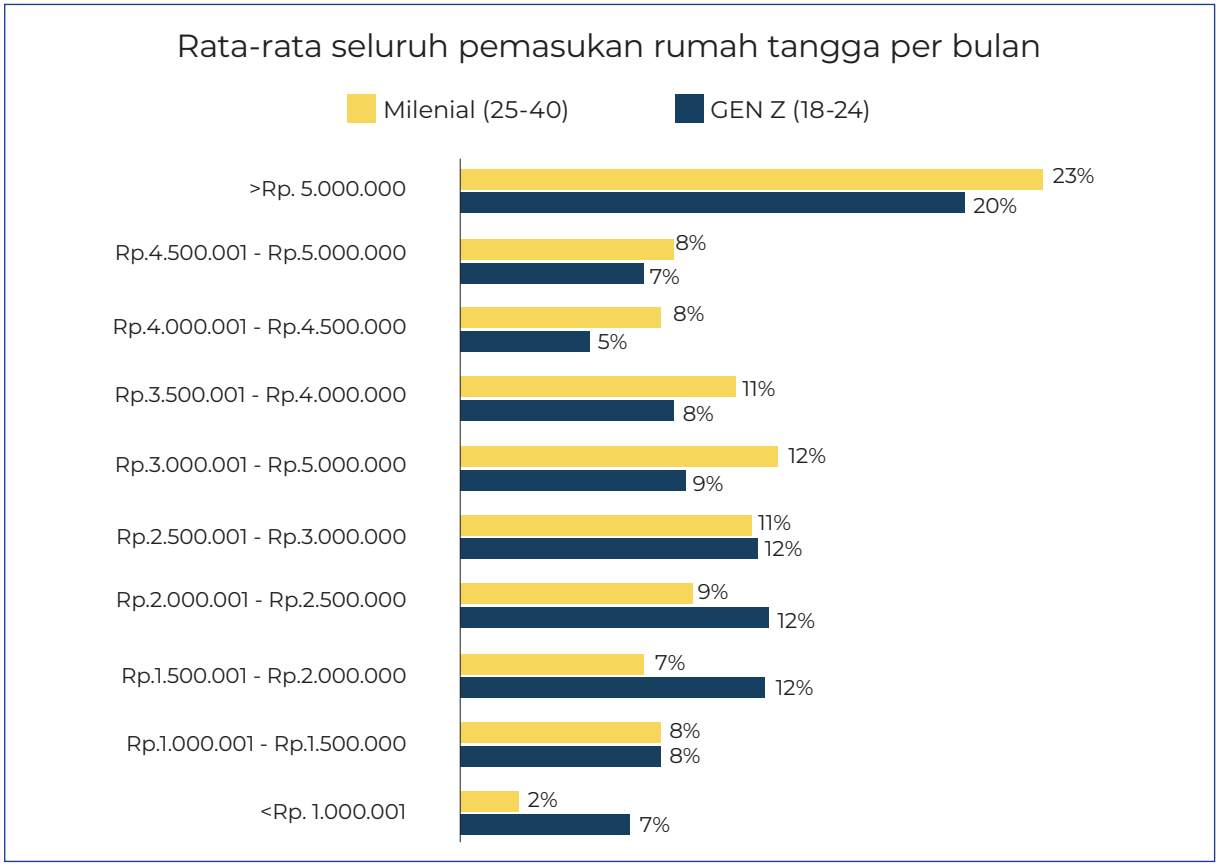

Responden penelitian ini kebanyakan berasal dari kategori rumah tangga dengan penghasilan di atas Rp 2.5 juta per bulan. Responden dari Generasi Milenial yang masuk kategori tersebut mencapai 73%, sedang Generasi Z mencapai 61%. Sementara itu mayoritas responden Generasi Z merupakan mahasiswa, yakni sebanyak 42%, sementara responden Milenial berprofesi sebagai karyawan swasta (24%).

Grafik 10 Kategori responden Generasi Z berdasarkan pekerjaan

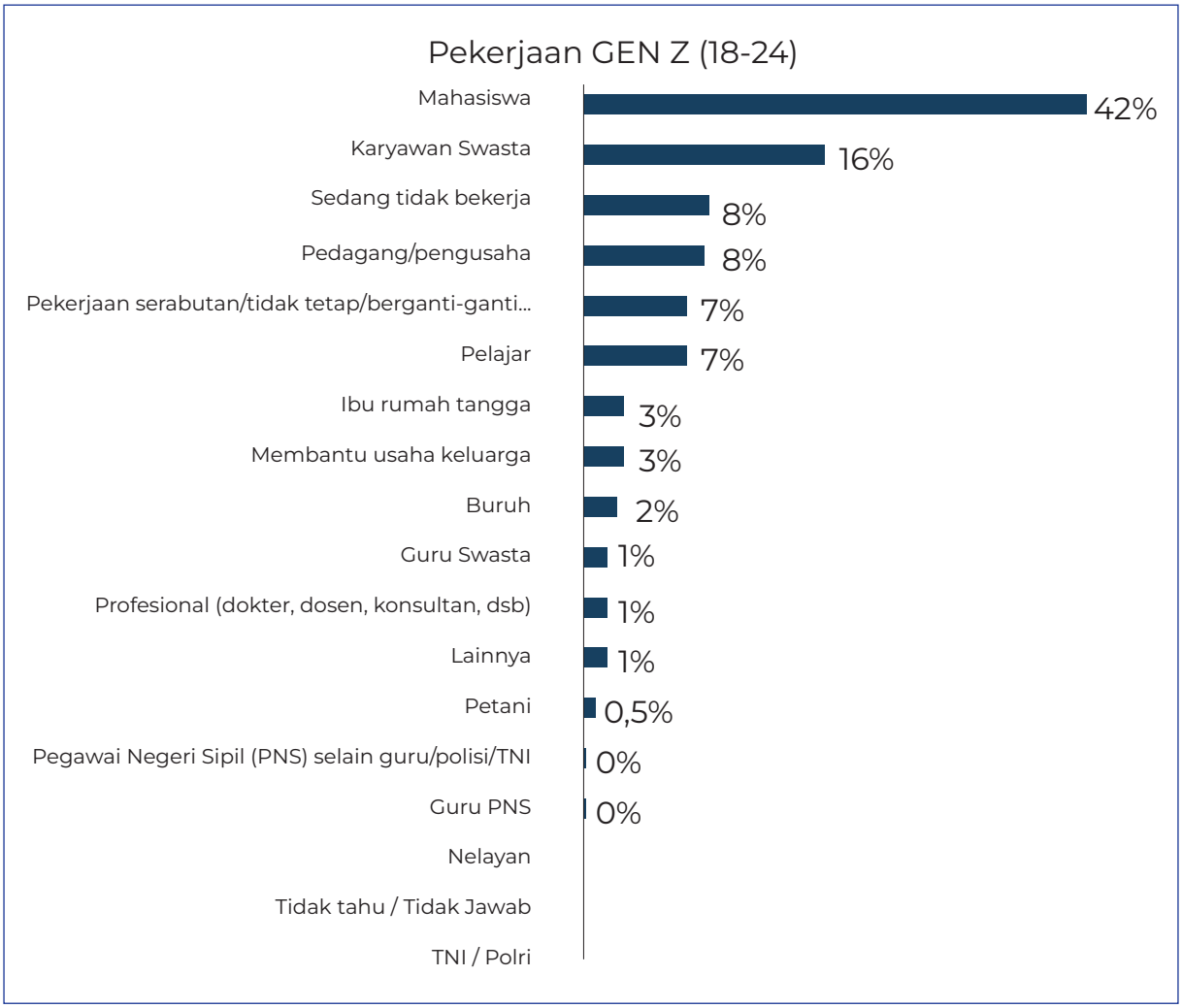

Grafik 11 Kategori responden Generasi Milenial berdasarkan pekerjaan

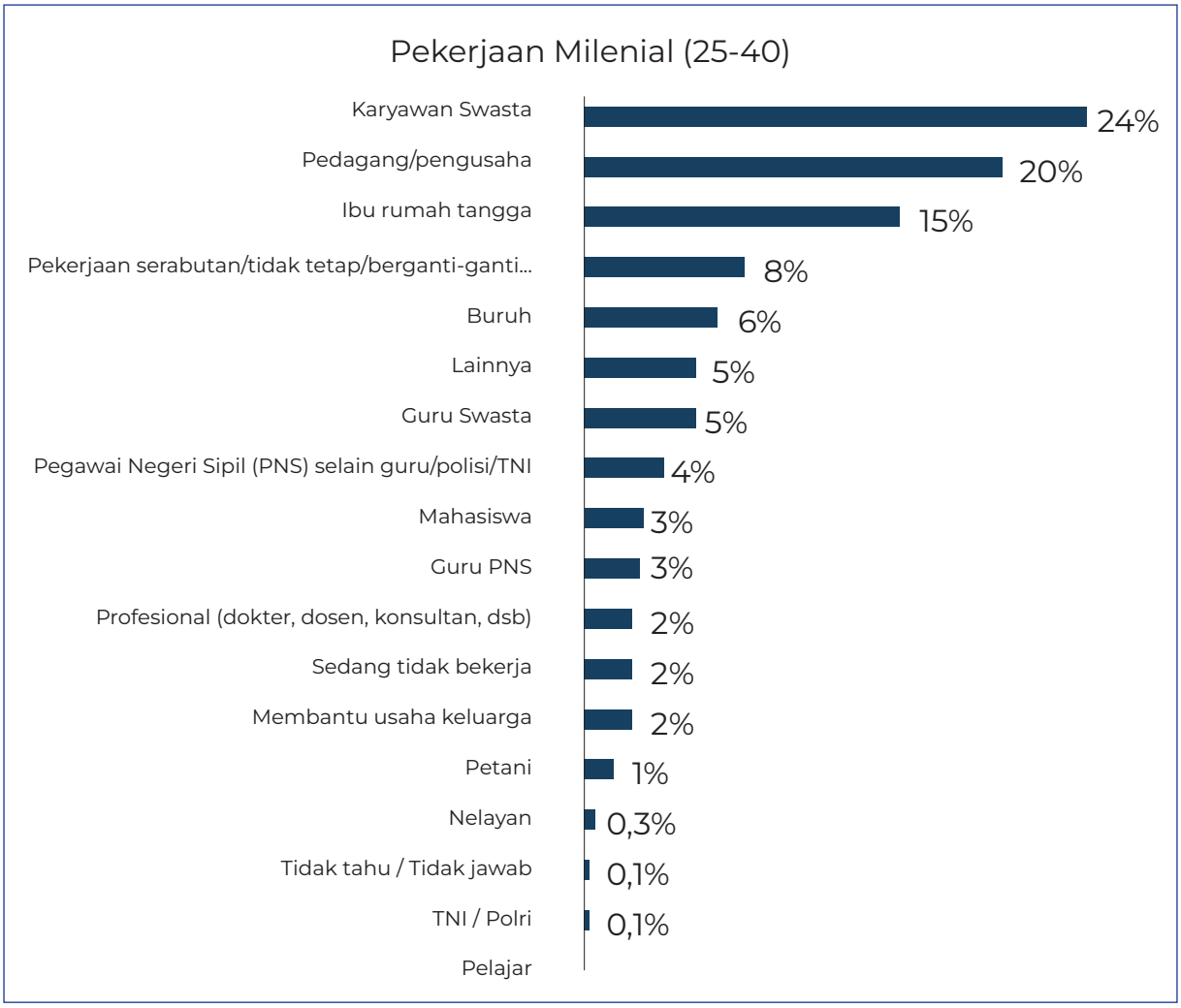

Secara keseluruhan, lebih dari sepertiga responden (38%) memiliki kerabat yang berbeda suku/kewarganegaraan dan 9% memiliki kerabat berbeda agama dari hasil pernikahan dalam keluarga.

Grafik 12 Pernikahan beda agama dalam keluarga responden

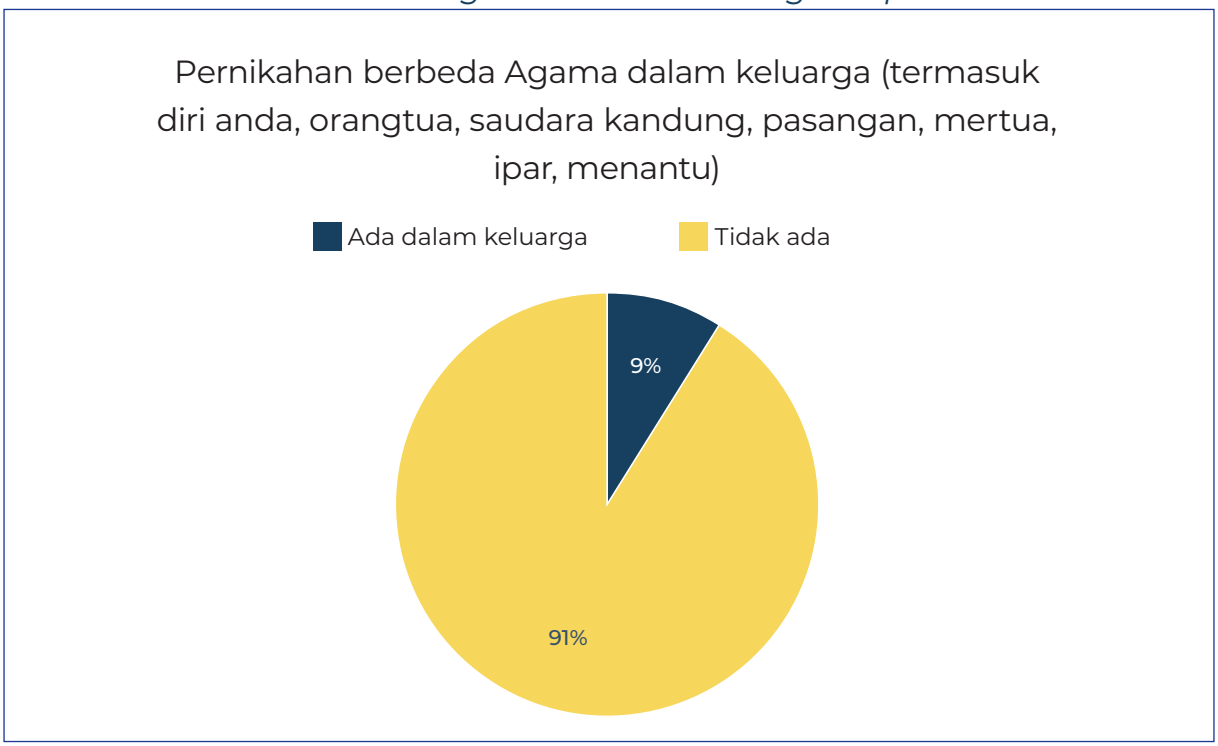

Grafik 13 Pernikahan beda suku/etnis atau beda negara dalam keluarga responden

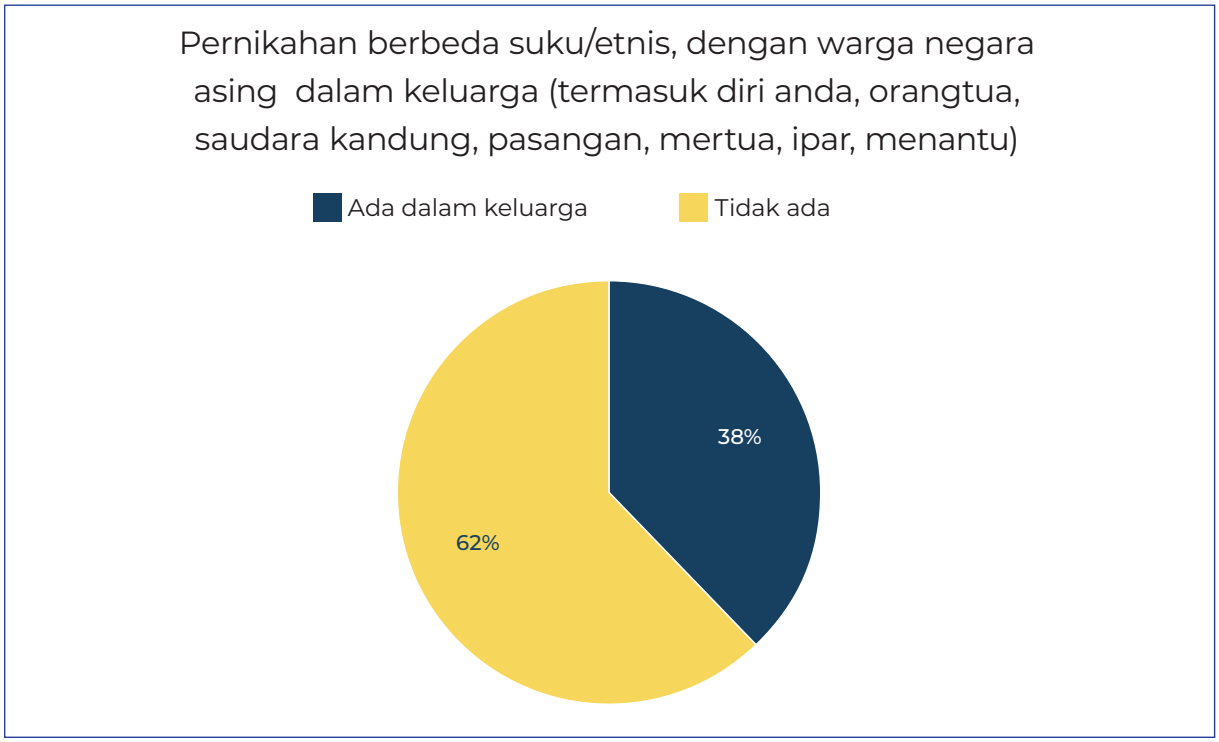

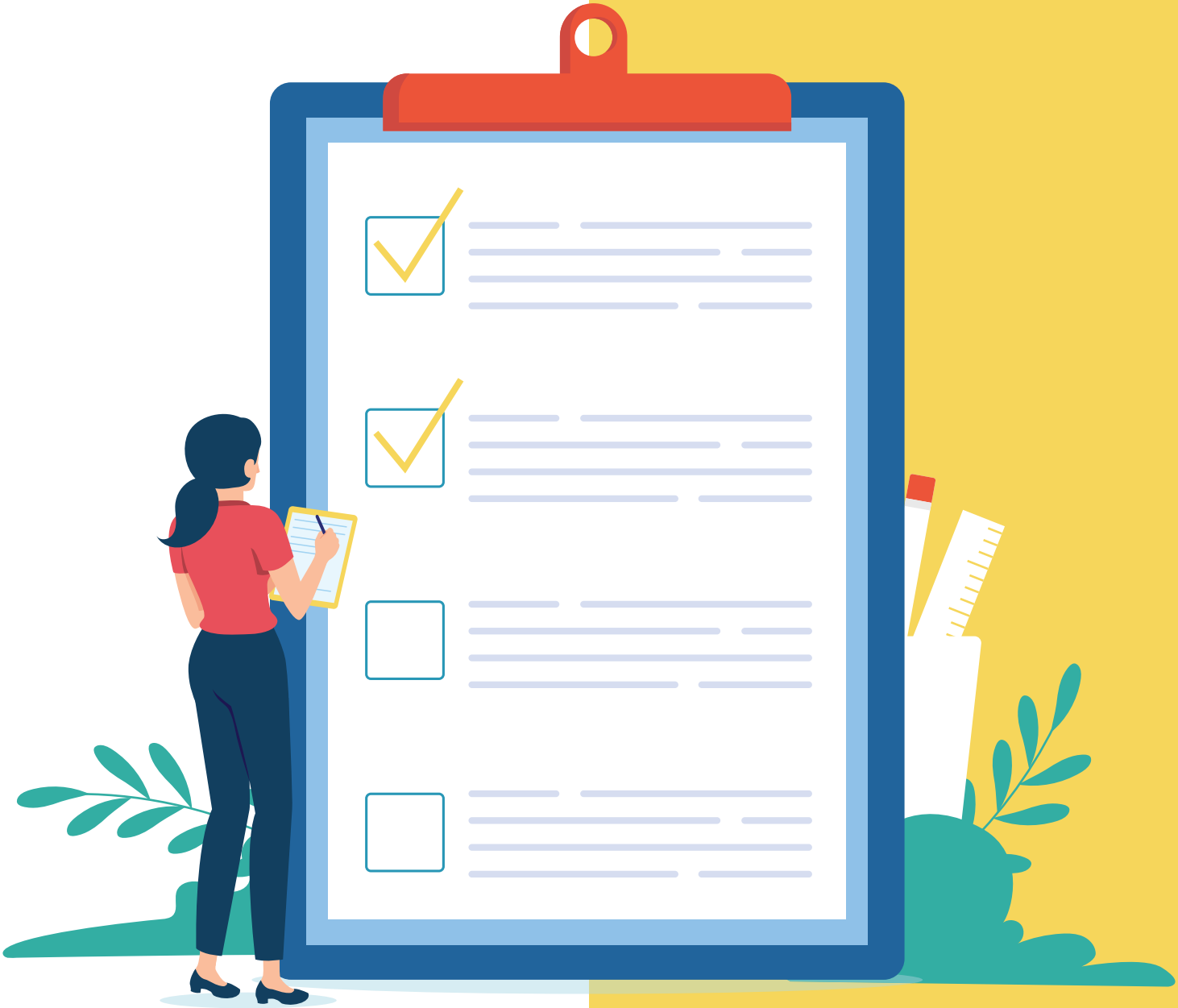

BAB 3
TEMUAN SURVEI

3.1. Eksklusivitas dalam Beragama

Survei ini menggali informasi mengenai kecenderungan eksklusivitas dalam beragama dan menanyakan pendapat responden mengenai sejumlah isu yang menggambarkan kecenderungan tersebut. Dalam pengolahan data, survei ini mengambil rentang jawaban agak setuju hingga sangat setuju. Hasilnya, mayoritas kedua kategori responden hanya mencari informasi terkait agama mereka sendiri (Generasi Z sebanyak 77%, Generasi Milenial sebanyak 81%) dan menilai kelompok agama mereka lebih baik dibanding kelompok agama lain (Generasi Z mencapai 62%, Generasi Milenial sebanyak 72%).

Temuan lain mengindikasikan bahwa lebih dari sepertiga menilai anggota kelompok agama mereka lebih dermawan dibanding anggota kelompok agama lain (Generasi Z sebanyak 37%, Generasi Milenial mencapai 38%). Survei ini juga menemukan lebih dari sepertiga responden dari dua kelompok generasi menilai penerapan prinsip agama mereka sebagai dasar negara akan membuat Indonesia menjadi lebih baik dengan proporsi yang lebih tinggi pada responden Gen Z (Generasi Z sebanyak 39%, Generasi Milenial sebanyak 34%).

Grafik 14 Kesetujuan dengan pernyataan eksklusif agama

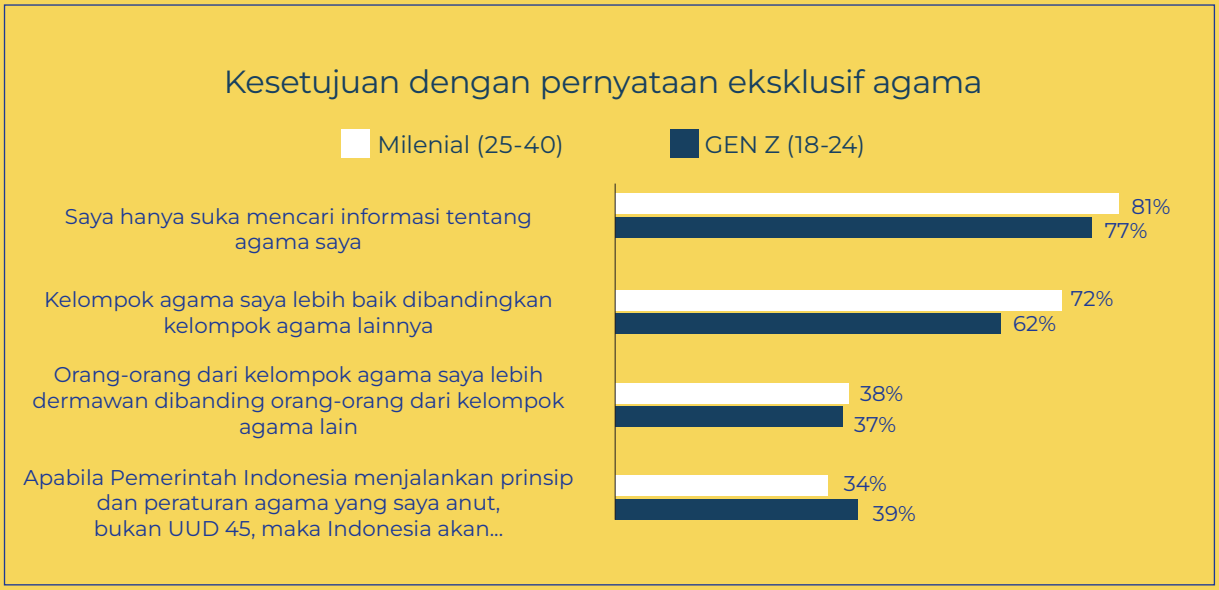

3.2. Sikap terhadap Inklusivitas

Sikap terhadap inklusivitas responden secara umum tergolong tinggi. Hampir semua responden Generasi Z (99%) dan Milenial (100%) setuju semua warga seharusnya mendapatkan kesempatan yang sama untuk bekerja dan memiliki hak yang sama di hadapan negara apa pun agama yang dianut (generasi Milenial sebanyak 98%, Generasi Z sebanyak 97%). Mayoritas responden juga merasa bisa berhubungan baik dengan warga yang berbeda agama dalam lingkungan pendidikan maupun pekerjaan (Generasi Milenial sebanyak 96%, Generasi Z sebanyak 97%), memiliki teman yang berbeda agama (Generasi Milenial sebanyak 78%, Generasi Z sebanyak 82%), dan merasa nyaman untuk berhubungan dengan orang yang berbeda agama (Generasi Milenial sebanyak 80%, Generasi Z sebanyak 81%). Selain itu, lebih banyak responden Generasi Z (41%) yang mencari tahu tentang agama lain dibandingkan responden Generasi Milenial (32%).

Grafik 15 Kesetujuan dengan pernyataan inklusif agama

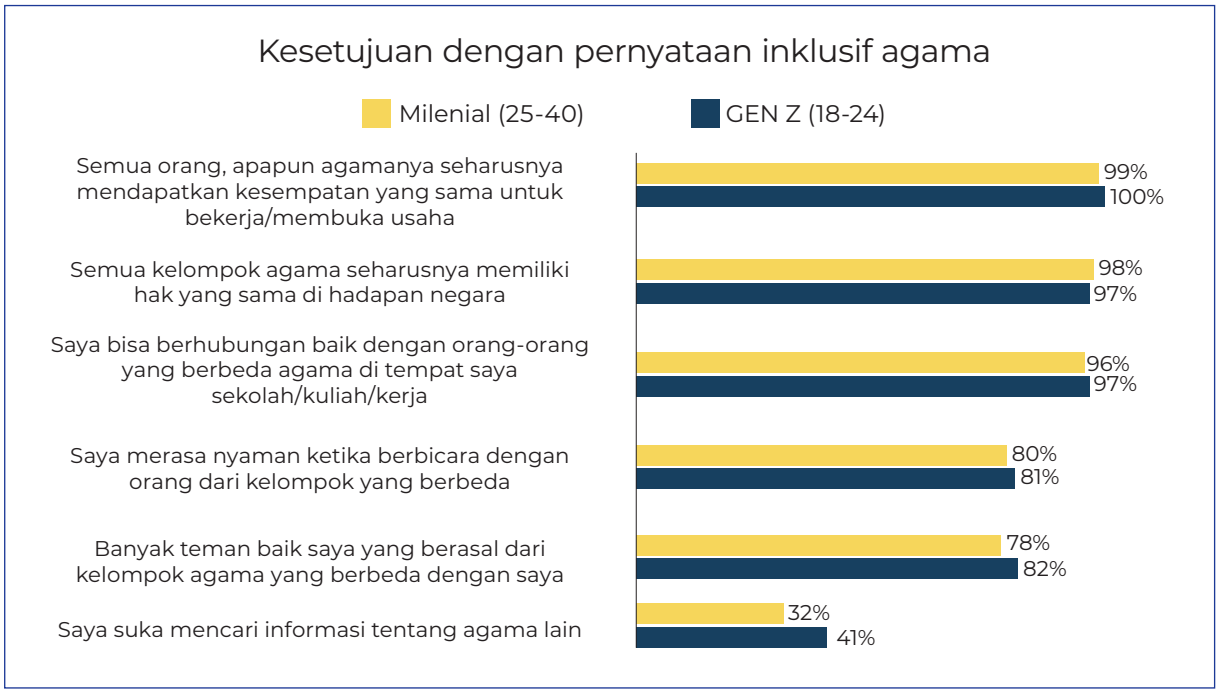

Dilihat dari kategori agama, hampir semua responden beragama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu setuju bahwa semua warga seharusnya mendapatkan kesempatan yang sama untuk bekerja (99%), memiliki hak yang sama di hadapan negara terlepas agama yang dianut (99%), bisa berhubungan baik dengan warga yang berbeda agama

dalam lingkungan pendidikan maupun pekerjaan (96% - 99%), memiliki teman berbeda agama (75% - 98%), dan merasa nyaman untuk berhubungan dengan orang yang berbeda agama (77% - 95%). Selain itu, setidaknya sepertiga responden juga tertarik untuk mencari tahu tentang agama lain (33% - 45%).

Grafik 16 Kesetujuan dengan pernyataan inklusif agama

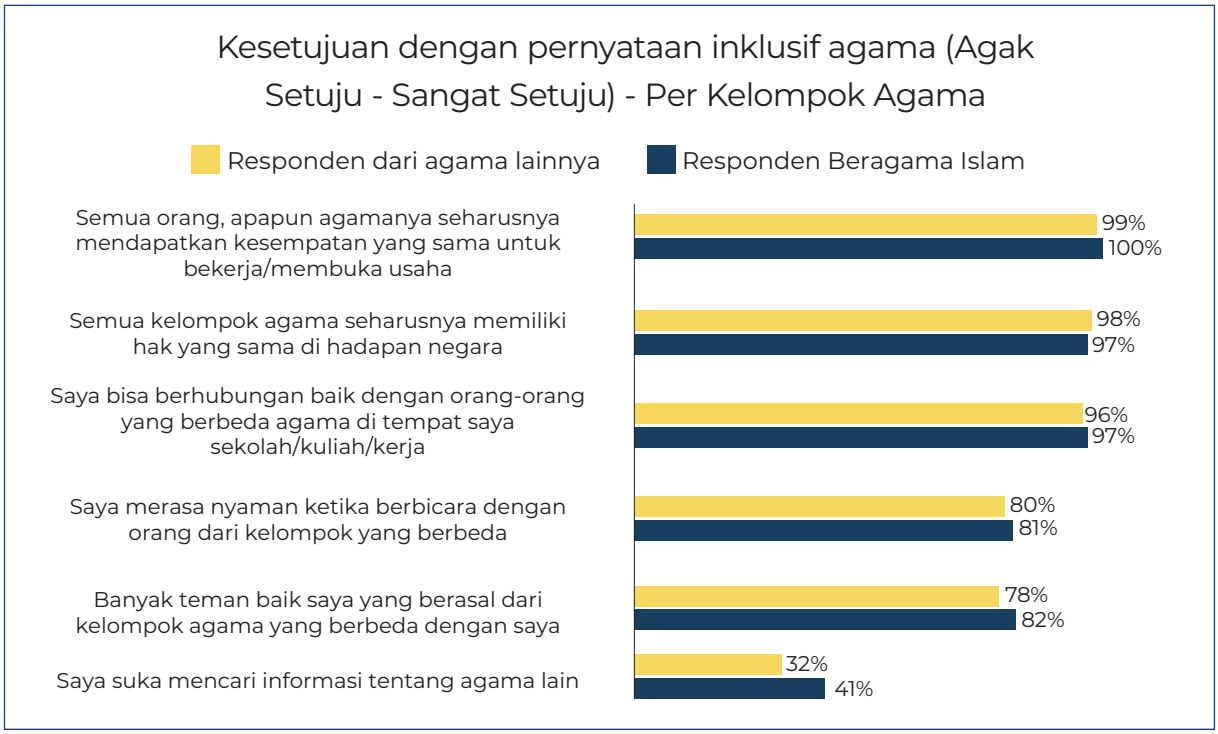

3.3. Pandangan dan Sikap terhadap Kepemimpinan oleh Kelompok Agama Minoritas

Survei ini menemukan setengah dari responden Generasi Z (53%) dan Milenial (49%) menilai orang dari kelompok agama minoritas layak menjadi pemimpin. Proporsi responden Generasi Z ini sedikit lebih tinggi daripada responden Milenial. Dari sini dapat diketahui, masih banyak responden dari Generasi Milenial yang tidak setuju terhadap kepemimpinan oleh kelompok agama minoritas.

Grafik 17 Pandangan dan sikap terhadap kepemimpinan oleh kelompok agama minoritas

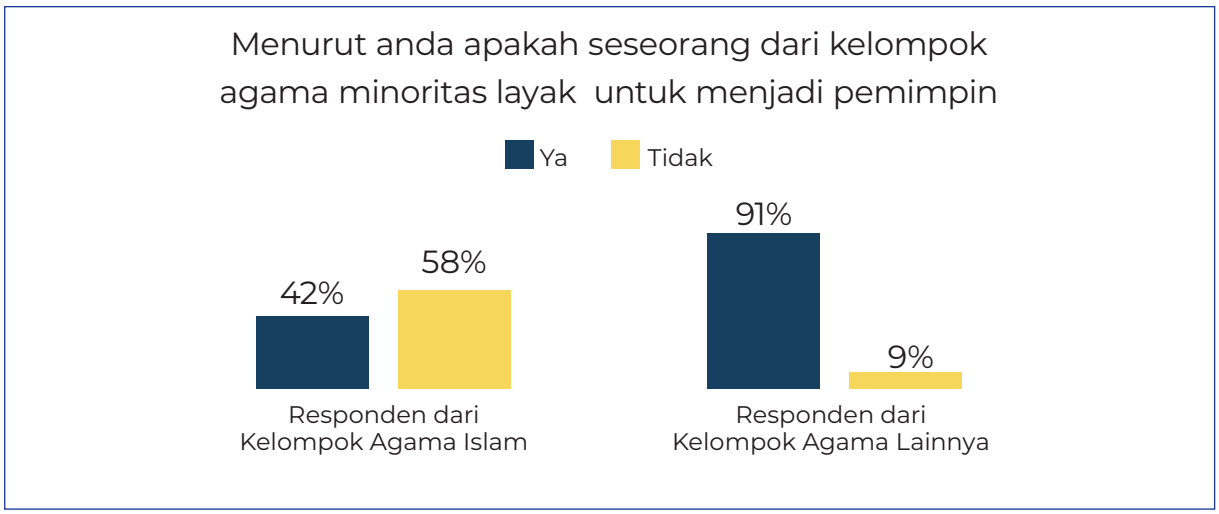

Dilihat dari kategori responden berdasarkan agama mayoritas (Islam) dan minoritas (Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu) kebanyakan responden dari agama minoritas menilai orang dari kelompok agama minoritas layak menjadi pemimpin (91%). Hasil ini berbeda dengan pernyataan dari responden yang berasal dari agama mayoritas. Kurang dari setengah responden (41%) menilai layak untuk seseorang dari kelompok agama minoritas untuk menjadi pemimpin.

Grafik 18 Pandangan dan sikap responden terhadap kepemimpinan kelompok agama minoritas

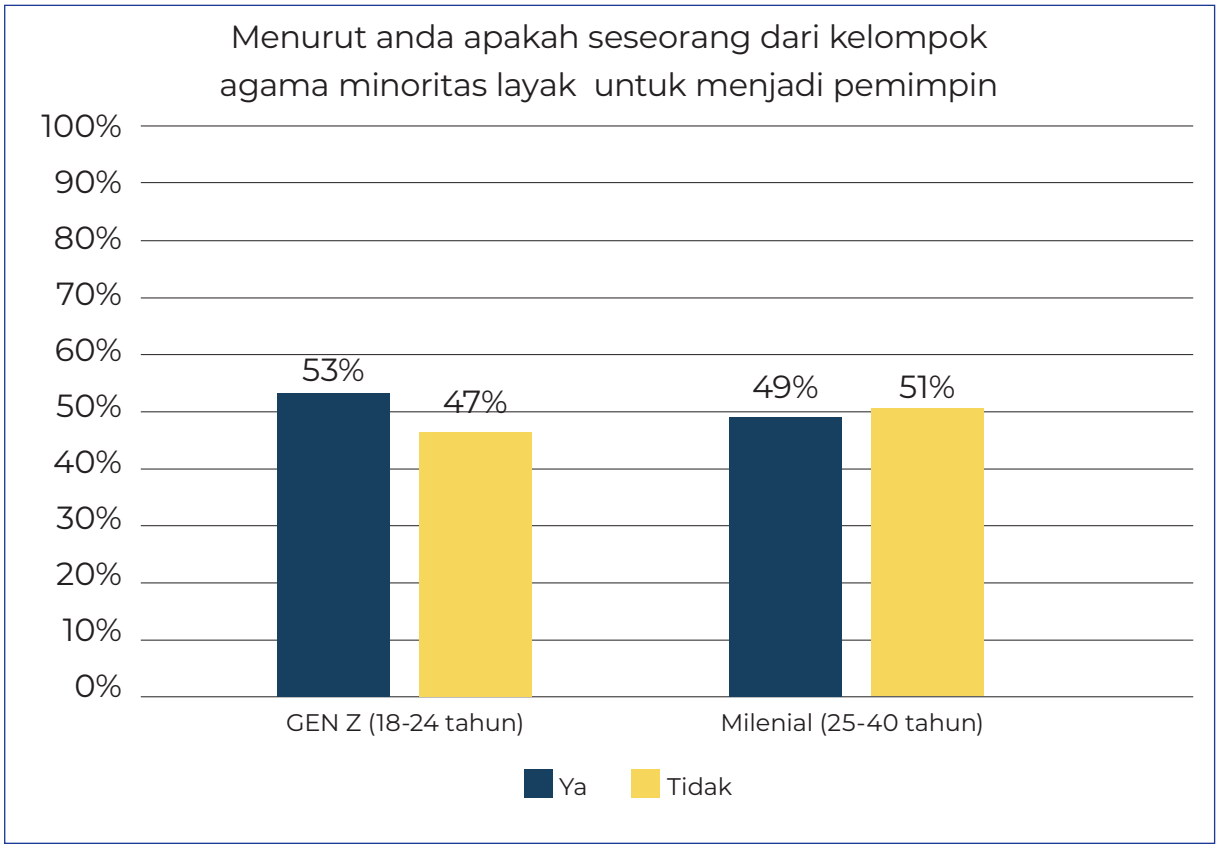

Responden dari kedua kategori usia menyatakan jabatan yang dapat dijalankan seseorang dari kelompok agama minoritas adalah Presiden (Generasi Milenial sebanyak 14%, Generasi Z sebanyak 18%), Gubernur (Generasi Milenial sebanyak 9%, Generasi Z sebanyak 9%), dan Wakil Presiden (Generasi Milenial sebanyak 5%, Generasi Z sebanyak 10%).

Grafik 19 Pandangan dan sikap responden terhadap kepemimpinan oleh kelompok agama minoritas berdasarkan jabatan

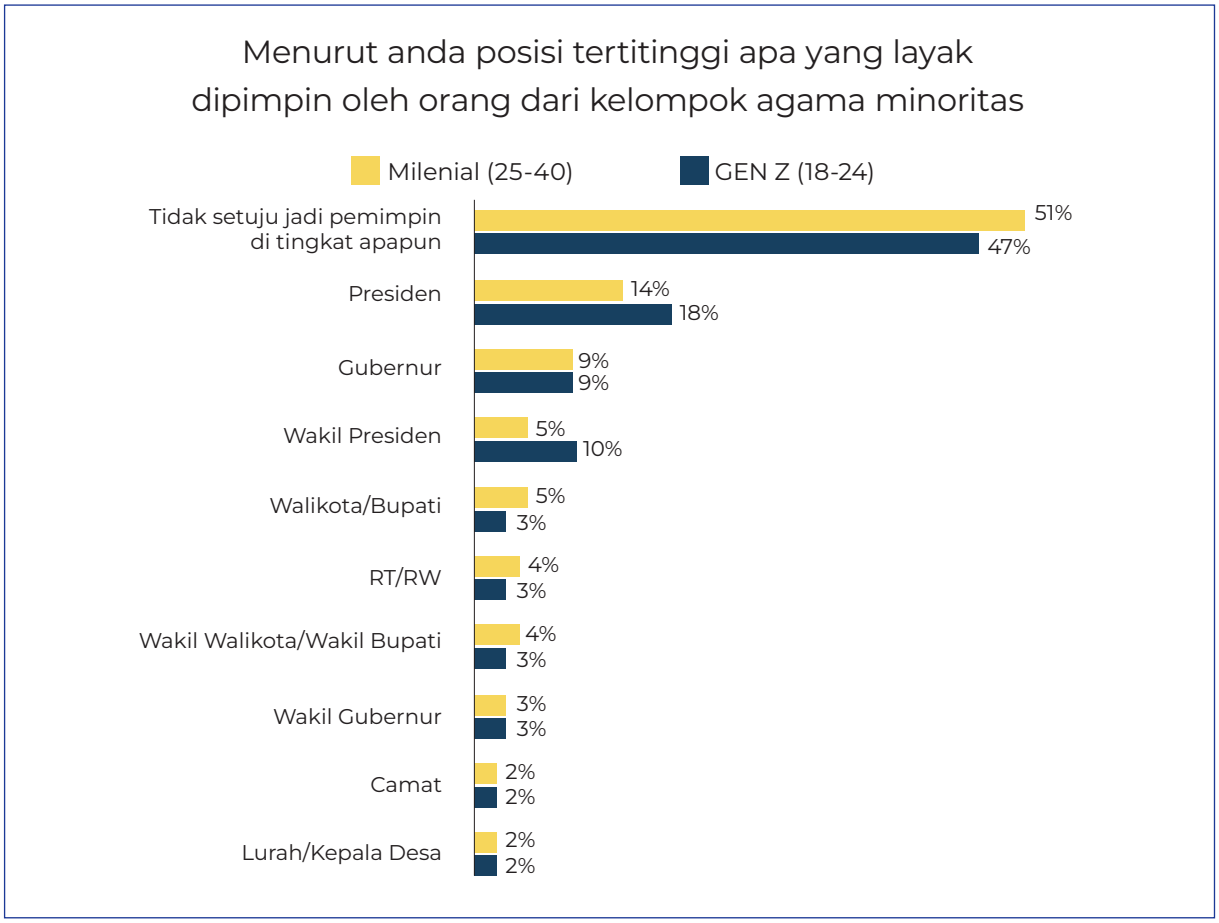

3.4. Sikap terhadap Pernikahan Beda Agama

Secara keseluruhan, mayoritas responden (lebih dari 65%) cenderung tidak setuju, baik yang menyatakan sebaiknya tidak dilakukan, atau menolak sama sekali, pernikahan beda agama. Lebih dari setengah responden Milenial (56%) tidak setuju dengan pernikahan beda agama. Jumlah responden Generasi Z yang menolak pernikahan beda agama lebih sedikit (48%). Sebaliknya, kurang dari 20% responden yang menilai pernikahan beda agama boleh dilakukan dalam kondisi apa pun atau menganjurkannya (Generasi Milenial sebanyak 16%, Generasi Z sebanyak 18%). Sekelompok kecil responden Milenial (12%) dan Generasi Z (14%) menilai pernikahan beda agama dapat dilakukan dalam kondisi khusus atau tertentu.

Grafik 20 Sikap terhadap pernikahan beda agama

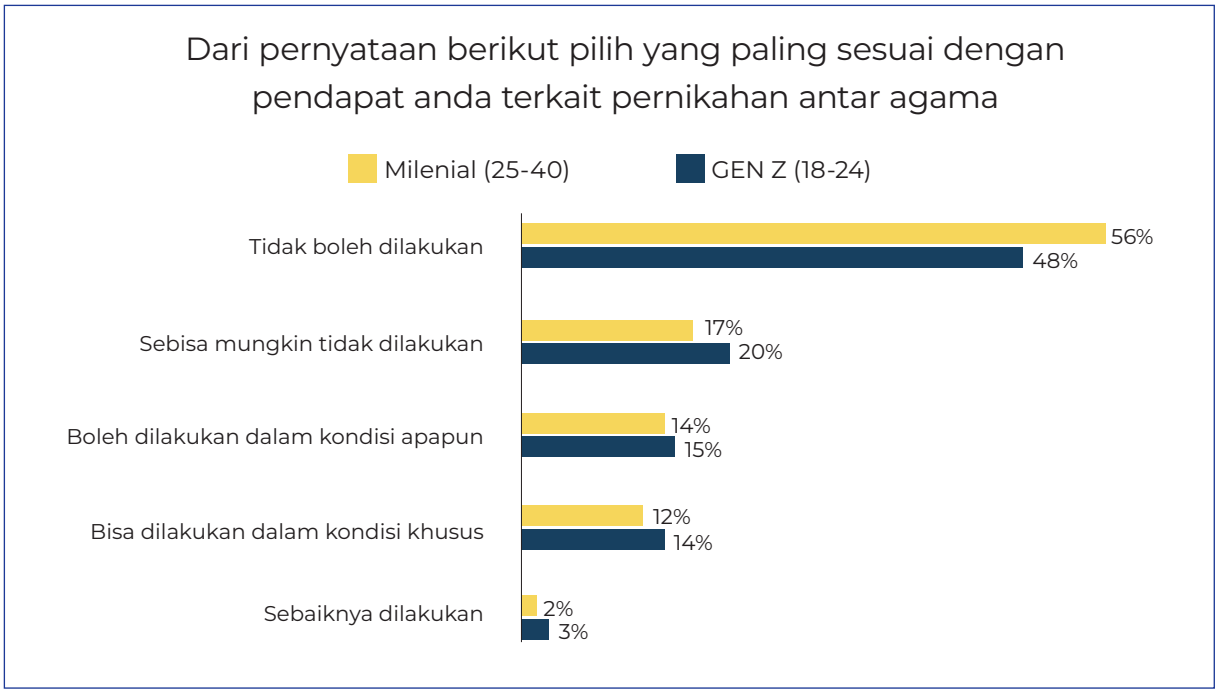

3.5. Sikap terhadap Pembangunan Tempat Ibadah Kelompok Minoritas

Kurang dari setengah responden Generasi Z (48%) dan Milenial (39%) menyetujui pembangunan tempat ibadah kelompok minoritas tanpa persetujuan kelompok mayoritas. Sebaliknya, 38% responden Milenial, dan 27% responden Generasi Z menilai pembangunan rumah ibadah kelompok minoritas hanya boleh dilakukan dengan persetujuan kelompok mayoritas. Hanya 15% responden Milenial, dan 18% Responden Generasi Z yang setuju pembangunan rumah ibadah kelompok minoritas difasilitasi kelompok mayoritas. Sekelompok kecil responden Generasi Z (7%) dan Milenial (9%) cenderung menolak pembangunan tempat ibadah kelompok minoritas.

Grafik 21 Sikap terhadap pembangunan tempat ibadah kelompok minoritas

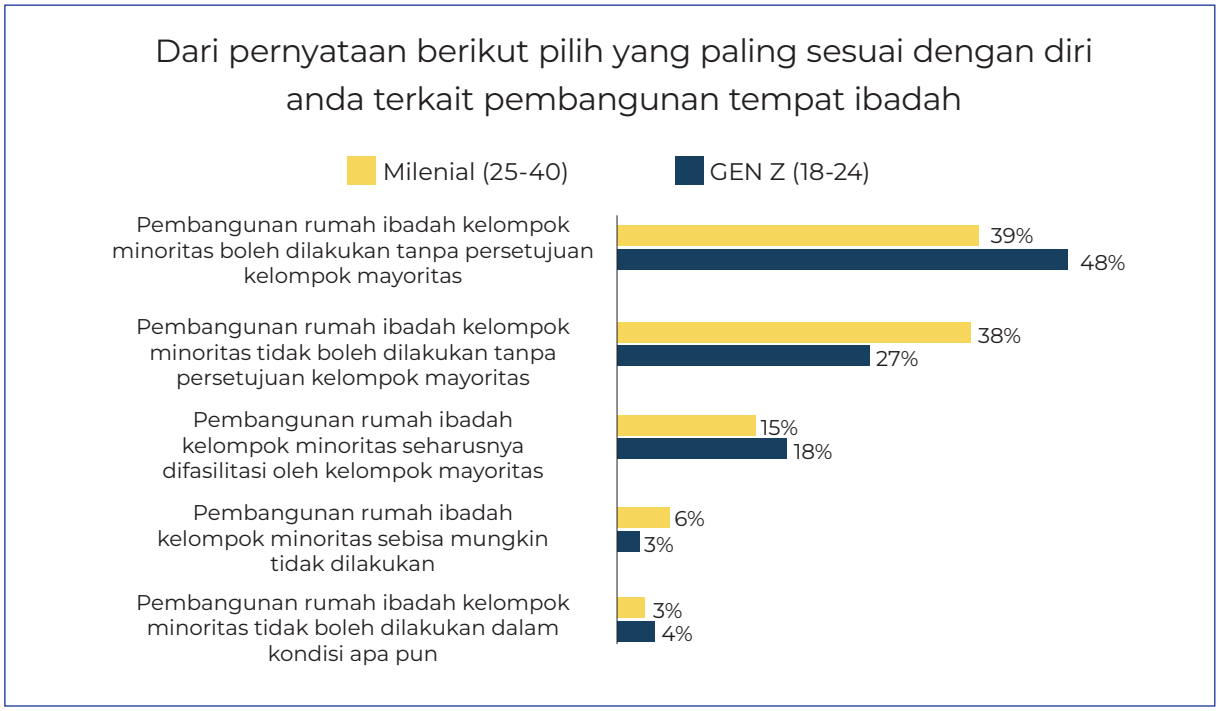

3.6. Sikap terhadap Penerapan Pendidikan Eksklusif dan Inklusif

Sekitar 40% responden Generasi Milenial dan Generasi Z setuju sekolah menerapkan peraturan berpakaian sesuai dengan agama mayoritas di daerah mereka. Sebanyak 21% responden Milenial dan 17% responden Generasi Z setuju pemberlakuan pemisahan laki-laki dan perempuan dalam kegiatan seperti pernikahan dan kegiatan-kegiatan di sekolah.

Grafik 22 Sikap terhadap penerapan pendidikan eksklusif

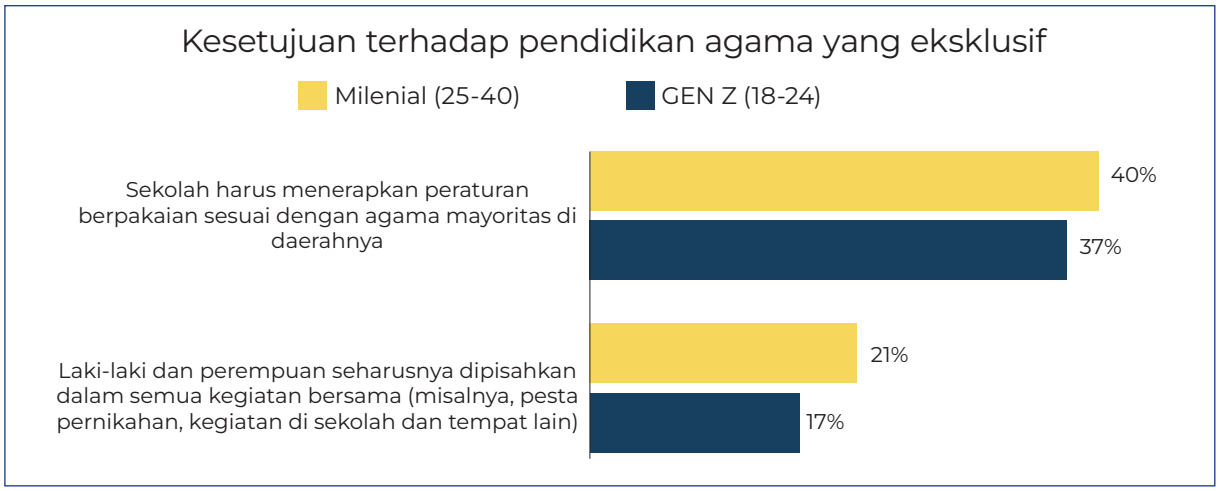

Mayoritas responden Milenial (93%) dan Generasi Z (90%) setuju sekolah harus menerima siswa dengan latar belakang agama apa pun, penganut agama minoritas tidak diwajibkan mengikuti pelajaran agama kelompok mayoritas (Generasi Milenial 91%, Generasi Z sebanyak 87%), dan sekolah memberikan pendidikan agama-agama yang ada di Indonesia (Generasi Milenial dan Generasi sebanyak 83%). Selanjutnya, lebih dari setengah responden Milenial (65%) dan Generasi Z (74%) setuju agar sekolah menyediakan tempat ibadah untuk seluruh kelompok agama, memberi informasi dan pengetahuan tentang agama tradisi atau adat di Indonesia seperti Parmalin dan Kejawen (Generasi Milenial sebanyak 61%, Generasi Z sebanyak 68%), pengetahuan tentang tasawuf dan tarekat (Generasi Milenial sebanyak 59%, Generasi Z sebanyak 60%), dan pengetahuan akan agama-agama yang ada di dunia (Generasi Milenial sebanyak 58%, Generasi Z sebanyak 65%).

Grafik 23 Sikap terhadap penerapan pendidikan inklusif

3.7. Sikap terhadap Pengelompokan Tempat Tinggal Berdasarkan Agama

Hanya sebagian kecil responden Generasi Z (16%) dan Milenial (18%) yang setuju pemisahan tempat tinggal berdasarkan agama.

Grafik 24 Sikap terhadap tempat tinggal berdasarkan agama

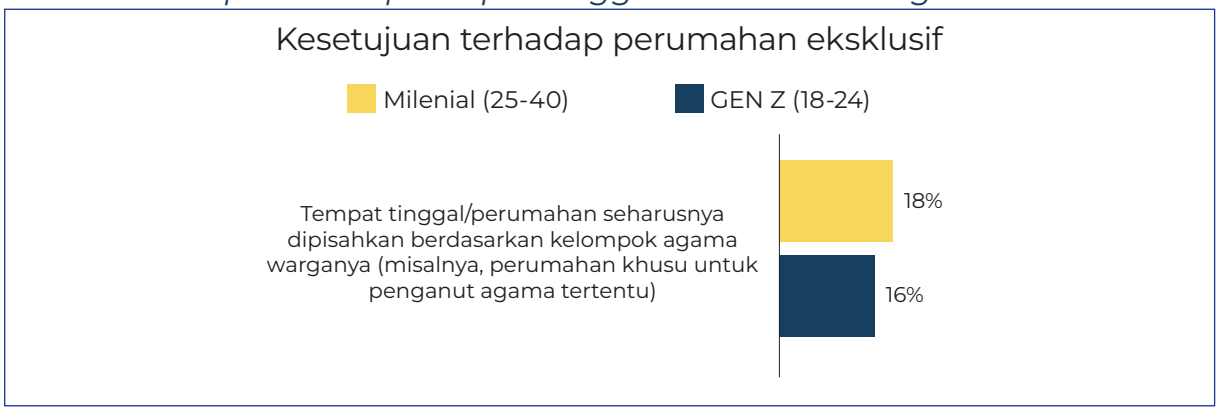

Mayoritas responden (89%) melaporkan tidak ada perumahan yang melakukan pemisahan berdasarkan agama penghuninya di daerah mereka.

Grafik 25 Informasi responden tentang tempat tinggal/perumahan berdasarkan agama di daerah mereka

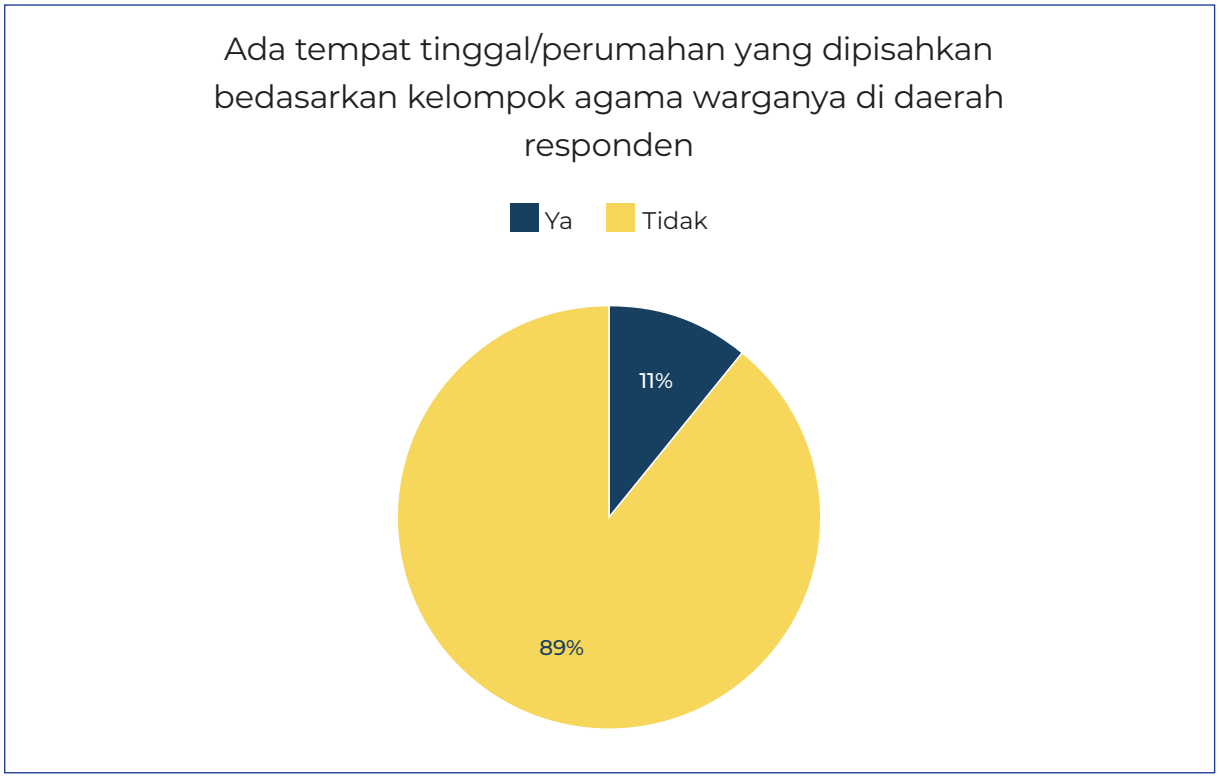

3.8. Pengalaman Toleransi dan Intoleransi di Lingkungan Tempat Tinggal

Secara keseluruhan mayoritas responden melaporkan bahwa sekolah di daerah mereka menerima siswa dari semua latar belakang agama (83%), tidak ada pemaksaan mengikuti pendidikan agama kelompok mayoritas pada siswa dari kelompok minoritas (69%), dan mendapatkan pelajaran terkait agama-agama di Indonesia (65%).

Sebagian kecil responden menyatakan sekolah di daerah mereka memberikan pengetahuan tentang agama-agama di dunia (29%), agama adat/tradisi di Indonesia (24%), menyediakan tempat ibadah untuk semua kelompok agama (22%), dan mengajarkan pengetahuan akan tasawuf dan tarekat di sekolah (19%).

Grafik 26 Informasi penerapan pendidikan agama inklusif di daerah responden

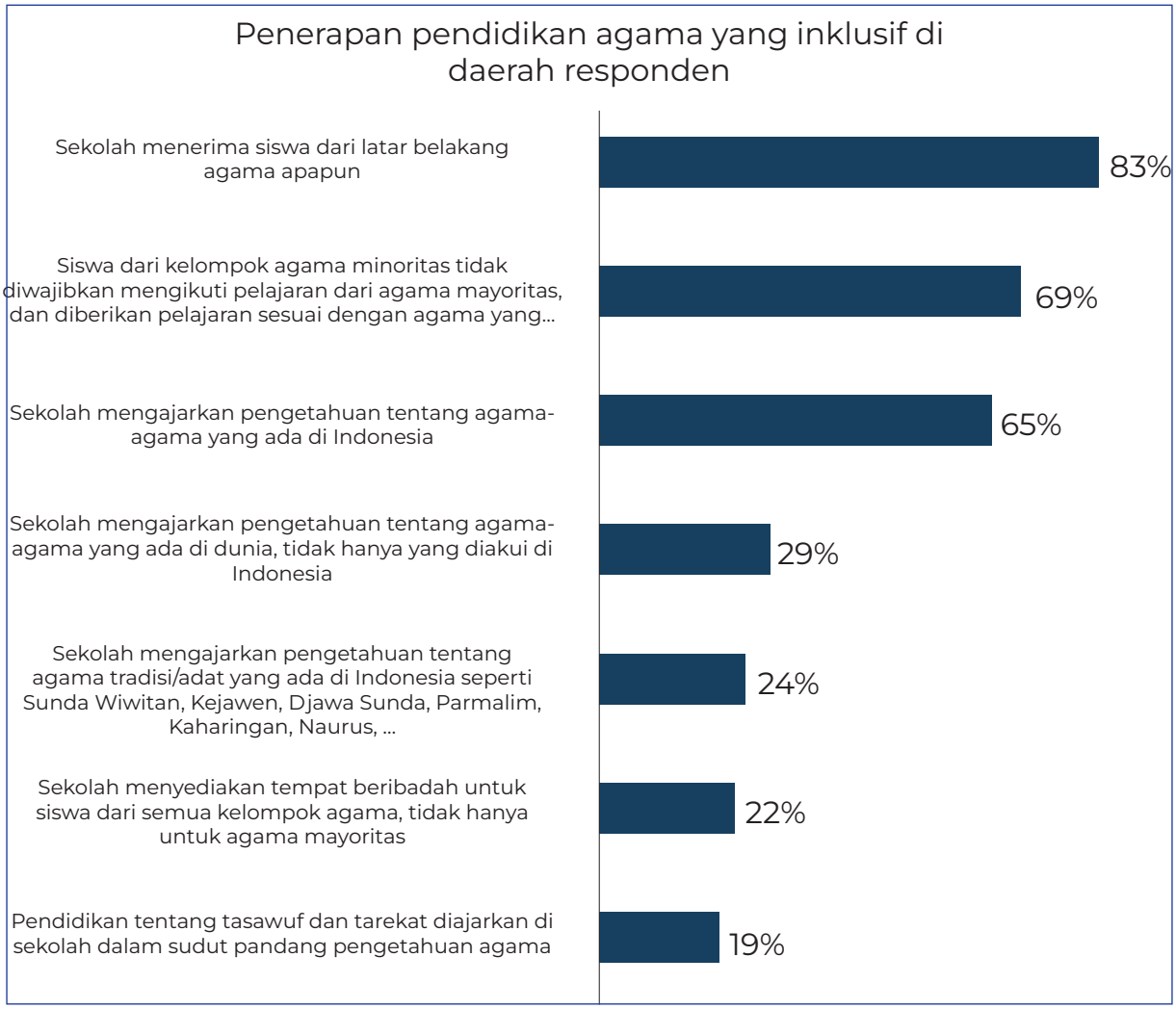

Sekitar 30% responden melaporkan bahwa sekolah di daerah mereka menerapkan peraturan berpakaian sesuai dengan agama mayoritas. Selain itu, sebagian kecil responden (17%) melaporkan praktik pemisahan laki-laki dan perempuan dalam kegiatan sosial di daerah mereka.

Grafik 27 Informasi penerapan pendidikan agama eksklusif di daerah responden

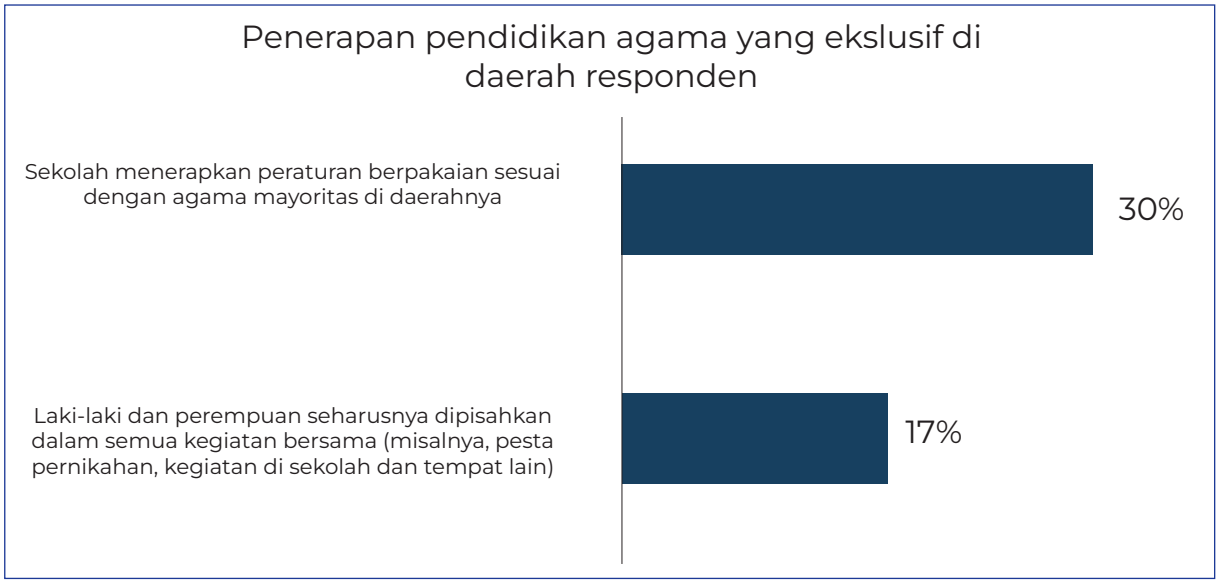

3.9. Pengalaman Terkait Kebebasan Beragama

Mayoritas responden (90% atau lebih) tidak pernah mengalami pembatasan kegiatan beragama oleh aparat pemerintah. Pembatasan atau pelarangan yang paling banyak dialami adalah menyebarluaskan informasi keagamaan (10%) dan berkumpul di tempat umum untuk kegiatan keagamaan (10%).

Grafik 28 Praktik pembatasan dan pelarangan hak KBB

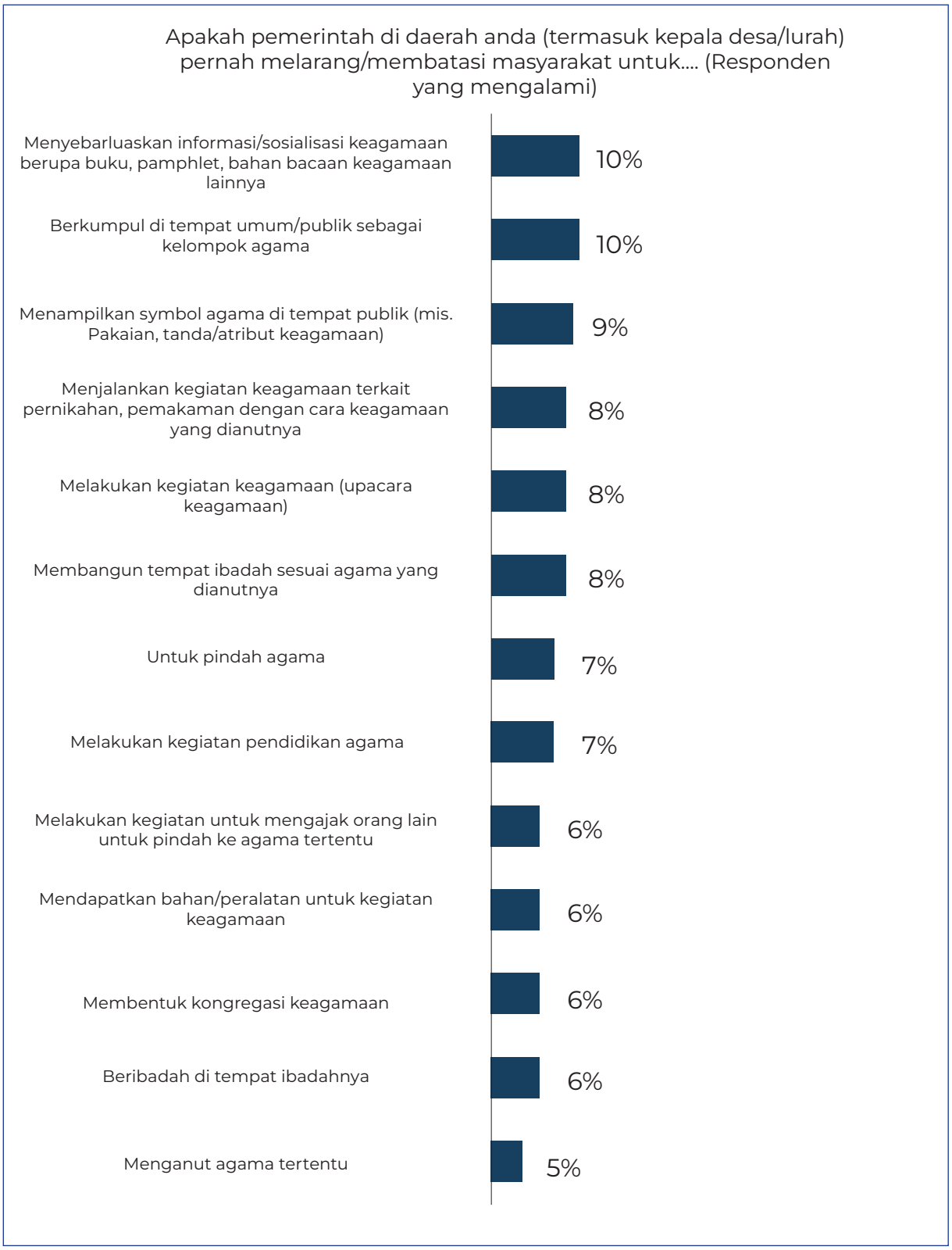

Dari total responden, sebagian kecil responden mengaku pernah diminta melaporkan status keagamaannya (6%), mengikuti peraturan agama selain yang dianut (5%), dan pindah agama (3%).

Grafik 29 Pengalaman terkait pemaksaan oleh pemerintah daerah

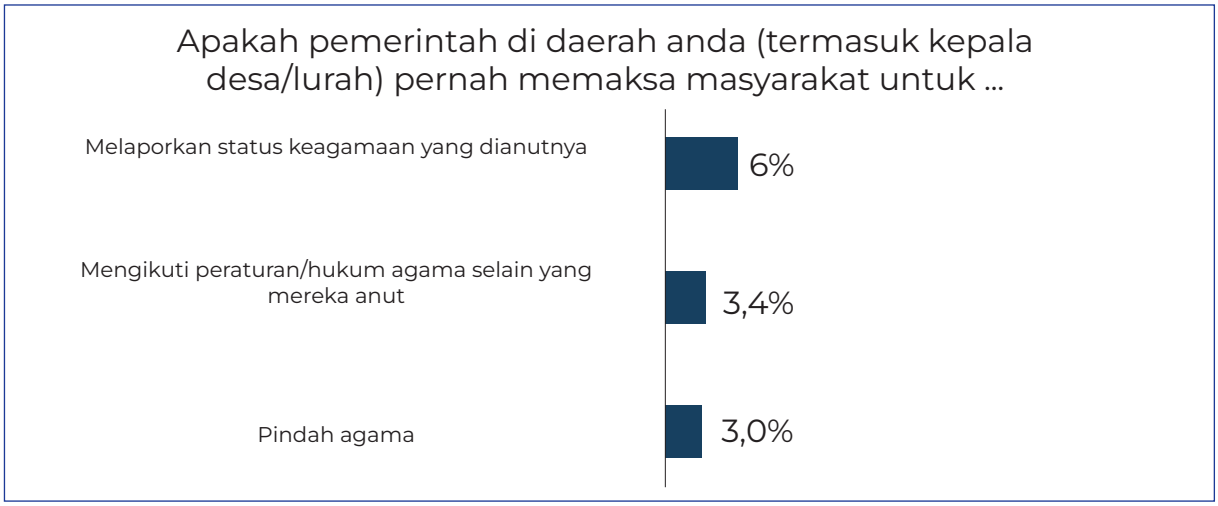

Hanya sebagian kecil responden yang melaporkan terjadi penangkapan atau Tindakan berlebihan pada anggota kelompok agama tertentu di daerahnya (7.2%) atau pada pemuka/tokoh agama tertentu (7%).

Grafik 30 Praktik penangkapan dan tindakan berlebihan oleh pemerintah daerah

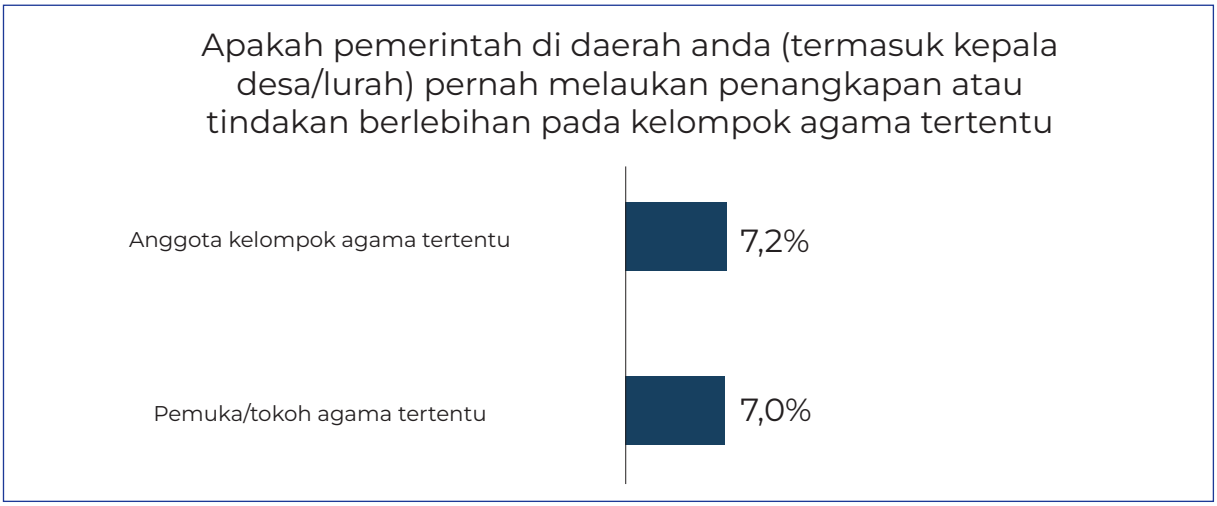

Dari keseluruhan responden survei, hanya sebagian kecil yang melaporkan pelarangan berorganisasi (6%) dan berpartisipasi (4%) dalam politik berdasarkan kelompok keagamaan di daerahnya. Secara umum responden melaporkan tidak ada larangan dalam mendirikan organisasi politik (4%) dan berpartisipasi politik dalam bentuk mencalonkan diri berdasarkan kelompok keagamaan (3%).

Grafik 31 Praktik pelarangan atau pembatasan pendirian organisasi masyarakat dan partai politik serta partisipasi politik atas dasar agama

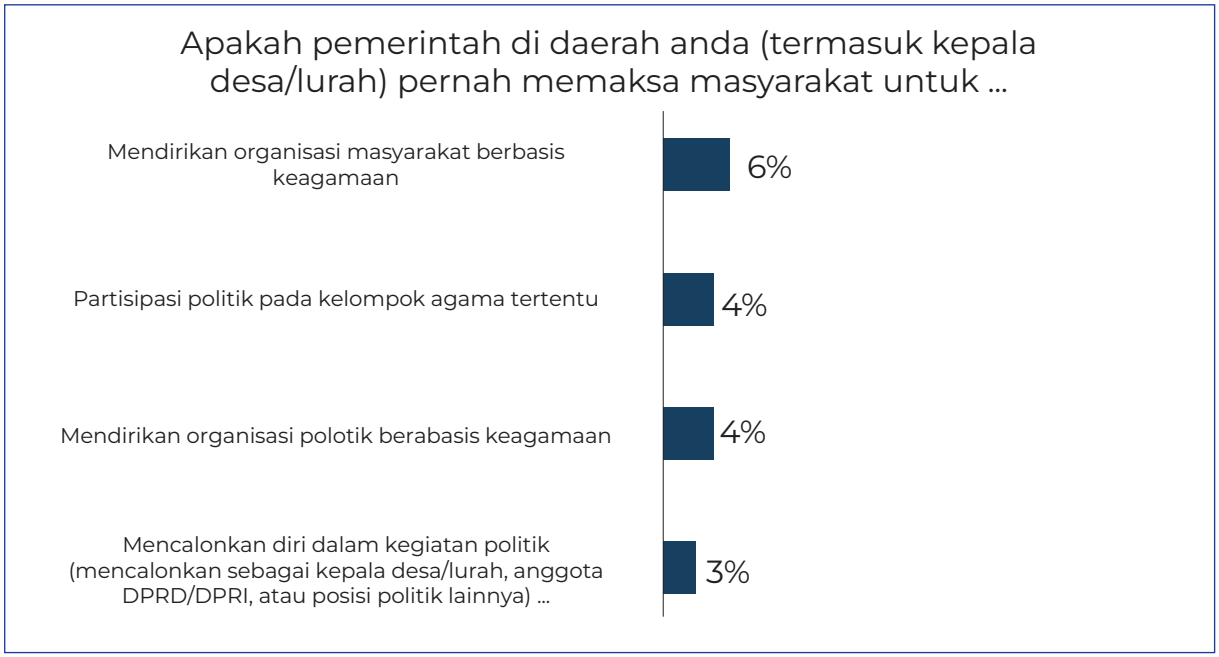

3.10. Sikap terhadap Nasionalisme

Secara umum responden menunjukkan sikap positif yang kuat terhadap nasionalisme. Hampir seluruh responden setuju seorang warga negara harus menghormati negara dan menjaga tradisinya (Generasi Milenial sebanyak 98%, Generasi Z sebanyak 97%), Pancasila menyatukan seluruh komponen bangsa untuk saling bersatu dan menjaga keutuhan bangsa, dan mungkin tanpa Pancasila, kita sudah terpecah belah (Generasi Milenial sebanyak 98%, Generasi Z sebanyak 97%). Kebanyakan dari mereka juga setuju dengan pernyataan Indonesia menjadi bangsa besar karena mampu menaungi seluruh aspek masyarakat, baik ras, suku dan agama yang berbeda-beda (Generasi Milenial sebanyak 98%, Generasi Z sebanyak 95%).

Kebanyakan responden juga menunjukkan sikap positif terhadap pengajaran cinta negara bagi anak-anak Indonesia Mereka setuju sekolah seharusnya mengajarkan anak-anak untuk mencintai negaranya (Generasi Milenial sebanyak 98%, Generasi Z sebanyak 97%) dan kita harus mengedepankan semangat nasionalisme sebagai hal utama yang harus dilakukan (Generasi Milenial sebanyak 96%, Generasi Z sebanyak 95%).

Kebanyakan responden juga setuju orang Indonesia harus

mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau kelompok, dan itu adalah bentuk ekspresi cinta tanah air (Generasi Milenial sebanyak 95%, Generasi Z sebanyak 96%). Mereka juga menunjukkan sikap positif terhadap pernyataan semua tindakan hebat berasal dari kecintaan seseorang pada negaranya (Generasi Milenial sebanyak 87%, Generasi Z sebanyak 88%) dan sudah seharusnya kepentingan negara didahulukan di atas kepentingan pribadi (Generasi Milenial sebanyak 75%, Generasi Z sebanyak 75%).

Sikap positif yang tinggi terhadap nasionalisme dan kecintaan terhadap negara Indonesia tidak serta merta mengarahkan mereka pada sikap negatif terhadap orang dari bangsa atau negara lain. Kebanyakan responden tidak setuju dengan pernyataan kita harus menolak semua budaya asing seperti musik, makanan, gaya berbusana, gaya berbahasa/ berbicara dan lain-lain (Generasi Milenial sebanyak 59%, Generasi Z sebanyak 65%). Sementara itu, responden juga setuju dengan pernyataan kita harus menjaga generasi muda dari pengaruh budaya asing (Generasi Milenial sebanyak 80%, Generasi Z sebanyak 76%), kita harus curiga terhadap negara lain, terutama negara yang tampaknya terlalu baik terhadap kita (Generasi Milenial sebanyak 55%, Generasi Z sebanyak 52%), dan terlalu terbuka dengan negara lain adalah suatu yang buruk (Generasi Milenial sebanyak 62%, Generasi Z sebanyak 57%).

Grafik 32 Kesetujuan terhadap Nasionalisme

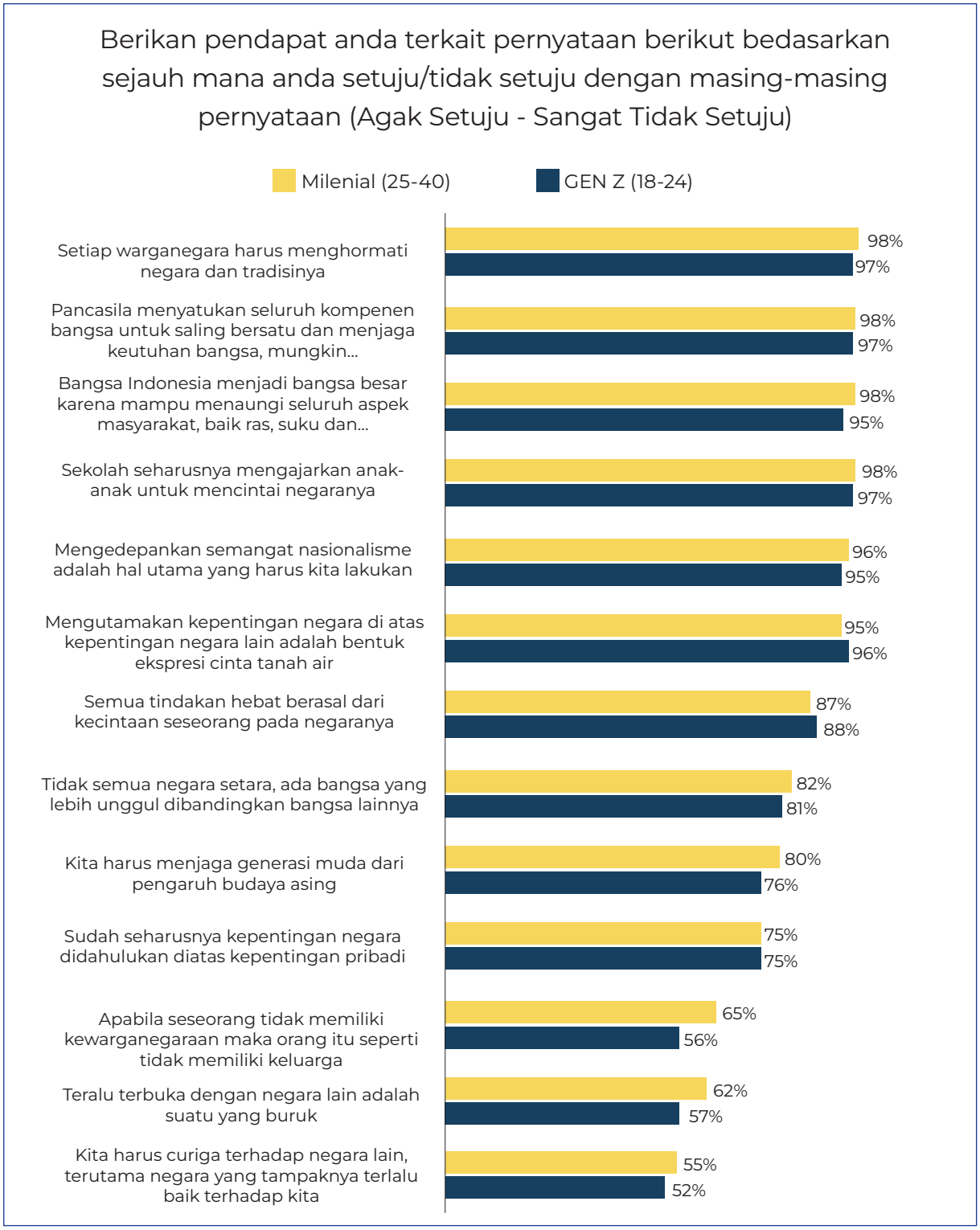

Selanjutnya, kebanyakan responden juga tidak setuju bahwa kelompok mayoritas sudah seharusnya memiliki hak politik di atas kelompok minoritas (Generasi Milenial sebanyak 53%, Generasi Z sebanyak 55%). Kebanyakan

responden juga tidak setuju bahwa setiap warganegara seharusnya tinggal di negaranya masing-masing (Generasi Milenial 62%, Generasi Z sebanyak 60%).

Grafik 33 Kesetujuan untuk tinggal di negara masing-masing, menolak budaya asing, dan peran politik kelompok mayoritas

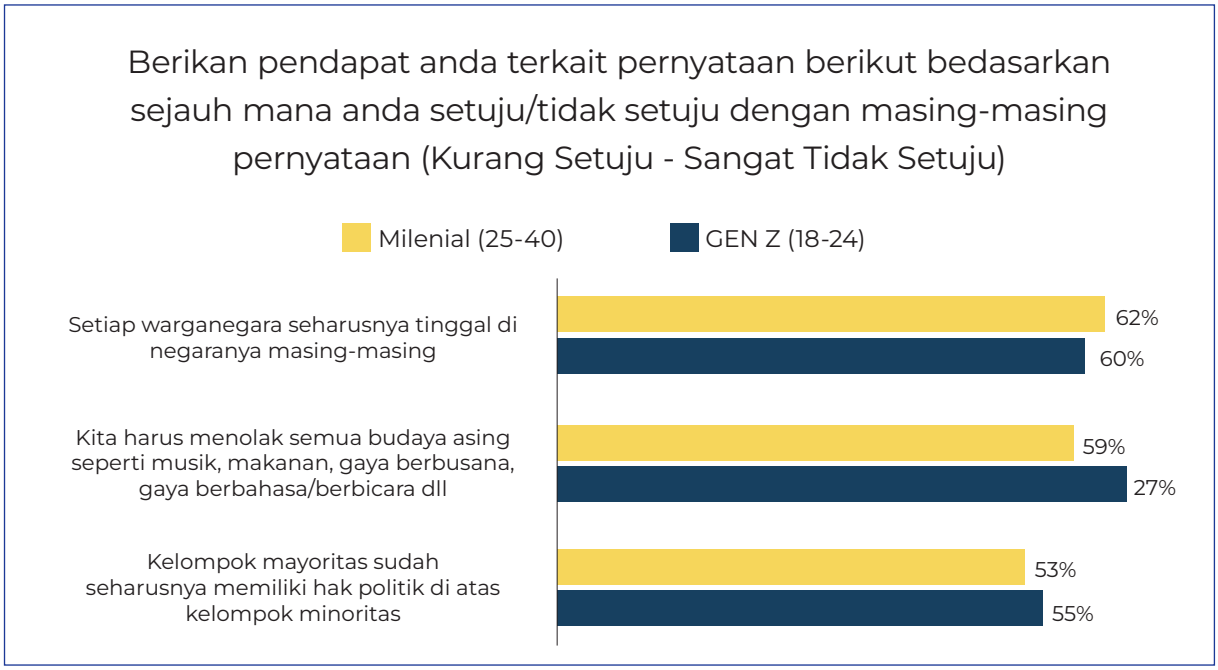

Kebanyakan responden cenderung tidak setuju dengan dugaan ada upaya menggantikan Pancasila dengan ideologi atau keyakinan lain (Generasi Milenial sebanyak 71%, Generasi Z sebanyak 68%), atau bahwa Syariat Islam lebih sesuai dengan mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam (Generasi Milenial sebanyak 72%, Generasi Z sebanyak 68%).

Grafik 34 Kesetujuan terhadap usaha menggantikan Pancasila

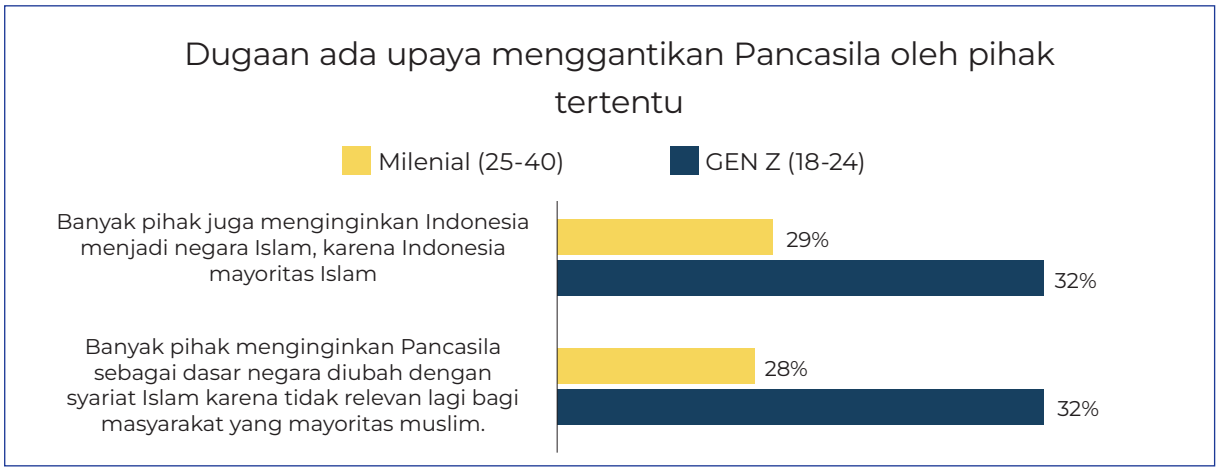

3.11. Toleransi Budaya

Dalam toleransi budaya, kebanyakan responden survei ini menunjukkan kecenderungan toleransi yang tinggi. Hampir semua responden (99%) menunjukkan sikap positif terhadap keragaman suku, budaya, dan kelompok agama di Indonesia, serta menilai keragaman itu sebagai hal baik dan penting dipertahankan. Kebanyakan mereka juga setuju dengan pembauran antarpenduduk setempat dan pendatang agar saling mempelajari tradisi antarkelompok berbeda.

Mayoritas responden setuju kelompok mayoritas atau orang-orang lokal dari sebuah daerah untuk mempelajari tradisi kelompok minoritas dan pendatang (Generasi Milenial sebanyak 87%, Generasi Z sebanyak 89%) dan sebaliknya agar kelompok minoritas atau pendatang beradaptasi dengan kebiasaan setempat (Generasi Milenial sebanyak 87%, Generasi Z sebanyak 86%) dan berbaur (Generasi Milenial sebanyak 84%, Generasi Z sebanyak 80%), serta mengajarkan anak-anaknya tradisi baru tempat mereka menetap (Generasi Milenial sebanyak 75%, Generasi Z sebanyak 73%).

Hal tersebut mendukung kesetujuan mayoritas responden bahwa keragaman budaya di Indonesia memperkuat bangsa dan membuatnya lebih mampu untuk menghadapi tantangan (Generasi Milenial sebanyak 75% , Generasi Z sebanyak 73%). Selain itu mayoritas responden setuju pentingnya mempertahankan adat-istiadat bangsa Indonesia dimanapun mereka berada (Generasi Milenial sebanyak 67%, Generasi Z sebanyak 62%). Mayoritas responden juga setuju agar Candi Borobudur dijadikan pusat keagamaan Agama Budha untuk seluruh umat Budha di dunia (Generasi Milenial sebanyak 75%, Generasi Z sebanyak 78%).

Grafik 35 Kesetujuan terhadap keragaman budaya

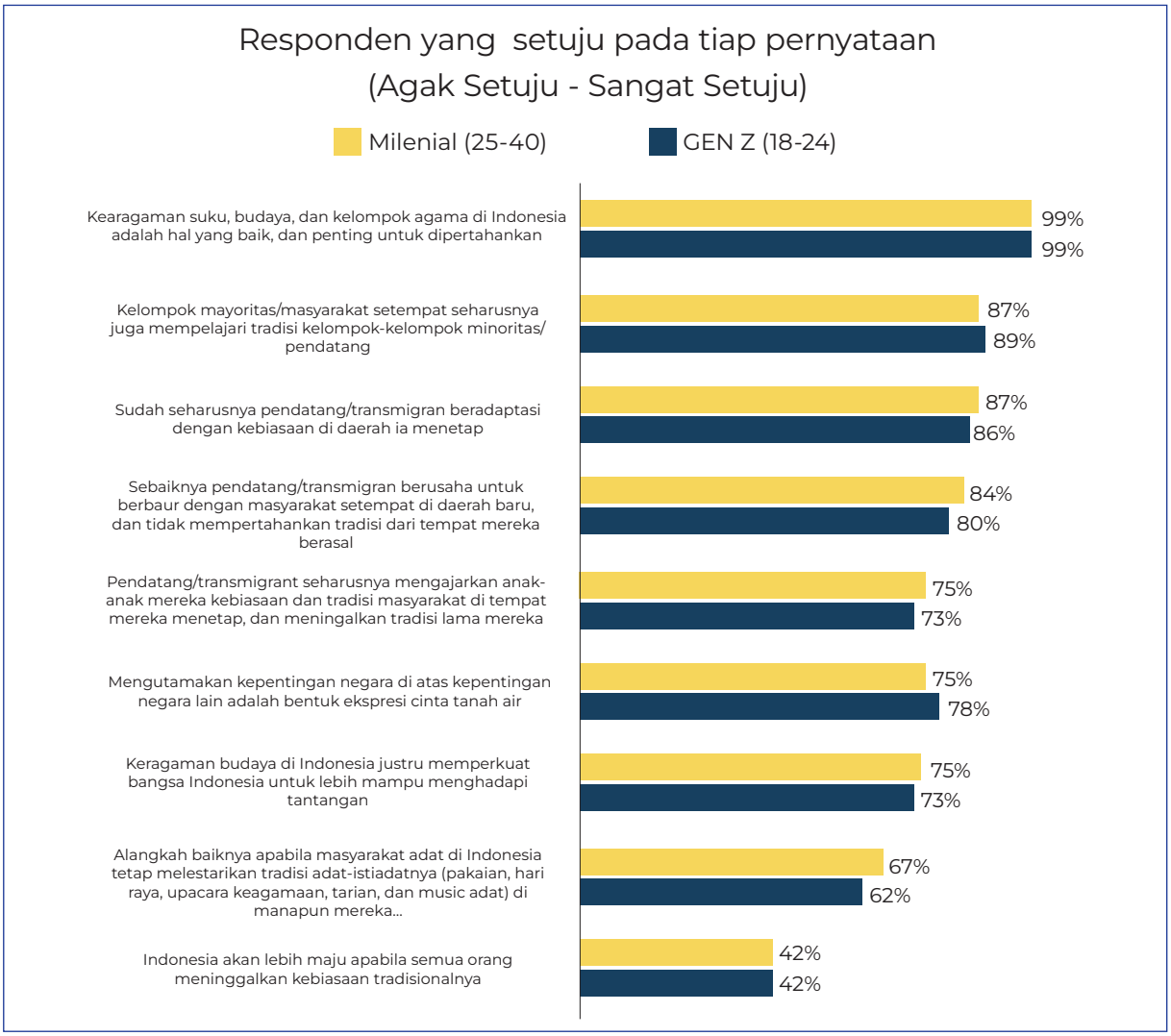

Cukup banyak responden juga setuju jika orang dari kelompok suku atau adat minoritas menjadi pemimpin (Generasi Milenial sebanyak 63%, Generasi Z sebanyak 65%). Dari sini dapat diketahui bahwa lebih banyak responden yang setuju orang dari kelompok suku/adat minoritas menjadi pemimpin. Walau demikian lebih dari sepertiga responden tidak setuju jika orang dari kelompok suku atau adat minoritas menjadi pemimpin (Generasi Milenial sebanyak 37%, Generasi Z sebanyak 35%). Secara keseluruhan jabatan terbanyak yang disetujui untuk dapat dipimpin oleh orang dari kelompok suku atau adat minoritas adalah menjadi presiden (Generasi Milenial sebanyak 19%, Generasi Z sebanyak 21%), gubernur (Generasi Milenial sebanyak 11%, Generasi Milenial sebanyak 12%), wakil presiden (Generasi Milenial sebanyak 5%, Gen Z sebanyak 17%) , dan wakil gubernur (Generasi Milenial sebanyak 4%, Generasi Z sebanyak 4%).

Grafik 36 Kesetujuan terhadap kepemimpinan seseorang dari suku/adat minoritas

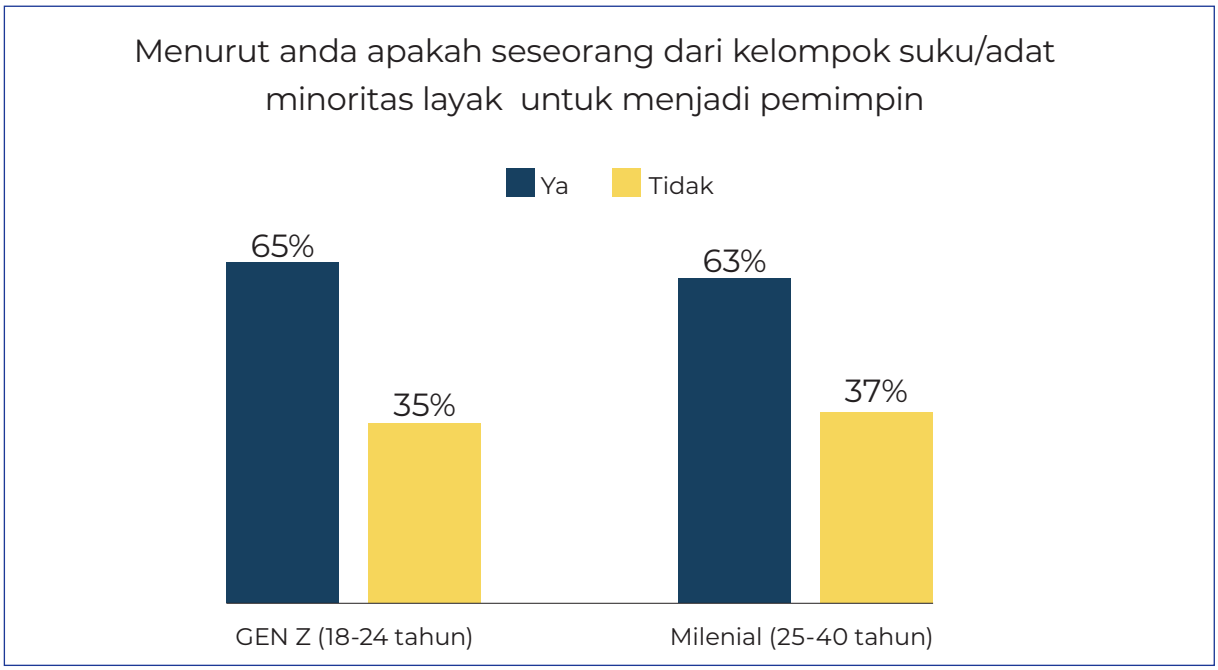

Grafik 37 Pandangan terhadap jabatan pemimpin yang layak bagi seseorang dari suku/adat minoritas

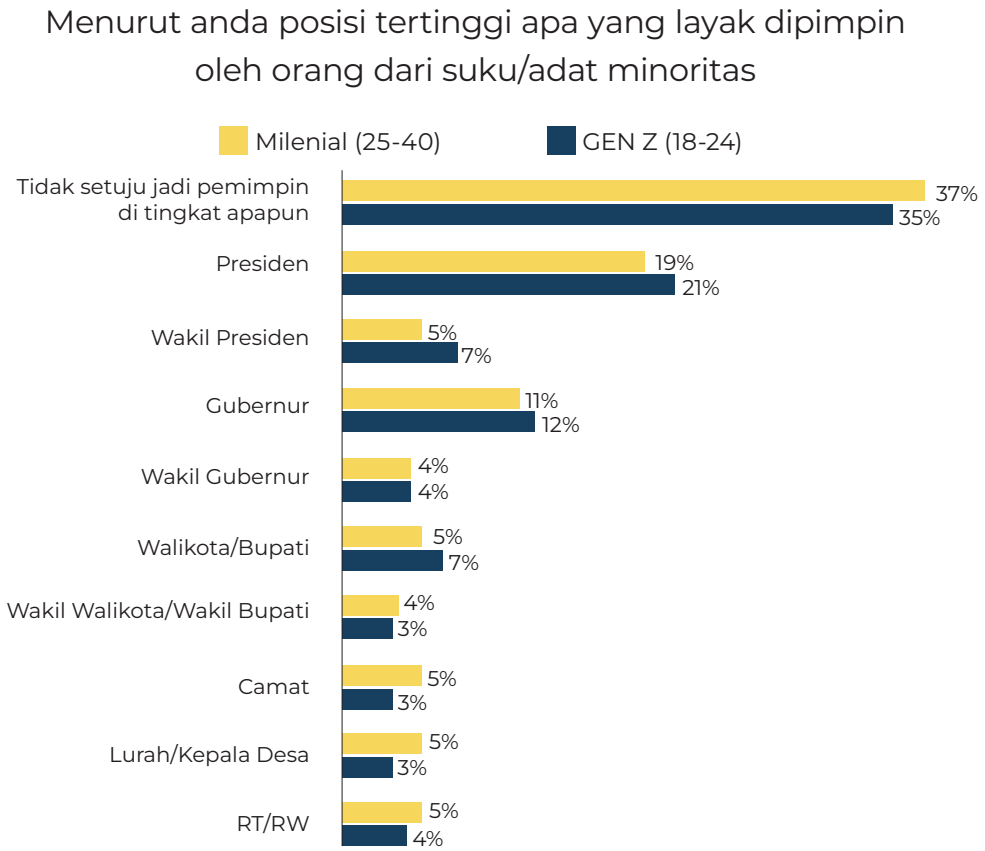

3.12. Sikap terhadap Pernikahan Antar-Suku

Lebih dari 50% responden memiliki sikap positif kuat terhadap pernikahan antarsuku. Mereka setuju bahwa pernikahan antarsuku boleh dilakukan dalam kondisi apa pun (Generasi Milenial sebanyak 62%, Generasi Z sebanyak 56%). Lebih dari 10% responden menyatakan bahwa pernikahan antarsuku sebaiknya dilakukan (Generasi Milenial sebanyak 11%, Generasi Z sebanyak 12%). Sebagian lain dari responden menyatakan bahwa pernikahan antar-suku bisa dilakukan dalam kondisi khusus (Generasi Milenial sebanyak 17%, Generasi Z sebanyak 22%). Hanya sebagian kecil responden yang menyatakan pernikahan antar suku sebisa mungkin tidak dilakukan (Generasi Milenial sebanyak 5%, Generasi Z sebanyak 3%), atau pernikahan antar suku tidak boleh dilakukan (Generasi Milenial sebanyak 6%, Generasi Z sebanyak 6%).

Grafik 38 Kesetujuan terhadap pernikahan antarsuku

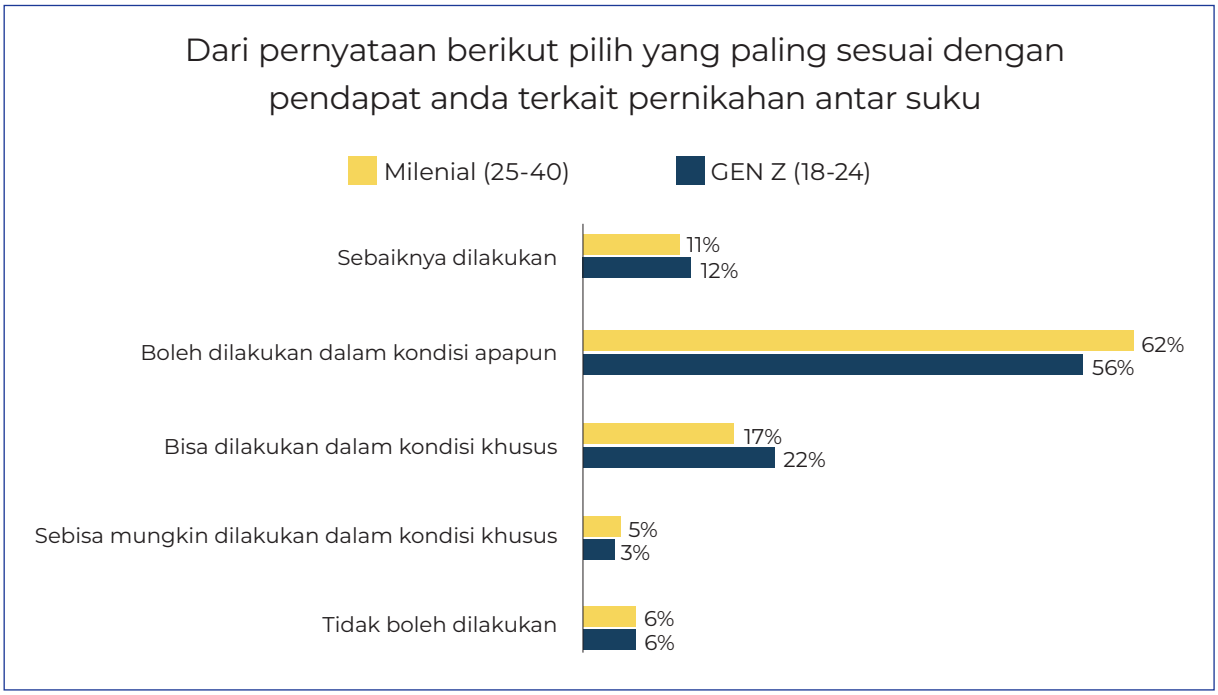

3.13. Sikap terhadap Pemimpin Perempuan

Mayoritas responden setuju perempuan layak menjadi pemimpin (Generasi Milenial sebanyak 80%, Generasi Z sebanyak 77%). Responden perempuan paling banyak setuju dengan pertanyaan tersebut (88%) dibanding responden laki-laki (69%).

Grafik 39 Kesetujuan terhadap pemimpin perempuan berdasarkan kategori usia

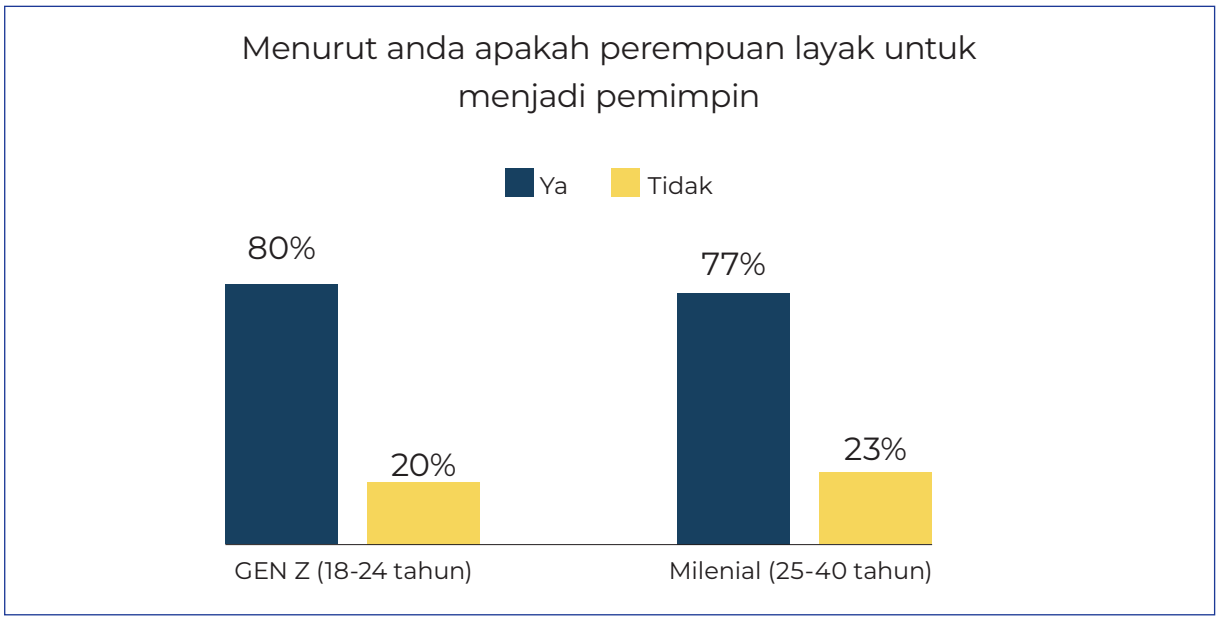

Grafik 40 Kesetujuan responden laki-laki dan perempuan terhadap pemimpin perempuan

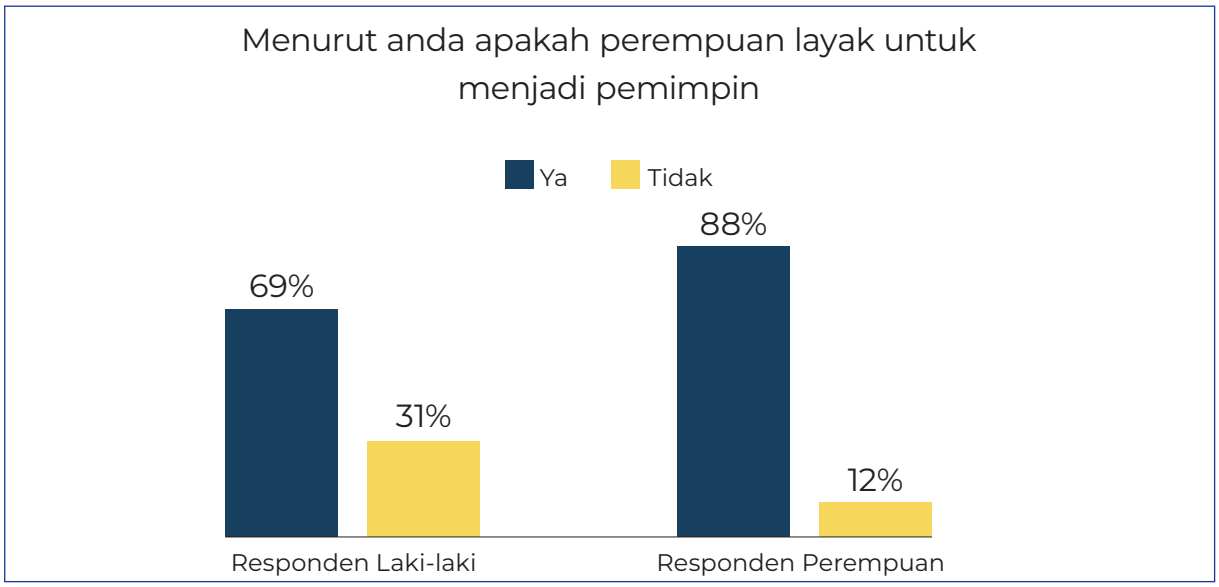

Ketika ditanya terkait kepemimpinan di tingkat apa saja, lebih dari setengah responden menilai perempuan layak jadi pemimpin di kementerian/lembaga, perusahaan swasta, di tingkat provinsi, di tingkat kota/kabupaten, dan DPRD di Indonesia. Cukup banyak juga yang menilai perempuan layak untuk memimpin di BUMN (Generasi Milenial sebanyak 51%, Generasi Z sebanyak 49%), dan BUMD (Generasi Milenial sebanyak 48%, Generasi Z sebanyak 46%).

Grafik 41 Pandangan responden tentang jabatan pemimpin perempuan

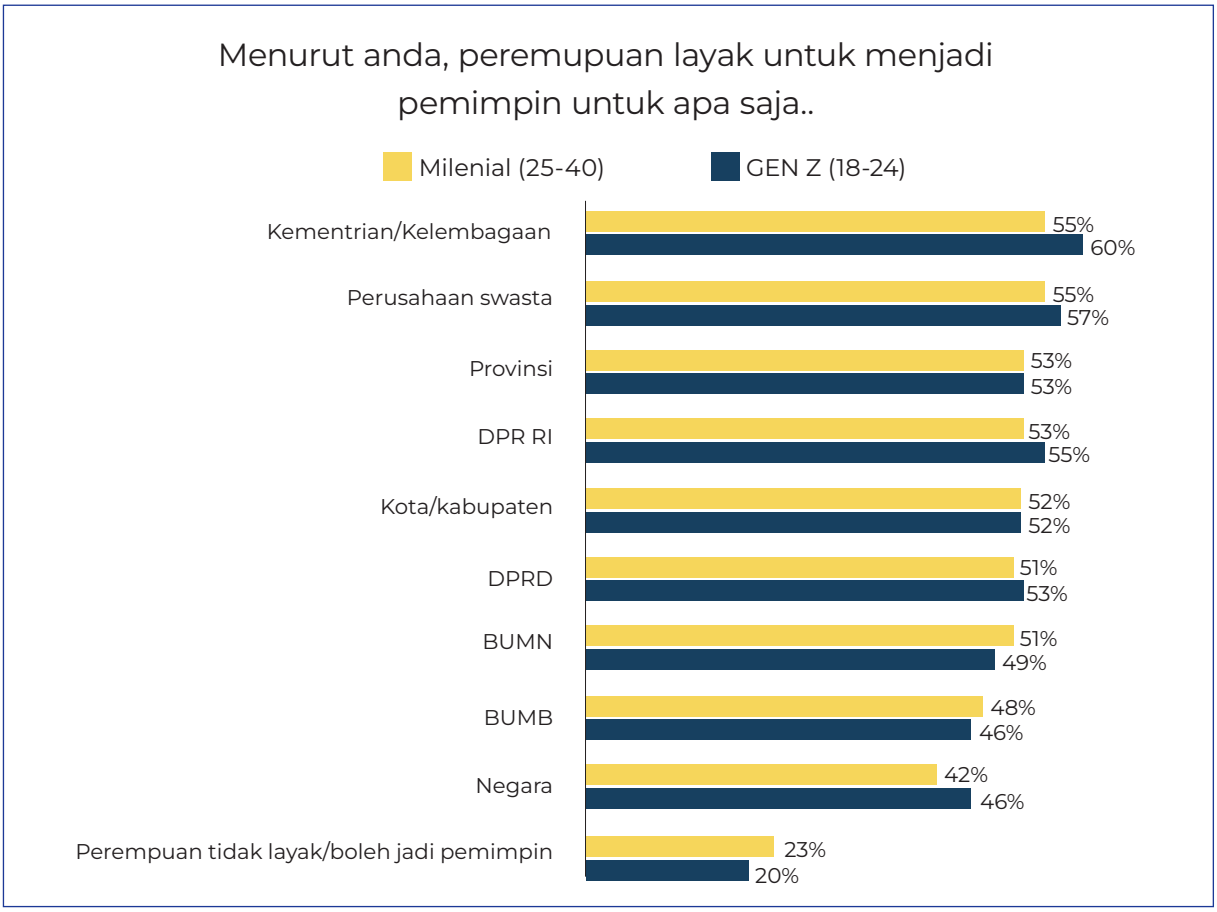

Hal ini sejalan juga dengan sikap terhadap kelayakan perempuan bertarung secara politik dan mencalonkan diri. Lebih dari setengah responden setuju perempuan layak untuk bertarung di tingkat walikota/bupati (Generasi Milenial sebanyak 61%, Generasi Z sebanyak 60%), anggota DPR RI (Generasi Milenial sebanyak 57%, Generasi Z sebanyak 62%), Anggota Dewan Daerah (DPRD) (Generasi Milenial sebanyak 57%, Generasi Z sebanyak 59%), dan di tingkat Provinsi sebagai Gubernur (Generasi Milenial sebanyak 56%, Generasi Z sebanyak 56%). Selain itu, cukup banyak responden yang setuju perempuan layak untuk bertarung sebagai calon presiden (Generasi Milenial sebanyak 43%, Generasi Z sebanyak 47%).

Grafik 42 Pandangan terkait kelayakan perempuan bertarung politik dan mencalonkan diri

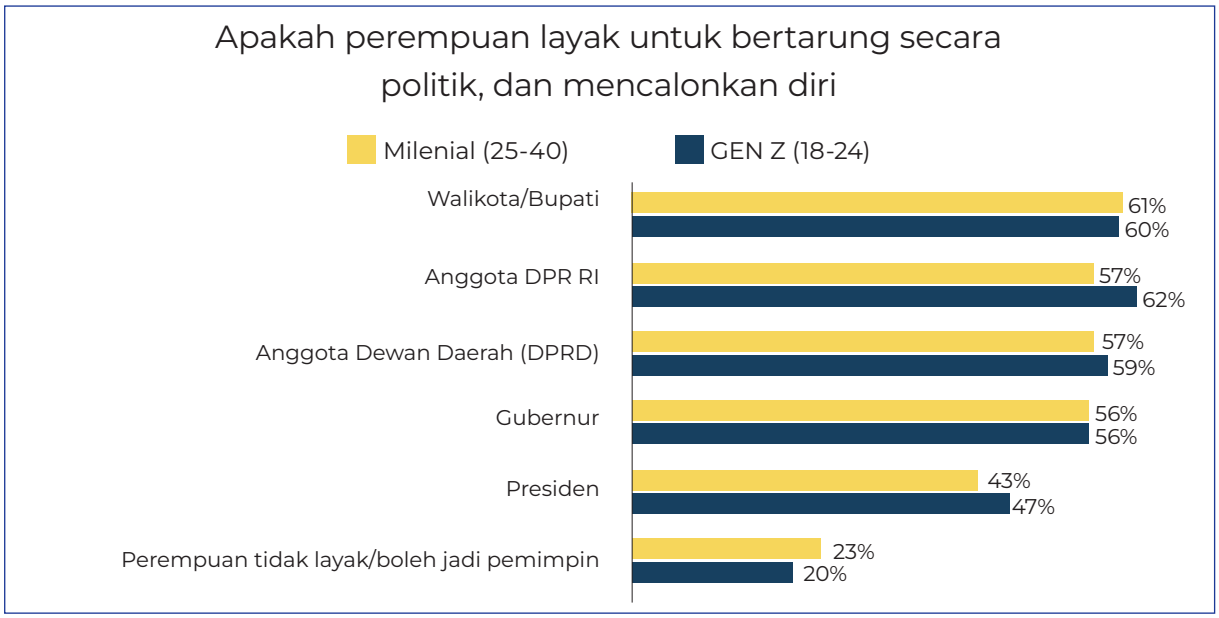

Di bidang pemerintahan, sekitar seperempat responden setuju perempuan layak menempati posisi tertinggi sebagai presiden (Generasi Milenial sebanyak 26%, Generasi Z sebanyak 30%), dan sebagai wakil presiden (Generasi Milenial sebanyak 10%, Generasi Z sebanyak 7%). Sebagian responden juga setuju perempuan sebagai pimpinan di tingkat Provinsi sebagai Gubernur (Generasi Milenial sebanyak 13%, Generasi Z sebanyak 10%), dan di tingkat kabupaten/kota, sebagai bupati/walikota Provinsi sebagai Gubernur (Generasi Milenial sebanyak 8%, Generasi Z sebanyak 12%).

Grafik 43 Pandangan terkait posisi tertinggi di pemerintahan yang layak dijabat perempuan

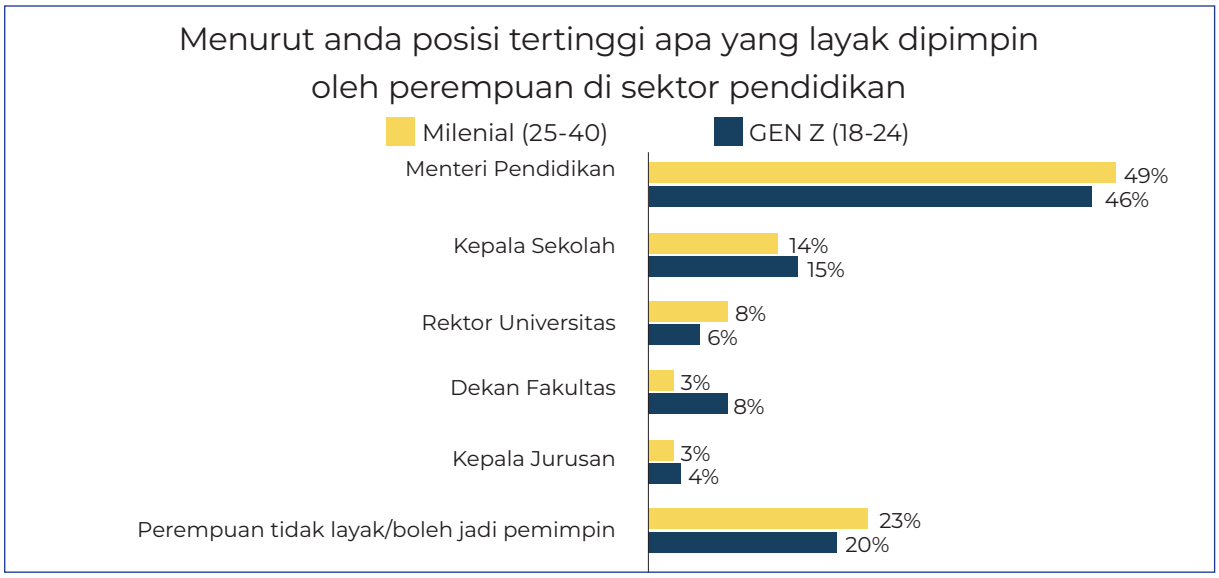

Di tingkat Kementerian/Lembaga, lebih dari setengah responden setuju perempuan layak menempati posisi tertinggi sebagai menteri (Generasi Milenial sebanyak 54%, Generasi Z sebanyak 53%), dan sebagai wakil menteri (Generasi Milenial sebanyak 10%, Generasi Z sebanyak 12%).

Grafik 44 Pandangan terkait posisi tertinggi di Kementerian/Lembaga yang layak dijabat perempuan

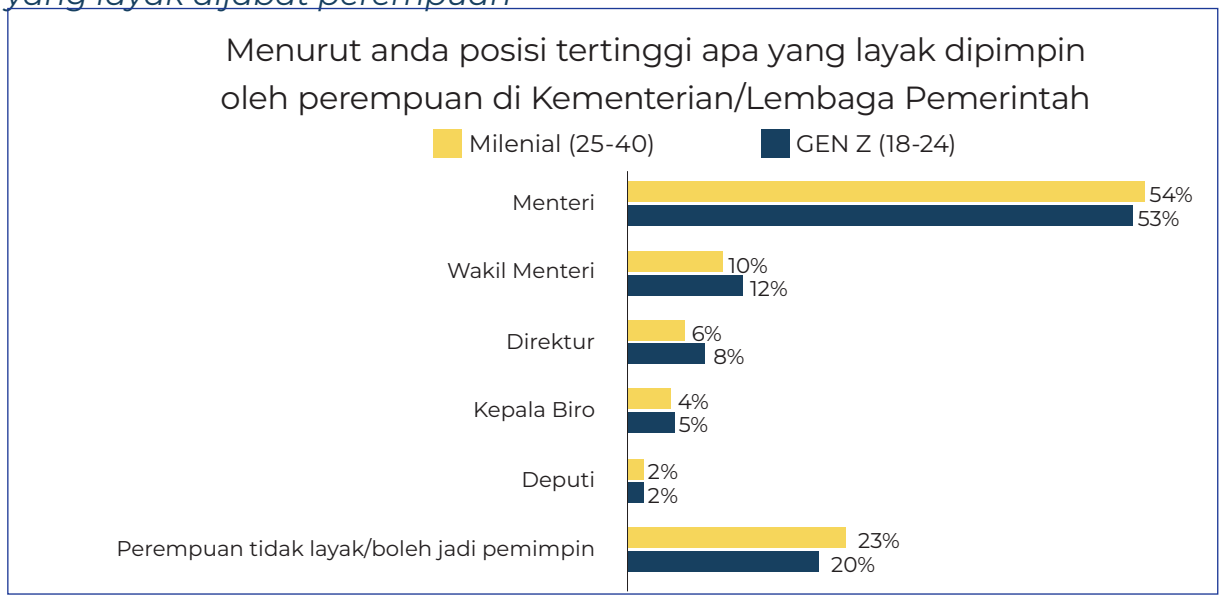

Di bidang pendidikan, hampir setengah responden setuju posisi tertinggi yang dianggap layak untuk diduduki perempuan adalah menteri pendidikan (Generasi Milenial sebanyak 49%, Generasi Z sebanyak 46%). Ada juga yang menilai perempuan layak menjadi pimpinan universitas sebagai rektor (Generasi Milenial sebanyak 8%, Generasi Z sebanyak 6%), dan sebagai pimpinan sekolah (Generasi Milenial sebanyak 14%, Generasi Z sebanyak 15%).

Grafik 45 Pandangan terkait posisi tertinggi di sektor pendidikan yang layak dijabat perempuan

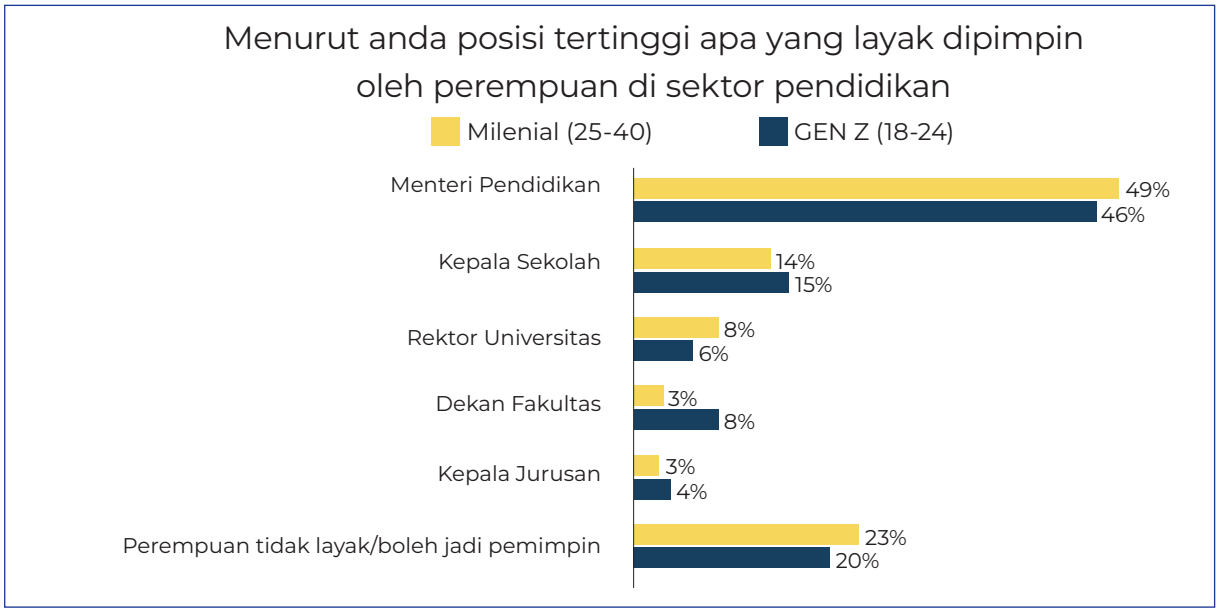

3.14. Ketaatan Beragama dan Nilai yang Dianggap Penting

Pada Generasi Z, responden menilai tingkat ketaatan beragama mereka dalam bentuk mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan walaupun tidak rutin/kadang tidak melakukan (51%). Sementara itu pada Generasi Milenial, paling banyak menilai diri mereka taat dalam bentuk menjalankan semua kegiatan keagamaan seperti shalat lima waktu bagi muslim atau rutin ke gereja bagi umat Kristiani (45%). Rata-rata keseluruhan responden berada di tingkat ketaatan cukup taat dan taat.

Grafik 46 Pandangan terkait tingkat ketaatan beragama

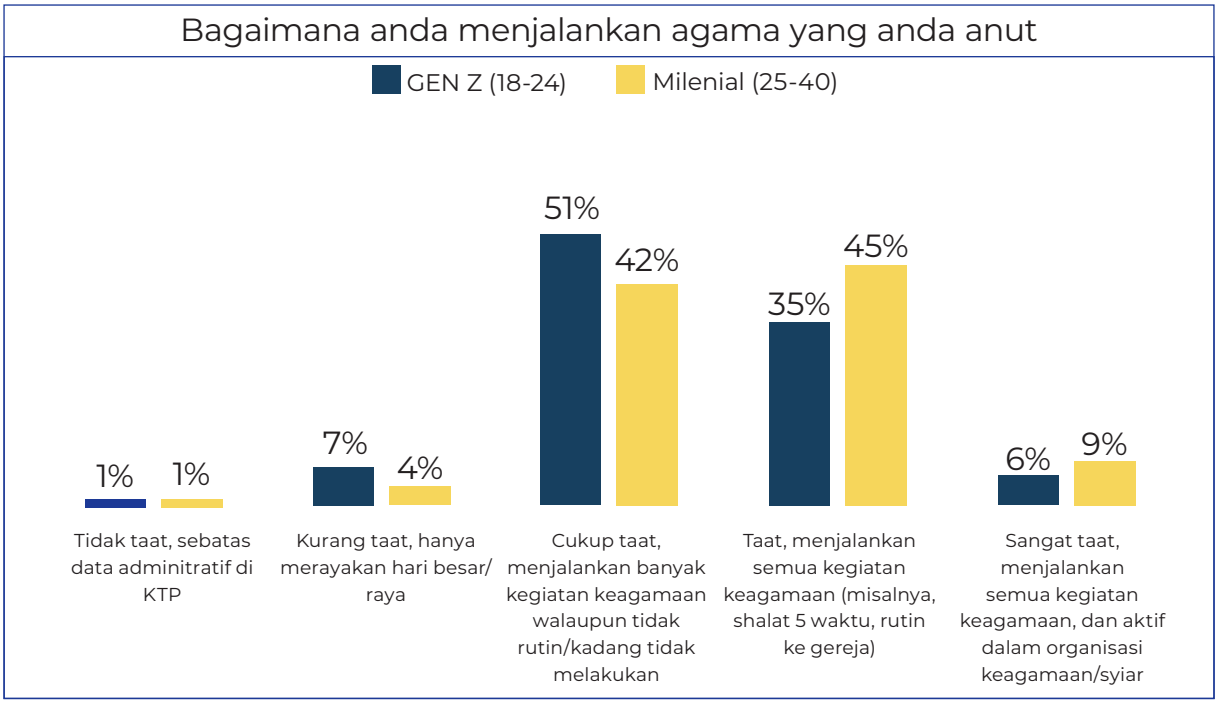

Dalam hal nilai yang dianggap paling penting, nilai menghormati yang lebih tua, pemimpin dan menjaga tradisi serta adat merupakan nilai yang paling banyak dianut baik oleh responden Generasi Z (40%) maupun Milenial (32%). Setelah itu nilai adil atau tidak berbuat curang yang paling banyak mereka anut (Generasi Milenial sebanyak 32%, Generasi Z sebanyak 28%). Nilai peduli sesama, membantu kelompok miskin atau lemah di urutan ketiga (Generasi Milenial sebanyak 18%, Generasi Z sebanyak 17%). Setelah itu ada nilai bersih, menjaga diri dari hal-hal yang mengotori tubuh (Generasi Milenial sebanyak 12%, Generasi Z sebanyak 8%), dan setiap pada kelompok atau negara adalah nilai yang dianggap paling penting oleh sebagian kecil responden (Generasi Milenial sebanyak 7%, Generasi Z sebanyak 8%).

Grafik 47 Pandangan tentang nilai yang dianggap penting

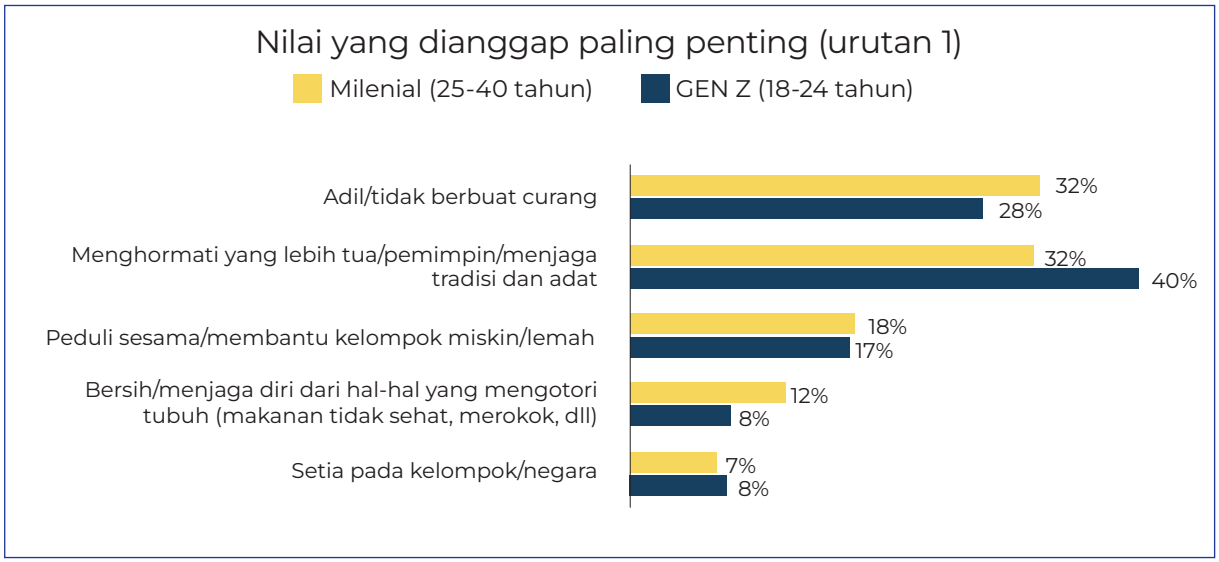

3.15. Pandangan Tentang Mengapa Orang Melakukan Terorisme

Secara umum responden berpandangan bahwa orang melakukan terorisme karena pemahaman agama yang tidak tuntas. Kebanyakan Generasi Milenial (64%) dan Generasi Z (48%) memandang seperti itu. Alasan berikutnya, tingkat pendidikan yang rendah. Sebanyak 38% Generasi Milenial dan 33% Generasi Z memandang demikian. Alasan lainnya yang cukup banyak dipilih adalah terbuai janji-janji akan kehidupan akhirat yang disampaikan pemuka agama (Generasi Milenial sebanyak 37%, Generasi Z sebanyak 36%), ingin menegakkan nilai-nilai agamanya seperti syariat Islam, misalnya (Generasi Milenial 34%, Generasi Z sebanyak 28%).

Selain itu, menurut responden orang yang terlibat terorisme juga dipengaruhi oleh alasan-alasan berikut: keinginan menegakkan negara dengan nilai agamanya seperti negara Islam) (Generasi Milenial 28%, Generasi Z sebanyak 20%), tidak puas dengan kondisi hidupnya (terdesak secara ekonomi) (Generasi Milenial 26%, Generasi Z sebanyak 22%), ingin menjadi tokoh heroik/pahlawan/martir di hadapan kelompok agamanya (Generasi Milenial 24%, Generasi Z sebanyak 20%), tidak puas dengan kondisi masyarakat (Generasi Milenial sebanyak 23%, Generasi Z sebanyak 17%), mengalami gangguan jiwa (Generasi Milenial sebanyak 21%, Generasi Z sebanyak 17%), tertipu oleh pemuka agama (Generasi Milenial sebanyak 20%, Generasi Z sebanyak 17%), dan ingin berjuang melawan kelompok

agama lain (Generasi Milenial sebanyak 18%, Generasi Z sebanyak 14%). Hampir semua responden memilih lebih dari satu alasan mengapa orang melakukan aksi terorisme.

Grafik 48 Pandangan terkait alasan orang melakukan aksi terorisme

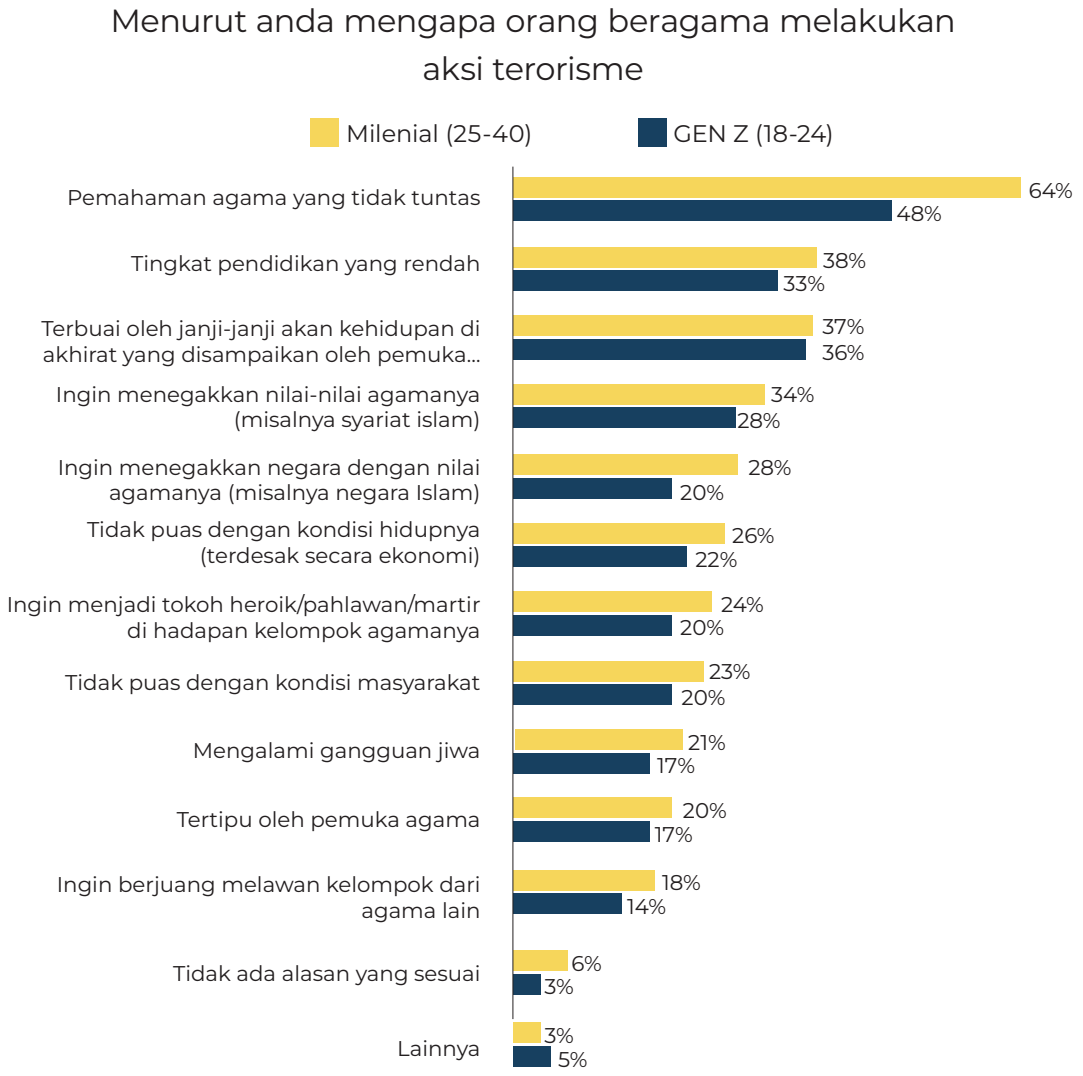

3.16. Afiliasi Kelompok

Bagian ini dan selanjutnya, ditanyakan hanya kepada responden yang beragama Islam (Generasi Milenial sebanyak 84%, Generasi Z sebanyak 80%). Dari kelompok atau organisasi yang memperjuangkan kepentingan umat Muslim, responden Milenial (31%) dan Generasi Z (31%) menilai Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai kelompok yang paling sesuai dengan diri mereka masing-masing. Setelah MUI, Nahdlatul Ulama ada di urutan kedua (Generasi Milenial sebanyak 29%, Generasi Z sebanyak 23%) dan

Muhammadiyah (Generasi Milenial sebanyak 8%, Generasi Z sebanyak 13%).

Terdapat sebagian kecil responden yang menilai FPI sebagai kelompok yang oleh mereka dinilai paling sesuai dengan diri mereka masing-masing dalam memperjuangkan kepentingan umat Muslim (Generasi Milenial sebanyak 2%, Generasi Z sebanyak 4%). Sebagian kecil responden menilai tidak ada pilihan kelompok/organisasi yang sesuai dari pilihan yang tersedia (Generasi Milenial sebanyak 8%, Generasi Z sebanyak 10%), dan sekitar dua dari sepuluh responden menilai tidak ada kelompok/organisasi yang memperjuangkan umat Islam yang sejalan dengan diri mereka (Generasi Milenial sebanyak 21%, Generasi Z sebanyak 19%).

Grafik 49 Pandangan terkait dengan kelompok yang dinilai memperjuangkan kepentingan umat Islam

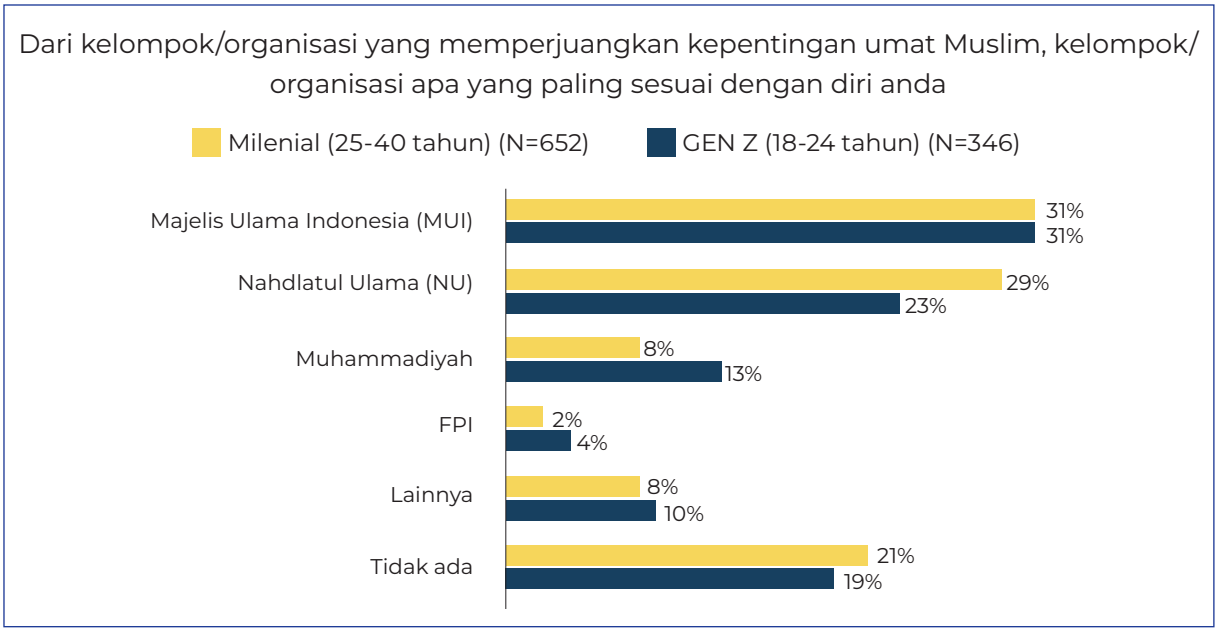

3.17. Kecenderungan Toleransi

Pernyataan paling banyak mendapatkan persetujuan responden muslim (lebih dari 80%) adalah “di antara sejumlah agama di Indonesia dan di dunia, Islam adalah agama satu-satunya yang paling baik” (Generasi Milenial sebanyak 89%, Generasi Z sebanyak 81%). Pernyataan berikutnya yang banyak disetujui responden (lebih dari 60%) adalah “sebagai umat muslim, sebaiknya tidak mengucapkan selamat kepada pemeluk agama lain, seperti selamat Natal, selamat Nyepi dan sebagainya, karena itu melanggar Syariat Islam” (Generasi Milenial sebanyak 62%, Generasi Z sebanyak 61%).

Pernyataan paling banyak mendapatkan persetujuan responden muslim (lebih dari 80%) adalah “di antara sejumlah agama di Indonesia dan di dunia, Islam adalah agama satu-satunya yang paling baik” (Generasi Milenial sebanyak 89%, Generasi Z sebanyak 81%). Pernyataan berikutnya yang banyak disetujui responden (lebih dari 60%) adalah “sebagai umat muslim, sebaiknya tidak mengucapkan selamat kepada pemeluk agama lain, seperti selamat Natal, selamat Nyepi dan sebagainya, karena itu melanggar Syariat Islam” (Generasi Milenial sebanyak 62%, Generasi Z sebanyak 61%).

Pertanyaan yang banyak mendapat persetujuan adalah berikut: “selain Islam, pemeluk agama lain termasuk golongan orang-orang kafir” (Generasi Milenial sebanyak 67%, Generasi Z sebanyak 59%); pernyataan “Karena Islam adalah agama terbesar, sudah semestinya semua aspek kehidupan mengikuti aturan Islam” mendapatkan persetujuan lebih dari 50% responden (Generasi Milenial 56%, Generasi Milenial sebanyak 54%).

Sementara itu, pernyataan yang banyak tidak disetujui responden adalah pernyataan terkait pesantren sebagai tempat tumbuh kembang terorisme hanya disetujui oleh segelintir responden (Generasi Milenial sebanyak 1%, Generasi Z sebanyak 3%). Pernyataan terkait Islam sebagai agama teroris hanya disetujui oleh 3% responden Muslim Milenial, dan 5% responden Muslim Generasi Z. Anggapan lebih baik mempunyai pemimpin yang korup dibandingkan pemimpin yang tidak beragama Islam hanya disetujui 18% responden Milenial, sedang 22% responden Generasi Z.

Beberapa pertanyaan yang disetujui oleh cukup banyak responden, walaupun mayoritas tidak setuju, adalah terkait dengan pernyataan berikut: lebih baik menolong orang yang seagama (Generasi Milenial sebanyak 49%, Generasi Z sebanyak 44%), berteman dengan orang yang seagama lebih baik (Generasi Milenial sebanyak 46%, Generasi Z sebanyak 43%), dan untuk selalu mengikuti apapun perkataan ustadz (Generasi Milenial sebanyak 39%, Generasi Z sebanyak 39%).

Grafik 50 Sikap terkait toleransi antarumat beragama

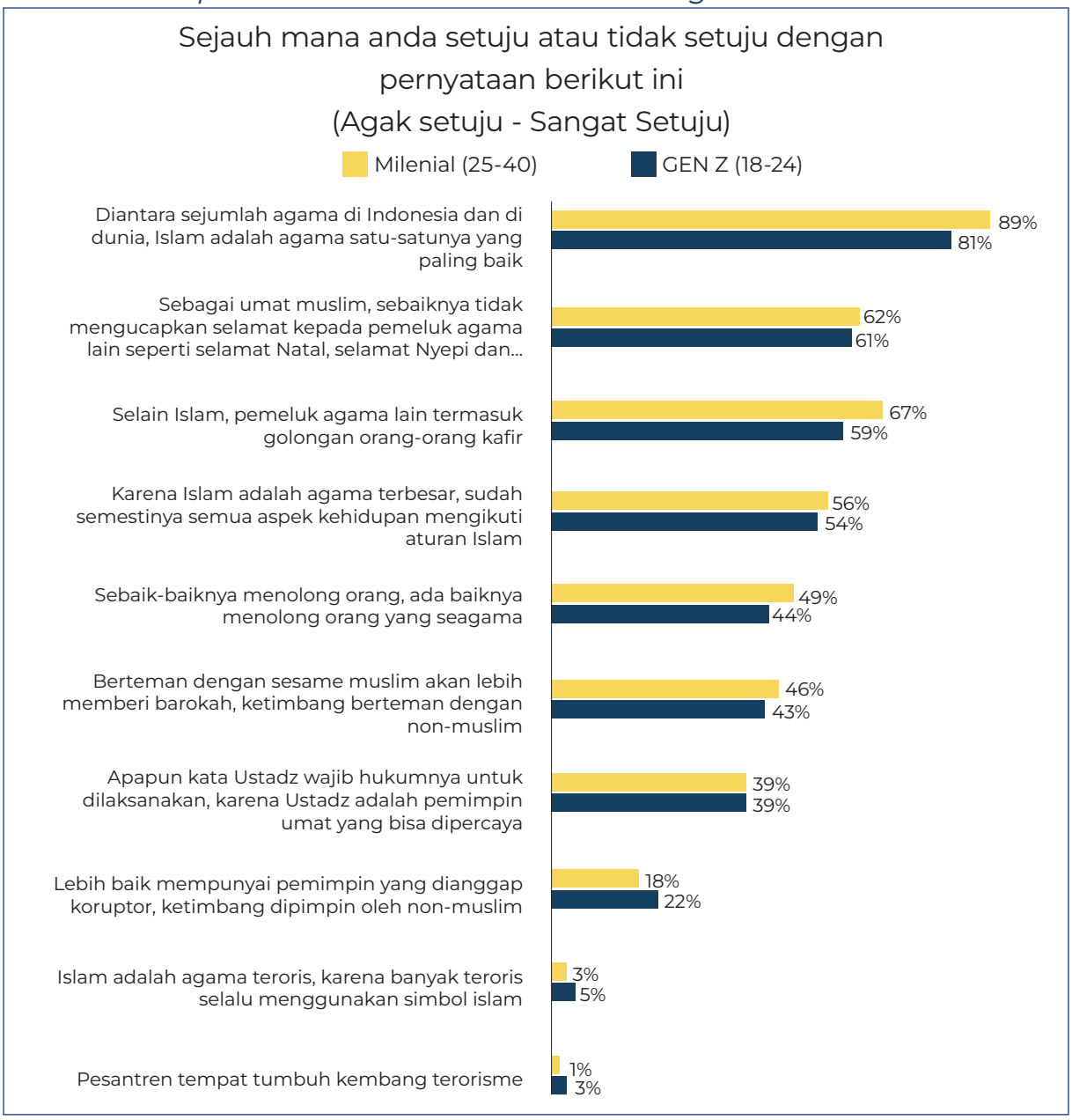

Selain pernyataan-pernyataan tersebut, responden diminta juga merespons pernyataan-pernyataan terkait dengan peristiwa yang menggambarkan tindakan intoleran terhadap kelompok agama minoritas, tindakan kelompok yang mengatasnamakan Islam melawan pemerintah, dan aksi terorisme di Indonesia.

Mayoritas responden setuju dengan pernyataan Ahmadiyah dan Syiah sebaiknya tidak tumbuh, karena mereka mengajarkan agama Islam secara sesat (Generasi Milenial sebanyak 79%, Generasi Z sebanyak 70%). Selanjutnya adalah pernyataan yang disetujui oleh cukup banyak responden,

walaupun secara keseluruhan mayoritas responden cenderung tidak setuju. Pernyataan yang cukup banyak mendapatkan persetujuan adalah syariat Islam adalah hukum manusia yang paling sesuai dengan perintah Allah, untuk itu Indonesia akan lebih baik jika menjadi negara Islam (Generasi Milenial sebanyak 42%, Generasi Z sebanyak 42%).

Pernyataan yang juga cukup banyak mendapatkan persetujuan adalah "semakin banyak ormas yang menggunakan simbol Islam maka kehidupan umat Islam akan lebih baik, karena mereka menjaga tegaknya syariat Islam" (Generasi Milenial sebanyak 39%, Generasi Z sebanyak 45%). Pernyataan tersebut lebih banyak mendapatkan persetujuan oleh responden Generasi Z. Tiga pernyataan berikut adalah pernyataan yang tidak disetujui oleh mayoritas responden beragama Islam. *Pertama*, terkait tindakan menyerang orang yang berbeda agama, dan penggunaan bom sebagai bagian dari jihad. Pernyataan ini hanya disetujui oleh 3% responden Milenial, dan 5% responden Generasi Z yang beragama Islam. Yang artinya lebih dari 95% responden yang tidak setuju dengan pernyataan ini. *Kedua*, terkait aksi terorisme oleh kelompok yang mengatasnamakan Islam sebagai penegakan syariat Islam, seperti jaringan Poso, yang hanya disetujui oleh sebagian kecil responden (Generasi Milenial sebanyak 4%, Generasi Z sebanyak 10%).

Pernyataan terakhir, *ketiga*, terkait dengan penolakan terhadap pembangunan tempat ibadah kelompok agama minoritas, seperti di Karimun, dan perayaan hari raya kelompok agama minoritas seperti di Dharmasraya. Hanya 18% responden Milenial beragama Islam yang setuju dengan penolakan tersebut, namun lebih dari seperempat responden Generasi Z yang setuju (27%). Secara keseluruhan, lebih banyak responden Gen Z yang menyetujui tindakan intoleran terhadap kelompok minoritas, dan aksi terorisme. Walau demikian mayoritas responden Generasi Milenial dan Generasi Z tidak setuju.

Grafik 51 Sikap terkait aliran sesat dan pendirian rumah ibadah

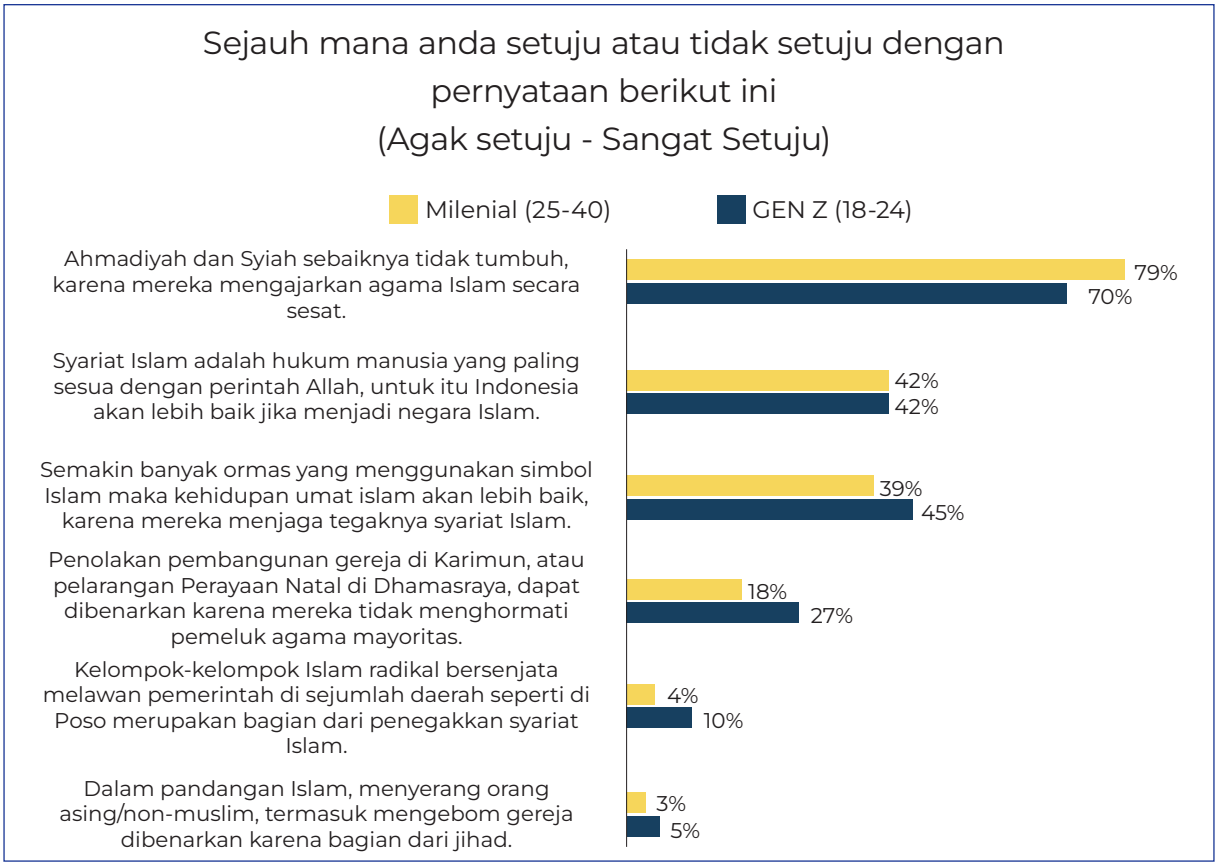

3.18. Kesimpulan Temuan

1. Hampir semua responden bersikap positif terhadap inklusivitas dalam masyarakat (> 95%). Ini berimplikasi terhadap pembinaan hubungan baik antarwarga. Mayoritas responden merasa bisa berhubungan baik dengan warga yang berbeda agama di lingkungan pendidikan maupun pekerjaan (Generasi Milenial sebanyak 96%, Generasi Z sebanyak 97%) dan merasa nyaman untuk berhubungan dan berteman dengan orang yang berbeda agama (Generasi Milenial sebanyak 78%, Generasi Z sebanyak 82%). Kebanyakan responden juga tidak setuju pemberlakuan pemisahan tempat tinggal berdasarkan kelompok agama (Generasi Milenial sebanyak 82%, Generasi Z sebanyak 84%).

2. Mayoritas responden (89%) melaporkan tidak ada perumahan yang melakukan pemisahan berdasarkan agama penghuninya di daerah mereka. Mayoritas responden melaporkan bahwa di daerah mereka sekolah menerima siswa dari semua latar belakang agama (83%), tidak ada pemaksaan mengikuti pendidikan agama

kelompok mayoritas pada siswa dari kelompok minoritas (69%), dan mendapatkan pelajaran terkait agama-agama yang ada di Indonesia (65%). Mayoritas

3. Mayoritas responden setuju bahwa sekolah harus menerima siswa dengan latar belakang agama apa pun (Generasi Milenial sebanyak 93%, Generasi Z sebanyak 90%), penganut agama minoritas tidak diwajibkan mengikuti pelajaran agama kelompok mayoritas (Generasi Milenial sebanyak 91%, Generasi Z sebanyak 87%), dan untuk agar diberikan pendidikan tentang agama-agama yang ada di Indonesia di sekolah (Generasi Milenial sebanyak 83%, Generasi Z sebanyak 83%). Selanjutnya, lebih dari setengah (>58%) responden setuju agar sekolah menyediakan tempat ibadah untuk seluruh kelompok agama, diberikan pengetahuan tentang agama tradisi/adat yang ada di Indonesia seperti Parmalim dan Kejawen, pengetahuan akan Tasawuf dan Tarikat, dan pengetahuan akan agama-agama yang ada di dunia.

4. Secara umum responden mendukung inklusivitas, namun ketika dibatasi dalam ranah beragama yang lebih khusus, ditemukan masih banyak responden yang bersifat eksklusif dalam beragama dan berinteraksi dengan orang-orang yang beragama lain. Cukup banyak responden dari Generasi Milenial dan Generasi Z setuju penerapan peraturan berpakaian sesuai dengan agama mayoritas di sekolah. Selain itu, 21% responden Generasi Milenial dan 17% responden Generasi Z setuju diberlakukan pemisahan laki-laki dan perempuan dalam kegiatan, seperti pada acara pernikahan dan di sekolah. Lebih dari 50% responden tidak setuju dengan pernikahan berbeda agama. Sebanyak 48% responden Generasi Z dan 56% Generasi Milenial tidak setuju dengan pernikahan antarorang yang berbeda agama. Hanya kurang 20% responden menyetujui pernikahan beda agama.

5. Mayoritas responden Generasi Z (77%) dan Generasi Milenial (81%) hanya suka mencari informasi tentang agamanya, menilai kelompok agamanya lebih baik dari kelompok agama lainnya (Generasi Milenial sebanyak 72%, Generasi Z sebanyak 62%), dan cenderung menilai anggota kelompok agama mereka lebih

dermawan dibandingkan agama dan anggota kelompok agama lain (Generasi Milenial sebanyak 38%, Generasi Z sebanyak 37%). Kecenderungan responden menilai agama dan anggota kelompok agama mereka lebih baik dibandingkan agama dan anggota kelompok agama lain, mengindikasikan eksklusivitas dalam hal pemikiran dan wawasan keagamaan. Kecenderungan ini tergolong wajar dan dapat dimengerti karena orang umumnya memberikan penilaian positif terhadap pilihan dan kelompok mereka sendiri. Orang mengafirmasi pilihan dan apa yang mereka miliki sebagai hal baik untuk menjaga harga diri.

6. Sikap kebanyakan responden terhadap nasionalisme Indonesia tergolong positif yang kuat. Hampir seluruh responden setuju seorang warga negara harus menghormati negara dan menjaga tradisinya (Generasi Milenial sebanyak 98%, Generasi Z sebanyak 97%), serta bersikap positif terhadap Pancasila (Generasi Milenial sebanyak 98%, Generasi Z sebanyak 97%). Kebanyakan responden juga menunjukkan sikap positif terhadap pengajaran cinta negara bagi anak-anak Indonesia (Generasi Milenial sebanyak 98%, Generasi Z sebanyak 97%) dan berpandangan bahwa orang Indonesia harus mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi (Generasi Milenial sebanyak 75%, Generasi Z sebanyak 75%). Ini sejalan dengan pandangan kebanyakan responden bahwa kelompok mayoritas dan minoritas memiliki hak politik yang sama dan setara (Generasi Milenial sebanyak 53%, Generasi Z sebanyak 55%).

7. Dalam hal toleransi budaya, kebanyakan responden menunjukkan kecenderungan toleransi budaya yang tinggi. Hampir semua responden menunjukkan sikap positif terhadap keragaman suku, budaya dan kelompok agama di Indonesia (Generasi Milenial sebanyak 99%, Generasi Z sebanyak 99%). Mereka menilai keragaman sebagai hal yang baik dan penting untuk dipertahankan (Generasi Milenial sebanyak 75%, Generasi Z sebanyak 73%). Cukup banyak responden juga setuju jika orang dari kelompok suku atau adat minoritas menjadi pemimpin (Generasi Milenial sebanyak 63%, Generasi Z sebanyak 65%), seperti presiden, gubernur, wakil presiden, dan wakil gubernur. Kebanyakan responden juga memiliki

sikap positif kuat terhadap pernikahan antarsuku. Mereka setuju bahwa pernikahan antarsuku boleh dilakukan dalam kondisi apa pun (Generasi Milenial sebanyak 62%, Generasi Z sebanyak 56%).

8. Sikap responden terhadap pemimpin perempuan tinggi (Generasi Milenial sebanyak 80%, Generasi Z sebanyak 77%). Mereka (>50%) memandang perempuan layak jadi pemimpin di kementerian/ lembaga dan perusahaan swasta, provinsi, kota/kabupaten dan DPRD di Indonesia. Cukup banyak juga (>45%) yang menilai perempuan layak untuk memimpin di BUMN dan BUMD. Hal ini sejalan juga dengan sikap terhadap kelayakan perempuan untuk bertarung secara politik dan mencalonkan diri (>40%), serta berkiprah, dan menempati posisi tertinggi di bidang pendidikan (>45%) dan pemerintahan (> 50%).

9. Nilai yang dianggap paling penting dan dianut kebanyakan responden adalah nilai menghormati orang yang lebih tua, pemimpin, dan menjaga tradisi serta adat (Generasi Milenial sebanyak 32%, Generasi Z sebanyak 40%). Setelah itu nilai adil atau tidak berbuat curang yang paling banyak mereka anut (Generasi Milenial sebanyak 32%, Generasi Z sebanyak 28%). Nilai peduli sesama, membantu kelompok miskin atau lemah di urutan ketiga. Setelah itu ada nilai bersih, menjaga diri dari hal-hal yang mengotori tubuh, dan setiap pada kelompok atau negara yang dianggap paling penting oleh sebagian kecil responden.

10. Kebanyakan responden berpandangan bahwa orang melakukan terorisme karena pemahaman agama yang tidak tuntas (Generasi Milenial sebanyak 64%, Generasi Z sebanyak 48%), dan tingkat pendidikan yang rendah (Generasi Milenial sebanyak 38%, Generasi Z sebanyak 33%). Pada responden yang beragama Islam, kelompok atau organisasi yang paling banyak dinilai memperjuangkan kepentingan umat Muslim adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan dinilai paling sesuai dengan diri mereka masing-masing (Generasi Milenial sebanyak 31%, Generasi Z sebanyak 31%). Setelah MUI, Nahdlatul Ulama ada di urutan kedua, lalu Muhammadiyah. Walau demikian, sekitar 20% responden beragama Islam merasa tidak ada kelompok yang memperjuangkan agama Islam yang

sesuai dengan diri mereka.

11. Dalam pandangan dan sikap terhadap kepemimpinan dari agama minoritas, penerimaan responden lebih rendah dibanding pada pemimpin dari suku minoritas dan perempuan. Setengah responden Generasi Milenial (49%), dan Generasi Z (53%) setuju terhadap pemimpin dari kelompok agama minoritas. Apabila dilihat dari sudut pandang responden dari agama minoritas, hampir semua (90%) setuju orang dari kelompok agama minoritas layak menjadi pemimpin. Secara keseluruhan hanya 14% responden Generasi Milenial dan 18% responden Generasi Z yang setuju bahwa posisi presiden dapat dipegang oleh orang dari kelompok agama minoritas. Tampaknya masih cukup banyak responden yang memandang bahwa kepemimpinan di masyarakat harus dipegang oleh mayoritas.

12. Cukup banyak responden yang memiliki keyakinan bahwa pembangunan tempat ibadah kelompok minoritas perlu mendapat persetujuan dari kelompok mayoritas (Generasi Milenial sebanyak 39%, Generasi Z sebanyak 48%). Kemudian, sekitar 30% respondenmelaporkan bahwa sekolah di daerah mereka menerapkan peraturan berpakaian sesuai dengan agama mayoritas yang ada. Selain itu ada sebagian kecil responden yang melaporkan terjadi pemisahan laki-laki dan perempuan dalam kegiatan sosial di daerahnya (17%).

13. Hampir seluruh responden muslim di kedua kategori usia menyatakan setuju dengan pernyataan “di antara sejumlah agama di Indonesia dan di dunia, Islam adalah agama satu-satunya yang paling baik” (Generasi Milenial sebanyak 89%, Generasi Z sebanyak 81%). Pandangan bahwa agama/keyakinan yang mereka anut sebagai yang terbaik sebetulnya pandangan yang wajar. Namun, ia berpotensi mengarah pada perilaku intoleran apabila digabungkan dengan sikap lain yang memandang negatif pada kelompok pemeluk agama lain, ataupun kelompok agama minoritas.

14. Mayoritas responden setuju dengan pernyataan “sebagai umat muslim, sebaiknya tidak mengucapkan selamat kepada pemeluk agama lain, seperti selamat Natal, selamat Nyepi dan sebagainya,

karena itu melanggar Syariat Islam" (Generasi Millenial sebanyak 62%, Generasi Z sebanyak 61%). Pandangan ini mengindikasikan sikap tidak mengakui agama itu. Hal ini bisa dilihat sebagai bentuk sikap intoleran pasif.

15. Kebanyakan responden setuju dengan pernyataan "selain Islam, pemeluk agama lain termasuk golongan orang-orang kafir" (Generasi Milenial sebanyak 67%, Generasi Z sebanyak 59%). Bagi sebagian orang, penggunaan istilah kafir adalah bagian dari ajaran agama Islam, maka wajar untuk diyakini oleh responden yang memeluk Islam. Namun, pandangan ini dapat mengarah pada sikap intoleran ketika diberikan muatan emosi negatif dan dikaitkan dengan tindakan tertentu terhadap golongan tersebut.

16. Mayoritas responden mendukung pernyataan Ahmadiyah dan Syiah sebaiknya tidak tumbuh, karena mereka mengajarkan agama Islam secara sesat" (Generasi Milenial sebanyak 79%, Generasi Z sebanyak 70%). Pandangan ini menunjukkan masih besar potensi untuk terjadi tindakan intoleran terhadap pemeluk agama Ahmadiyah dan Syiah di Indonesia.

17. Setengah dari jumlah responden muslim bersikap simpatik terhadap "perjuangan umat Islam". Hal ini tampak dari kesetujuan pada pernyataan "Karena Islam adalah agama terbesar, sudah semestinya semua aspek kehidupan mengikuti aturan Islam" (Generasi Milenial 56%, Generasi Z sebanyak 54%) dan "Syariat Islam adalah hukum manusia yang paling sesuai dengan perintah Allah, untuk itu Indonesia akan lebih baik jika menjadi negara Islam" (Generasi Milenial sebanyak 42%, Generasi Z sebanyak 42%). Hal ini menunjukkan pentingnya untuk membangun pemahaman akan keselarasan Pancasila sebagai ideologi bangsa, serta semangat Nasionalisme dengan ajaran Agama Islam.

BAB 4
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1. Kesimpulan

1. Ada indikasi sikap positif yang kuat terhadap inklusivitas. Hampir semua responden bersikap positif terhadap inklusivitas dalam masyarakat. Ini ditandai dengan sikap responden yang setuju dengan pernyataan bahwa sekolah harus menerima siswa dengan latar belakang agama apa pun, penganut agama minoritas tidak diwajibkan mengikuti pelajaran agama kelompok mayoritas, dan para pelajar diberikan pendidikan tentang agama-agama yang ada di Indonesia di sekolah. Mayoritas responden juga mengaku tidak pernah mengalami pemaksaan dalam mengikuti pendidikan agama kelompok mayoritas pada siswa dari kelompok minoritas. Sikap inklusif ini mendasari usaha-usaha membangun hubungan baik antar warga.

2. Dalam ranah beragama yang lebih khusus, ada indikasi eksklusivitas beragama dan berinteraksi dengan orang-orang dari agama berbeda. Cukup banyak responden setuju penerapan peraturan berpakaian sesuai dengan agama mayoritas di sekolah dan setuju diberlakukan pemisahan laki-laki dan perempuan dalam kegiatan. Kebanyakan responden tidak setuju dengan pernikahan berbeda agama. Mayoritas responden hanya suka mencari informasi tentang agamanya, dan menilai kelompok agamanya lebih baik dari kelompok agama lainnya.

3. Kebanyakan responden memiliki sikap positif yang kuat terhadap nasionalisme Indonesia. Mereka setuju bahwa seorang warga negara harus menghormati negara dan menjaga tradisinya, serta bersikap positif terhadap Pancasila.

4. Responden menunjukkan pandangan dan sikap toleransi yang kuat terhadap keragaman budaya. Hampir semua responden

menunjukkan sikap positif terhadap keragaman suku, budaya dan kelompok agama di Indonesia, dan menilai keragaman sebagai hal baik dan penting dipertahankan.

5. Sikap terhadap pemimpin perempuan tergolong positif dan tinggi. Para responden memandang perempuan layak jadi pemimpin di kementerian/lembaga dan perusahaan swasta, provinsi, kota/kabupaten dan DPRD di Indonesia, serta menilai perempuan layak untuk memimpin di BUMN dan BUMD.

6. Nilai yang dianggap penting dan dianut oleh kebanyakan responden adalah nilai menghormati orang yang lebih tua, menghormati pemimpin, dan pentingnya menjaga tradisi serta adat. Nilai berikutnya, adil atau tidak berbuat curang yang paling banyak mereka anut, peduli sesama, dan membantu kelompok miskin atau lemah.

7. Secara keseluruhan masih ada indikasi intoleransi dan kecenderungan sikap negatif terhadap kebebasan beragama. Juga dalam hal pandangan dan sikap terhadap kepemimpinan minoritas. Lebih dari setengah responden memiliki keyakinan bahwa pembangunan tempat ibadah kelompok minoritas perlu mendapat persetujuan dari kelompok mayoritas. Banyak juga yang melaporkan bahwa sekolah di daerah mereka menerapkan peraturan berpakaian sesuai dengan agama mayoritas yang ada. Selain itu sebagian kecil responden melaporkan terjadi pemisahan laki-laki dan perempuan dalam kegiatan sosial di daerahnya.

4.2. Rekomendasi

4.2.1. Rekomendasi untuk Pemerintah Pusat.

1. Presiden mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mengurangi praktik-praktik diskriminasi berbasis agama dan keyakinan baik melalui instrumen hukum maupun pemberdayaan masyarakat.

2. Pemerintah Pusat meratifikasi dan menyebarkan informasi terkaiperjanjian-perjanjian internasional yang relevan untuk

mencegah kekerasan berbasis agama dan keyakinan serta praktik-praktik penghasutannya.

3. Kementerian/lembaga terkait bersama pemimpin dan aktor agama menjalankan program-program strategis untuk meningkatkan kesadaran dan implementasi nilai dan aturan-aturan dalam perjanjian-perjanjian yang relevan untuk mencegah kekerasan berbasis agama dan keyakinan serta praktik-praktik penghasutannya.

4. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyusun atau melakukan harmonisasi regulasi terkait izin dan aturan pengembangan perumahan yang memperkuat inklusivisitas dan mencegah praktik-praktik perumahan eksklusif keagamaan.

5. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memberi penghargaan kepada para pengembang perumahan yang menerapkan kebijakan inklusivitas dan memberi sanksi bagi pelaku pelanggaran praktik-praktik pembangunan perumahan eksklusif.

6. Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi dan Kementerian Agama menerapkan kurikulum pendidikan berisi Kajian Keberagamaan (*Religious Study*) dan kerangka etika masing-masing pada jenjang pendidikan mulai dari SMP hingga SMA serta memfasilitasi interaksi langsung siswa dengan guru agama dari agama lain.

7. Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi dan Kementerian Agama melakukan pemantauan, dan evaluasi berkala terkait implementasi pendidikan agama, kualitas dan kemampuan mengajar pendidik agama, dan peraturan internal institusi/lembaga penyelenggara pendidikan dalam membangun dan memperkuat toleransi

8. Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi dan Kementerian Agama menyusun standardisasi mutu dan penilaian

inklusivitas beragama pada tiap institusi/lembaga penyelenggara pendidikan dengan skema insentif dan teguran/hukuman.

9. Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi dan Kementerian Agama memfasilitasi peningkatan pengetahuan dan kapasitas guru agama terkait pemahaman sosiologis, psikologis, kebangsaan, dan pemahaman agama lain secara mendalam.

10. Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset memasukkan dalam kurikulum kegiatan praktik layanan/kontribusi sosial (*social and community service*) mulai dari tingkat pendidikan dasar untuk mendorong terbentuknya rasa kepemilikan sosial (*social belongingness*).

4.2.2. Rekomendasi untuk Pemerintah Daerah.

1. Bersama Pemerintah Pusat, pemerintah daerah (Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten) mendukung dan memfasilitasi para pemimpin agama lokal yang melakukan usaha menentang hasutan berbasis agama dan keyakinan sekaligus memberi perlindungan kepada mereka dari ancaman hasutan dan kekerasan.

4.2.3. Rekomendasi untuk Organisasi Masyarakat Sipil.

1. Mengembangkan berbagai pendampingan dan pelatihan bagi pemimpin dan aktor agama muda untuk meningkatkan kemampuan dalam mengatasi kasus-kasus kekerasan berbasis agama dan keyakinan serta praktik-praktik penghasutannya, penguatan kemampuan komunikasi antarbudaya dan antaragama, kewarganegaraan global, dan penggunaan media tradisional dan media baru.

4.2.4. Rekomendasi untuk Pemuka Agama.

1. Pemuka agama melanjutkan dan memperkuat usaha-usaha membangun solidaritas lintas agama dan keyakinan untuk membangun kesejahteraan masyarakat.

2. Pemuka agama memperkuat upaya-upaya pemberdayaan dan

penguatan masyarakat yang mendorong penerapan prinsip-prinsip etika dan hak asasi manusia.

3. Pemuka agama mempromosikan nilai fundamental untuk menerima orang lain apa adanya, apa pun keyakinan mereka, tanpa memaksa orang lain untuk mengubah keyakinan mereka.

4. Pemuka agama mengidentifikasi teks-teks inti dari kitab suci, tulisan-tulisan teologis, dan materi pedagogis yang berpengaruh untuk digunakan dalam mempromosikan nilai saling menghormati dan pengertian.

5. Pemuka agama memasukkan materi persaudaraan dalam kemanusiaan, perdamaian, kohesi sosial dan penerimaan perbedaan identitas agama, keyakinan, status sosial, dan gender dalam khotbah-khotbah keagamaan.

6. Pemuka agama mendorong dan memperkuat pendampingan keluarga berbasis nilai-nilai keagamaan yang terbuka di masing-masing komunitas agama yang dipimpin.

7. Pemuka agama menghindari dari praktik-praktik politisasi agama dan keyakinan serta membangun komunikasi dengan aktor-aktor politik yang memiliki visi membangun toleransi dan pemberdayaan umat dalam arti luas.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, H. *dkk.* (2019) *Indonesia Moslem Report 2019: The Challenges of Indonesia Moderate Moslems*, *Alvara*. Jakarta.

CSIS (2017) *Ada Apa dengan Milenial? Orientasi Sosial, Ekonomi dan Politik*. Jakarta. Tersedia pada: https://www.csis.or.id/uploaded_file/event/ada_apa_dengan_milenial____paparan_survei_nasional_csis_mengenai_orientasi_ekonomi__sosial_dan_politik_generasi_milenial_indonesia__notulen.pdf.

INFID (2016), Persepsi dan Sikap Generasi Muda terhadap Radikalisasi dan Ekstremisme Kekerasan, Temuan Survei 6 Kota (Agustus-Oktober 2016), Jakarta: INFID

INFID dan Jaringan GUSDURian (2020) Laporan Persepsi dan Sikap Generasi Muda Terhadap Intoleransi dan Ekstrimisme Kekerasan, Jakarta: INFID

Wahid Foundation (2018) *Survei Nasional Potensi Radikalisme Sosial-Keagamaan dan Intoleransi di Kalangan Perempuan Muslim Indonesia. Periode survei 6 – 27 Oktober 2017*. Jakarta.

Murphy, Andrew R. (1997). "Tolerance, Toleration, and the Liberal Tradition". *Polity*. The University of Chicago Press Journals. 29 (4): 593–623.

Peterson, S. (2003). Tolerance. Beyond Intractability. http://www.beyondintractability. org/tolerance.htm. Retrieved 4 October 2021.

PPIM UIN Jakarta (2018) *Api Dalam Sekam: Keberagamaan Generasi Z*, *Convey Report*. Ciputat.

Satyarthi, K., & Yousafzai, M. (2014). Nobel lecture. Speech presented at the Nobel Prize Award Ceremonies, Oslo, Norway.

Setara Institute (2021) *Pandemi Lahan Subur Diskriminasi dan Intoleransi*, *www.setara-institute.org*. Tersedia pada: https://setara-institute.org/pandemi-lahan-subur-diskriminasi-dan-intoleransi/ (Diakses: 16 Januari 2022).

UNESCO (1995). *A Global Quest for Tolerance*. n.p.: UNESCO Publication Office http://www.unesco.org/tolerance/global.htm. Retrieved 4 October 2021.

Vahland, J. (2017). 'Toleranzdiskurse', *Zeno* no. 37, pp. 7–25.

Van Doorn, M. (2014). The nature of tolerance and the social circumstances in which it emerges. *Current Sociology*, *62*(6), 905-927.

VOA Indonesia (2020) *Kehidupan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia Masih Jauh dari Harapan*, *www.voaindonesia.com*. Tersedia pada: https://www.voaindonesia.com/a/potret-kehidupan-beragama-dan-berkeyakinan-di-indonesia-masih-jauh-dari-harapan-/5598626.html (Diakses: 16 Januari 2022).

Zagorin, P. (2013). *How the idea of religious toleration came to the West*. Princeton University Press.

NGO in Special Consultative Status
with the Economic and Social Council of the United Nations, Ref. No: D1035

Jl. Jatipadang Raya Kav.3 No.105 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12540
021 7819734, 7819735 info@indfid.org www.infid.org

Follow Us :

INFIDI NFID_ID